

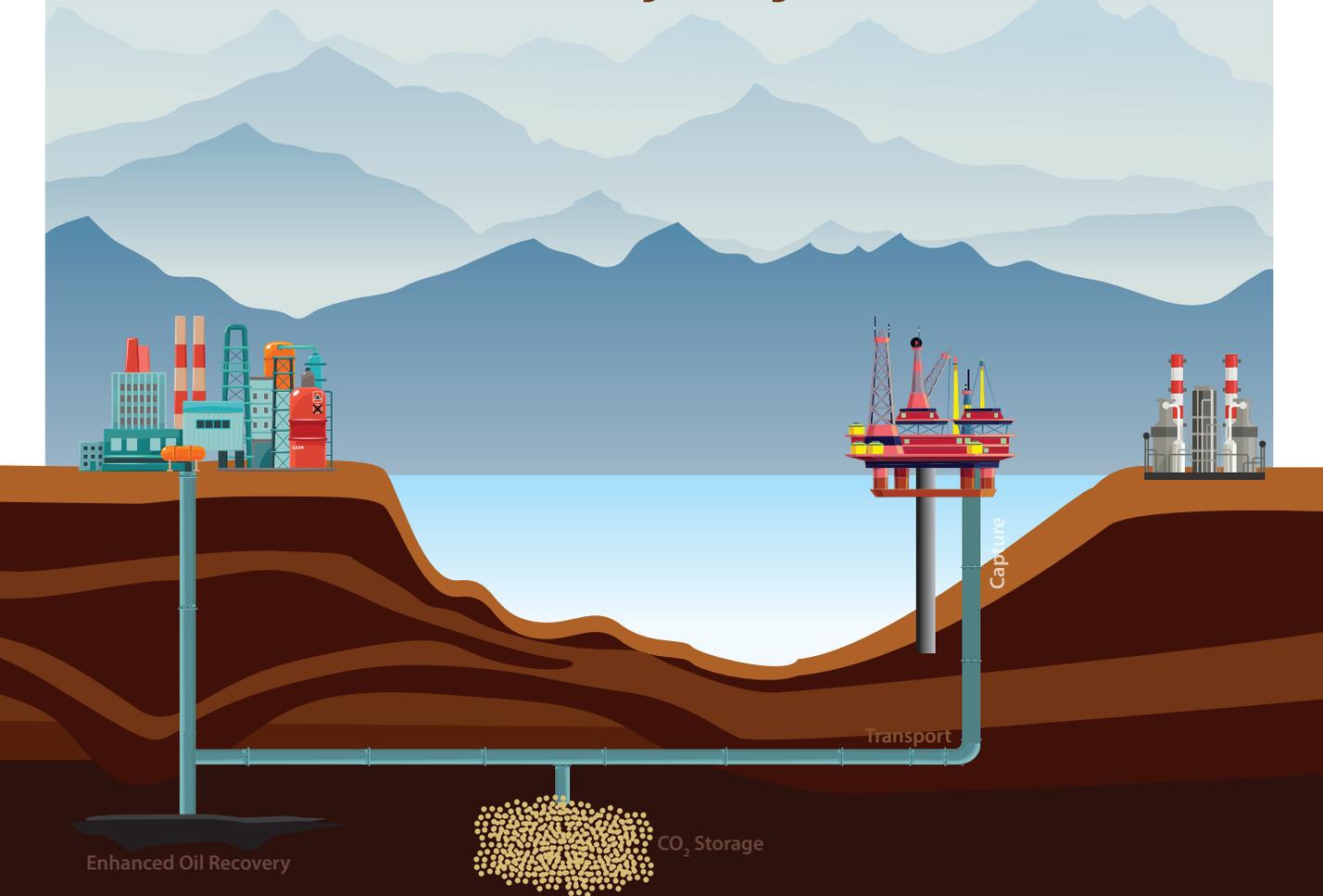


DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

JURNAL MIGAS

Issue 11 Januari-Juni 2023

Potensi CCS/CCUS Tingkatkan Produksi Migas dan Terwujudnya NZE



SAJIAN UTAMA

Pembangunan Proyek
Pipa Cirebon-Semarang
(Cisem)

BERANDA

Mendorong Peningkatan
Produksi Migas
Nasional

BERANDA

All Out Wujudkan
Keselamatan
Migas



Lawan

KORUPSI

Demi Kemakmuran Negeri...



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

GEDUNG IBNU SUTOWO

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 5, Jakarta 12910

Telp. (021) 526 8910, Fax. (021) 526 8980

www.migas.esdm.go.id



Potensi CCS/CCUS Tingkatkan Produksi Migas dan Terwujudnya NZE

JURNAL MIGAS
Issue 11 Januari-Juni 2023



Perubahan adalah keniscayaan. Sesuatu yang berubah berpotensi mengubah hal-hal lain. Perubahan iklim, misalnya, mengubah banyak hal. Cara pandang, sikap, strategi hingga teknologi turut berubah. Terkait teknologi di subsektor minyak dan gas bumi (migas), dikenal penangkapan, utilisasi, dan penyimpanan karbon atau *Carbon Capture Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS)*.

Bagi Indonesia, penerapan teknologi CCS/CCUS adalah sesuatu yang baru. Bagi beberapa negara lain, itu bukanlah teknologi baru. Namun, tujuannya identik, yakni melaksanakan kegiatan migas yang lebih ramah lingkungan. Lebih spesifik, CCS/CCUS merupakan salah satu pilihan untuk tetap berkomitmen terhadap *Net Zero Emission (NZE)* pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Saat ini, Indonesia berada di masa transisi energi. Di masa ini, gas bumi berperan penting. Di masa ini pula, CCS/CCUS memainkan peran penting, khususnya pada bidang industri, pembangkit listrik, dan transformasi bahan bakar. Payung hukum pun tengah disiapkan untuk mendukung pengembangan CCS/CCUS di tanah air.

Perubahan akan selalu membawa tantangan. Begitu pula dalam penerapan CCS/CCUS. Tantangan-tantangan yang dimaksud salah satunya ialah biaya yang cukup tinggi, terutama untuk *CO₂ Capture*. Maka, diperlukan upaya-upaya untuk mendorong keekonomian proyek antara lain pengembangan teknologi yang lebih murah, kerja sama untuk *cost sharing*, dan insentif.

Tak bisa dikesampingkan, sinergi antarpemangku kepentingan. Penerapan teknologi CCS/CCUS akan tetap menjadi wacana bila hanya dibebankan pada satu atau dua pihak. Peran serta seluruh pemangku kepentingan adalah sesuatu yang wajib. Saran, kritik membangun, komitmen hingga investasi konkret akan mendorong penerapan teknologi CCS/CCUS di Indonesia.



10 >> BERANDA

Pemerintah Dukung Penuh Pembangunan Proyek Pipa Cirebon-Semarang (Cisem)

Sempat mangkrak lebih dari satu dasawarsa, proyek Pipa Cirebon-Semarang (Cisem) kini terlaksana. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, menegaskan dukungannya terhadap pembangunan pipa transmisi gas bumi yang nantinya terintegrasi dengan pipa transmisi Gresik-Semarang ini.

JURNAL MIGAS Issue 11 Januari-Juni 2023

DITERBITKAN OLEH

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
ISSN 2528-4169

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Sekretaris Direktorat Jenderal Migas

Redaktur **Bobied Guntoro**

Editor/ Penyunting **Akhmad Fauzi**

Budiman, Rizky Amalia Wismashanti

Desain Grafis dan Fotografer

Agustiawan Mendrofa,

Krisna Dinda Bestari, Ivone Rosa Amilia

Sekretariat **Hafriansyah**

Kontributor **Tursilowulan Wahyu**

6 SAJIAN UTAMA

Potensi CCS/CCUS Tingkatkan Produksi Migas dan Terwujudnya NZE

10 Pembangunan Proyek Pipa Cirebon-Semarang (Cisem)

13 BERANDA

Mendorong Peningkatan Produksi Migas Nasional

16 Transformasi Subsidi LPG 3 Kg Agar Lebih Tepat Sasaran

20 *All Out* Wujudkan Keselamatan Migas

24 SOROT

Peran LEMIGAS dalam Pengembangan Kegiatan Usaha Migas di Tanah Air

28 REGULASI

Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 Atur Mekanisme Pengguna Gas Bumi Tertentu dan HGBT di Bidang Industri

30 Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 2022–2031 Tertuang dalam Kepmen Ini

32 Kepmen Menteri ESDM Ini Atur Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Agar Tepat Sasaran

33 Regulasi Ini Atur Sistem Keanggotaan dan Nonanggota Pemanfaatan Data Hulu Migas

34 Kontrak Bagi Hasil 4 WK Diteken, Total Komitmen Pasti US\$79,1 Juta

36 Dirjen Migas Terbitkan Aturan Penyaluran BBM, BBG, dan LPG

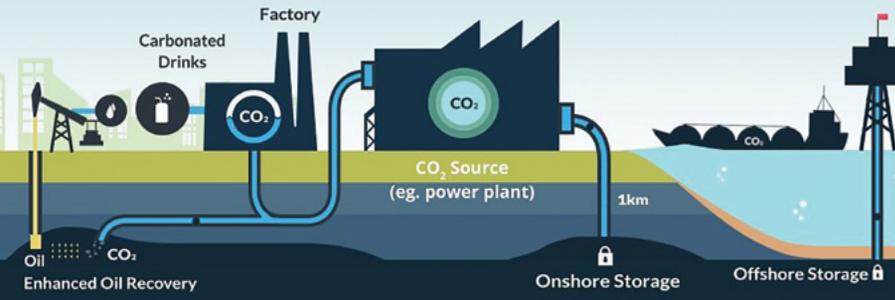
36 NEWS

Bulan K3 Nasional 2023, Ditjen Migas Gencarkan Keselamatan Migas

Ditjen Migas Adakan MWT ke Berbagai Lokasi

Inspektur Migas Terus Dalam Kebakaran Rig Bohai-85 WK Jabung

contents



6

>> SAJIAN UTAMA

Potensi CCS/CCUS Tingkatkan Produksi Migas dan Terwujudnya NZE

Teknologi penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon yang dikenal dengan *Carbon Capture, Utilization and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS)* dapat menjadi solusi peningkatan produksi migas untuk mendukung target 1 juta barel per hari minyak bumi dan 12 miliar kaki kubik per hari gas bumi tahun 2030. Selain itu, CCS/CCUS mampu mendukung pengurangan emisi menuju *Net Zero Emission (NZE)* Indonesia tahun 2060.

SPPBJ Palsu Beredar,
Masyarakat Diimbau Waspada

Kopi Senja Episode 8
Kupas Lebih Dalam ESG

Capaian Ditjen Migas Tahun 2022
dan Rencana Kerja Tahun 2023

Kementerian ESDM Resmikan
3.405 SR Jargas Tanjung
Jabung Barat

Warga Semarang Antusias
Nikmati Jargas

Diresmikan, Dua Proyek Gas
Dukung Pasokan Gas Jawa
Tengah dan Jawa Timur

Indonesia Ajak Investor Kembangkan
Migas Berteknologi Bersih dalam
India Energy Week

Dirjen Migas Lantik 30 Pejabat
Fungsional

Ditjen Migas Gelar Penghitungan
Bersama Realisasi *Lifting* Migas
Triwulan IV Tahun 2022

Ini Pemenang Lelang WK Sangkar,
Bunga, dan Peri Mahakam

Divestasi Blok Masela
Diharapkan Kelar Tahun 2023

Pemerintah Siapkan Strategi
Amankan Pasokan BBM Antisipasi
Perang Rusia-Ukraina Berkepanjangan

Ditjen Migas Investigasi Menyeluruh
Kebakaran TBBM Plumpang

Pemerintah Bangun
4.600 SR Jargas di Wajo

Indonesia-Korea Selatan Sepakat
Amandemen Kerja Sama
Anjungan di Kaltim

Indonesia Pegang Keketuaan di ASEAN
untuk Sektor Energi

Capai 68%, Pemanfaatan Gas
Domestik Dorong Gasifikasi
Kelistrikan

Pasokan Energi Selama Libur Idul
Fitri 1444H Aman dan Lancar

Pengumuman Penawaran
Wilayah Kerja Migas Tahap I
Tahun 2023

Kebijakan HGBT Dorong
Pertumbuhan Ekonomi

Kementerian ESDM
Berangkatkan 1.155 Pemudik Gratis

Perkuat Silaturahmi dan Sinergitas,
Ditjen Migas Adakan Halal Bihalal
Idul Fitri 1444 H

Pemerintah Jepang Beri Bintang
Jasa kepada Menteri ESDM

Ditjen Migas Adakan FGD
Kecelakaan Hilir Migas

Proyek Cisem Tahap I Capai 90
Persen, Siap Lanjut Tahap II

Gandeng Kemnaker, Ditjen Migas
Tekankan Pentingnya Keselamatan
Migas

Ditjen Migas Gelar Rakor
Realisasi *Lifting* Migas Triwulan I
Tahun 2023

Pemerintah Terus Berupaya
Tingkatkan Investasi Migas

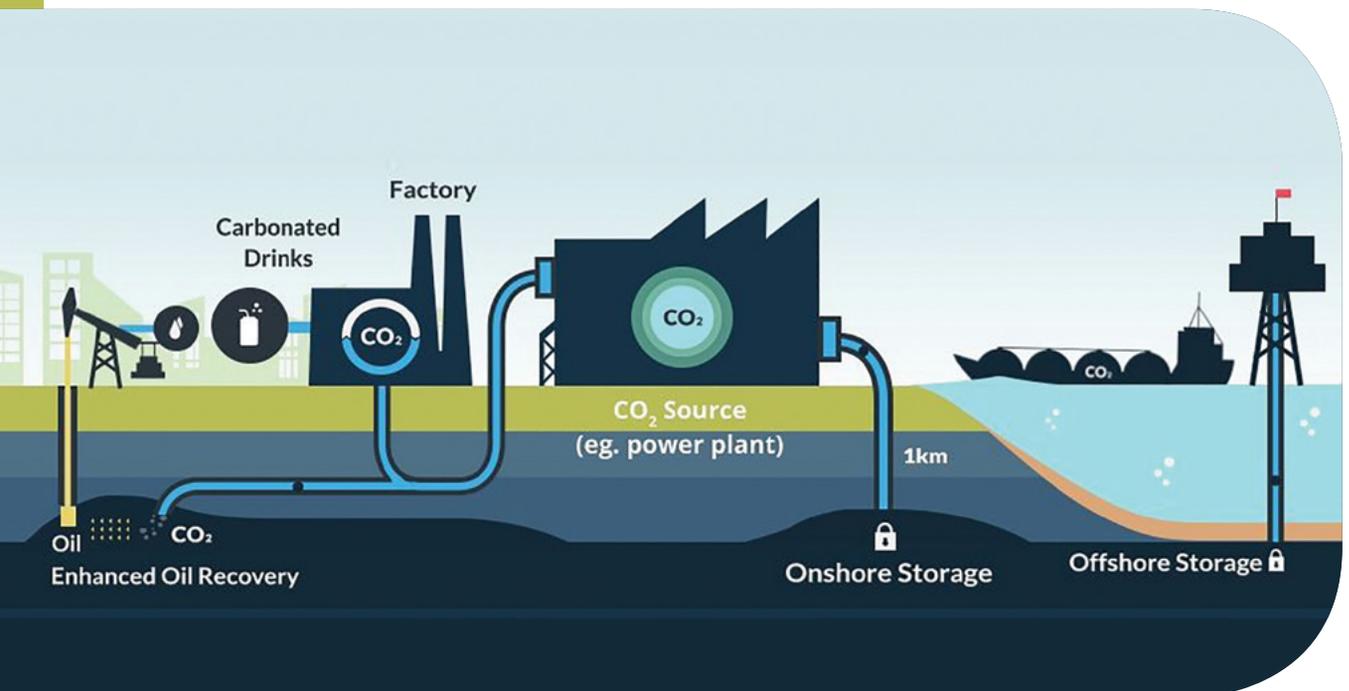
Kali Pertama, Forum Komunikasi
(Forkom) Keselamatan Sektor
ESDM Digelar

New Simplified Gross Split
Dorong Pengembangan Migas

Ditandatangani, Kontrak Bagi
Hasil Wilayah Kerja East Natuna,
Sangkar, dan Peri Mahakam
Bernilai US\$22,7 Juta

Potensi CCS/CCUS Tingkatkan Produksi Migas dan Terwujudnya NZE

Teknologi penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon yang dikenal dengan Carbon Capture, Utilization and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS) dapat menjadi solusi peningkatan produksi migas untuk mendukung target 1 juta barel per hari minyak bumi dan 12 miliar kaki kubik per hari gas bumi tahun 2030. Selain itu, CCS/CCUS mampu mendukung pengurangan emisi menuju Net Zero Emission (NZE) Indonesia tahun 2060.



Namun, penerapan CCS/CCUS tidaklah mudah. Berbagai tantangan harus dihadapi. Payung hukumnya pun harus jelas. Terpenting, penerapan CCS/CCUS harus melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, total emisi dari industri hulu dan hilir migas pada tahun 2060 diproyeksikan sebesar 1149 juta ton CO₂e. Adapun puncak emisi sekitar 44 juta ton CO₂e pada tahun 2030 karena adanya peningkatan produksi

untuk mencapai 1 juta BOPD dan 12 BSCFD. Emisi dari industri migas relatif kecil, sekitar 5% dibandingkan dengan total emisi di sektor energi pada tahun 2020.

Saat ini, terdapat 16 proyek CCS/CCUS di mana semuanya masih dalam tahap studi atau persiapan, namun sebagian besar proyek tersebut ditargetkan *onstream* sebelum tahun 2030. Tangguh CCUS di Papua Barat adalah proyek unggulan yang telah mendapat persetujuan POD.



Dari beberapa studi yang dilakukan oleh LEMIGAS, ExxonMobil maupun Rystad Energy, Indonesia memiliki potensi CO₂ storage yang besar, bahkan bisa mencapai lebih dari 400 giga ton CO₂ dari reservoir migas dan saline akuifer.

Aturan hukum CCS/CCUS

Payung hukum CCS/CCUS telah tersedia. Menteri ESDM Arifin Tasrif telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. Beleid yang diteken tanggal 2 Maret 2023 ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan sektor migas rendah emisi dan mendorong peningkatan produksi migas.

Sebagaimana tercantum dalam Permen ESDM ini, penangkapan dan penyimpanan karbon (*Carbon Capture and Storage*) yang selanjutnya disingkat CCS adalah kegiatan mengurangi emisi GRK yang mencakup penangkapan emisi karbon dan/atau pengangkutan emisi karbon tertangkap, dan penyimpanan ke Zona Target Injeksi dengan aman

dan permanen sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik.

Sedangkan penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (*Carbon Capture, Utilization and Storage*) yang selanjutnya disingkat CCUS adalah kegiatan mengurangi emisi GRK yang mencakup penangkapan emisi karbon dan/atau pengangkutan emisi karbon tertangkap, pemanfaatan emisi karbon tertangkap, dan penyimpanan ke Zona Target Injeksi dengan aman dan permanen sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik.

“CCS/CCUS merupakan hal baru bagi Indonesia sehingga penyusunan regulasinya dilakukan mulai dari perancangan hingga tahap implementasi,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji pada konferensi pers Capaian Ditjen Migas Tahun 2022, Senin (30/1/2023).

Pertimbangan dalam penyusunan aturan ini adalah Indonesia memiliki formasi geologis yang dapat digunakan untuk menyimpan emisi karbon secara permanen melalui penggunaan teknologi dalam kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon serta kegiatan penangkapan,

pemanfaatan dan penyimpanan karbon (CCS/CCUS).

Hal ini dapat mendukung upaya pencapaian tujuan Persejuaan Paris atas Konvensi Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*) menuju arah pembangunan rendah emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim pada tahun 2050.

Pertimbangan lain dalam aturan yang terdiri dari 11 bab dan 61 pasal tersebut adalah pelaksanaan kegiatan CCS/CCUS juga bermanfaat untuk mendorong peningkatan produksi migas.

Penetapan Permen CCS/CCUS ini juga merupakan langkah awal untuk memudahkan Indonesia mencapai target NZE tahun 2060 atau lebih cepat.

Ada empat fokus yang diatur dalam Permen ini, yaitu Aspek Teknis, Skenario Bisnis, Aspek Legal dan Aspek Ekonomi. Aspek Teknis memuat dua hal penting. Pertama ialah *capture, transport, injection, storage* sampai dengan *monitoring measurement, reporting* dan *verification*. Kedua, menggunakan

standar dan kaidah keteknikan yang baik berdasarkan karakteristik masing-masing lokasi.

Mengenai Skenario Bisnis, dinyatakan dilakukan berdasarkan kontrak kerja sama pada wilayah kerja migas. Selain itu, sumber CO₂ tidak hanya dari migas, tapi juga bisa dari industri lain (khusus CCUS) melalui mekanisme *b-to-b* dengan Kontraktor Wilayah Kerja Migas.

Aspek Legal mencakup usulan kegiatan CCS/CCUS oleh KKKS menjadi bagian dari *Plan of Development* (PoD). Selain itu, kegiatan monitoring dilakukan sampai dengan 10 tahun setelah penyelesaian penutupan kegiatan CCS/CCUS. Diatur pula mengenai pengalihan tanggung jawab ke Pemerintah dan sebagainya.

Terakhir, Aspek Ekonomi mengatur tentang pendanaan pihak lain, potensi monetisasi karbon kredit berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Lalu, perlakuan potensi hasil monetisasi penyelenggaraan CCS/CCUS.

Setelah Permen ini ditetapkan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) mengadakan sosialisasi aturan tersebut kepada KKKS dan perwakilan industri lainnya. Salah satu sosialisasi ini berlangsung pada Rabu (12/4/2023) secara virtual.

“Diharapkan industri migas dapat berkontribusi nyata untuk mencapai target NZE dengan pelaksanaan CCS/CCUS ini. Mudah-mudahan, pelaksanaan Permen ini dapat segera kita rasakan manfaatnya. Kami juga melakukan evaluasi

apa yang perlu diperbaiki ke depan. Ditjen Migas dan SKK Migas akan membantu apa yang diperlukan agar hal ini dapat terlaksana dengan baik,” ungkap Tutuka yang menghadiri sosialisasi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Mirza Mahendra menambahkan, sebagai tindak lanjut penetapan Permen CCS/CCUS, pihaknya tengah menyusun regulasi yang lebih terperinci.

“Kita sedang menyusun regulasi terkait Permen ini. Namun perlu dipahami, kewenangannya bukan hanya di Kementerian ESDM, tetapi juga melibatkan Kementerian atau instansi lainnya sehingga diperlukan dukungan dari berbagai pihak,” kata Mirza.

Tantangan CCS/CCUS

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Raam Krisna menyampaikan bahwa teknologi CCS/CCUS sebenarnya bukan hal yang baru. Teknologi menginjeksikan CO₂ ke sumur migas diyakini akan meningkatkan produksi migas. Apalagi geologi Indonesia juga mendukung penerapan teknologi tersebut.

“Geologi Indonesia cukup unik dengan banyaknya lapangan-lapangan kita yang memang secara jebakan geologi, secara alami bisa menahan CO₂ yang diinjeksikan nantinya,” katanya.

Hasil penggunaan CCS/CCUS untuk meningkatkan produksi, menurut Raam, tidak bisa terlihat hasilnya pada tahun ini, melainkan tahun-tahun mendatang. IATMI berharap dengan peningkatan produksi minyak dari penggunaan teknologi ini dapat mengurangi tekanan impor minyak.

Penerapan teknologi CCS/CCUS menghadapi sejumlah tantangan antara lain biaya yang cukup tinggi, terutama untuk CO₂ Capture. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk mendorong keekonomian proyek.

Mirza Mahendra pada acara *Lunch and Talk IATMI 2023* di Kantor LEMIGAS, Kamis (2/2/2023), mengatakan, faktor biaya yang tinggi menjadi salah satu tantangan penerapan teknologi CCS/CCUS saat ini.

Pada beberapa studi, seperti oleh Global CCS Institute tahun 2021 memang menunjukkan tren penurunan biaya *capture* CO₂ pada proyek-proyek CCS skala besar. Namun demikian, tetap diperlukan upaya-upaya untuk terus mendorong keekonomian proyek CCS/CCUS, seperti pengembangan teknologi yang lebih murah, kerja sama untuk *cost sharing*, dan insentif.

“Upaya lainnya adalah pengembangan CCS/CCUS Hub yang menghubungkan berbagai sumber CO₂ ke berbagai lokasi injeksi, dan tentu saja mendorong penerapan nilai ekonomi karbon termasuk *carbon offset*,” paparnya.

Kementerian ESDM dan *stakeholder* terkait telah memproyeksikan emisi GRK subsektor migas, di mana proyeksi emisi dari kegiatan usaha migas akan mencapai puncak pada 2030 dengan nilai sekitar 44 juta ton CO₂. Sementara berdasarkan data KLHK, kontribusi Emisi GRK subsektor migas pada tahun 2020 sekitar 5,06% terhadap total emisi GRK sektor energi.

“Tentu kami memahami bahwa potensi CO₂ dari industri lain dan CCS pada akuifer di luar WK jauh lebih besar dari industri hulu migas sehingga sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka mendukung target NZE. Namun

memang untuk tahap awal kita akan fokuskan terlebih dahulu di hulu migas melalui rancangan Permen yang telah disusun, sekaligus untuk meyakinkan para stakeholder lain terkait teknologi CCS/CCUS ini,” kata Mirza.

Pentingnya sinergi

Sinergi para pemangku kepentingan, baik internal atau eksternal Kementerian ESDM, penting untuk menunjang keberhasilan penerapan CCS/CCUS. Peran Inspektur Migas dalam kegiatan CCS/CCUS, misalnya, tercantum dalam Bab IX.

Inspektur Migas melaksanakan:

- Pemeriksaan keselamatan terhadap peralatan, instalasi, dan fasilitas CCS atau CCUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengawasan terhadap kegiatan Monitoring CCS atau CCUS secara berkala setiap satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Inspektur Migas menyampaikan laporan hasil pemeriksaan keselamatan dan laporan hasil pengawasan kegiatan Monitoring CCS atau CCUS kepada Kepala Inspeksi.
- Laporan hasil pemeriksaan keselamatan dan laporan hasil pengawasan terhadap kegiatan Monitoring CCS atau CCUS, dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sinergi dengan eksternal Kementerian ESDM bisa dilihat saat Ditjen Migas bekerja sama dengan *Department of Climate Change, Energy, The Environment Water (DCCEEW)* mengadakan Energy Dialogue “*CCUS Work Stream Meeting 1-Policy/Regulatory*

Knowledge Exchange” di Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Acara ini merupakan tindak lanjut penandatanganan *Letter of Intent (LOI)* antara Kementerian ESDM dengan dengan Department of Climate Change, Energy, The Environment Water (DCCEEW) Australia tentang *The Establishment of Energy Dialogue* pada 1 September 2022. Pada acara itu, kedua negara telah menyusun program kerja sama energi dalam beberapa *workstream*. Program kerja sama itu antara lain, *CCUS workstream* dan *energy and infrastructure resources workstream* dengan lingkup kegiatan *sharing knowledge, network and policy workshop*, termasuk kegiatan *site visit*.

Energy Dialogue “CCUS Work Stream Meeting 1-Policy/Regulatory Knowledge Exchange” dibuka oleh Direktur Pembinaan Program Migas Mustafid Gunawan. Disampaikan, setelah melakukan Dialog Australia-Indonesia pada tahun 2022, kedua negara berkoordinasi melaksanakan kegiatan pertama dalam *Workstream CCUS* terkait upaya Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, salah satunya dari sektor energi melalui pengembangan dan pemanfaatan CCS/CCUS.

“Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pengembangan CCS/CCUS membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak terkait dan pemangku kepentingan, termasuk dari sisi

teknik, keselamatan, keekonomian dan penyusunan regulasi,” katanya.

Kolaborasi dengan Australia ditujukan untuk berbagi informasi tentang kebijakan dan tantangan untuk menerapkan CCS/CCUS. Indonesia juga ingin mengetahui mekanisme regulasi baik perizinan maupun teknik implementasi terkait di Australia.

“Melalui *workshop* ini, saya berharap Pemerintah Indonesia mendapatkan informasi mengenai perkembangan teknologi serta pengalaman teknis terkait CCS/CCUS yang dilakukan di Australia, sebagai masukan masukan dan wawasan baru tentang bagaimana mengelola kebijakan untuk mendukung pengembangan CCS/CCUS di Indonesia,” tambahnya.

Materi yang dibahas dalam pertemuan ini adalah *CCUS Policies, Australia’s Greenhouse Gas Acreage Release and Precompetitive Geoscience*, serta *Regulatory Mechanisms, Reforms and other Legislative Jurisdictions*.

Indonesia berharap dapat berkolaborasi dengan Australia yang memiliki banyak pengalaman dan keahlian dalam pengembangan teknologi CCS/CCUS. Misalnya, pengembangan proyek, peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan terkait aspek teknis, model bisnis, serta kerangka kebijakan dan peraturan. ●



Pemerintah Dukung Penuh Pembangunan Proyek Pipa Cirebon-Semarang (Cisem)

Sempat mangkrak lebih dari satu dasawarsa, proyek Pipa Cirebon-Semarang (Cisem) kini terlaksana. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, menegaskan dukungannya terhadap pembangunan pipa transmisi gas bumi yang nantinya terintegrasi dengan pipa transmisi Gresik-Semarang ini.

Saat ini, tengah dibangun Cisem Tahap I ruas Semarang-Batang. Pembangunan pipa transmisi gas bumi Cisem Tahap I ruas Semarang-Batang merupakan proyek *multiyears* dari Kementerian ESDM. Jalur pipa gas 20 inci sepanjang ± 60 km ini telah mulai dibangun pada Mei 2022 dan direncanakan rampung Agustus tahun 2023.

“Kementerian ESDM berusaha mendukung sepenuhnya pembangunan Cisem Tahap I ini selesai tepat waktunya. Kami sudah mengidentifikasi sumber-sumber gas yang produksinya bisa dialirkan lewat pipa ini untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji dalam kunjungan kerja bersama Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Akhmad Syahroza ke lokasi Proyek Cisem Tahap I dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah, Kamis (2/3/2023).

Telah mencapai 80,28%

Pembangunan pipa transmisi gas bumi Cisem merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan meningkatkan akses gas bumi bagi seluruh masyarakat maupun industri. Pipa transmisi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas gas bumi yang sebagian

besar berasal dari lapangan gas di Jawa Timur dapat sampai ke wilayah Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan industri yang sedang berkembang.

Untuk ruas Semarang-Batang, hingga 1 Maret 2023, pembangunannya telah mencapai 80,28% dari rencana 79,12%. Proyek pipa gas bumi Rp1,17 triliun tersebut diharapkan memperkuat rantai suplai pasokan gas bumi dan dapat diakses masyarakat secara berkelanjutan

Fasilitas itu membentang ke jalan nasional di utara Kota Semarang

hingga pintu tol Krapyak dan melalui Tol Batang-Semarang menuju Stasiun ESDM Batang.

Untuk jangka panjang, Pemerintah juga telah menyiapkan usulan untuk pembangunan Cisem Tahap II ruas Batang-Cirebon sehingga nantinya infrastruktur gas bumi dari Sumatera dapat tersambung hingga Jawa Timur.

Tutuka mengatakan, ada perubahan jalur pipa gas Cisem tahap II yang awalnya hanya sampai Cirebon menjadi ke Kandang Haur Timur (KHT), Indramayu. Pasalnya berdasarkan survei, jalur itu melewati pemukiman warga yang padat sehingga tidak memungkinkan.

“Jalur (sebelumnya) yang dilalui sudah sangat padat dan berdasarkan hasil survei diketahui jalur pipa tersebut banyak yang berada di bawah rumah



warga sehingga tidak memungkinkan untuk penambahan kapasitas,” katanya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (4/4/2023).

Tutuka menuturkan, proyek pembangunan pipa transmisi Cisem juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dan masyarakat umumnya. Agar pelaksanaan berjalan lancar, Pemerintah mengharapkan agar pelaksana di lapangan tak ragu menyampaikan kendala yang dihadapinya.

“Kunjungan kerja kami ini untuk memastikan proyek berjalan dengan baik dan tepat waktu. Kalau ada yang perlu dibantu oleh Pemerintah, sebaiknya segera disampaikan agar bisa ditindaklanjuti. Kita ini satu tim, bekerja dengan tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan nasional. Pipa Cisem tidak hanya diperlukan oleh industri dan masyarakat, tetapi juga jaringan gas rumah tangga (jargas),” tambah Tutuka.

Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Akhmad Syahroza menyampaikan bahwa Kementerian

ESDM mendapat amanah untuk membangun infrastruktur ini dan agar pemanfaatannya optimal, pembangunannya harus terintegrasi dari hulu ke hilir.

Dia melanjutkan, industri di kawasan Kendal dan Batang sebagai salah satu pengguna gas yang dialirkan melalui pipa Cisem ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah atau meningkatkan daya saing, menumbuhkan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya meningkatkan iklim investasi.

Syahroza juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara pelbagai pihak yang terkait dalam pembangunan proyek pipa ini. Selain itu juga harus ada laporan mingguan ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) terkait perkembangan proyek.

Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Bappenas Nizhar Marizi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ESDM atas pembangunan infrastruktur ini. Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional.

“Kunjungan kali ini juga akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Bappenas terkait usulan pembangunan pipa transmisi gas bumi Cisem Tahap II ruas Batang-Cirebon,” kata Nizhar saat kunjungan kerja ke Proyek Cisem, Rabu (24/2/2023).

Pada kesempatan sama, Direktur PT Kawasan Industri Kendal Didik Purbadi menyampaikan bahwa ketersediaan gas bumi merupakan salah satu daya tarik investor untuk membangun dan mengembangkan industrinya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal.

Menurutnya, akan lebih banyak investor yang berinvestasi di kawasan tersebut. Hingga Februari 2023, terdapat 87 perusahaan dari 10 negara yang berlokasi di KEK Kendal, dengan total investasi Rp37 triliun dan menciptakan tenaga kerja 25 ribu orang.

Untuk saat ini, kebutuhan gas di wilayah industri tersebut masih menggunakan gas CNG yang disediakan oleh PT Pertamina Gas Negara dengan kapasitas 0,3 mmscfd dan akan meningkat hingga 4,48 mmscfd di akhir tahun 2023.

Dengan terbangunnya pipa Cisem Tahap I ini, diproyeksikan ada tahun 2025 terdapat 26 industri yang akan menggunakan gas bumi pada kawasan tersebut dengan kebutuhan mencapai \pm 40 mmscfd.

Jaga Integritas

Dirjen Migas meminta agar pekerjaan Cisem dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, dan tetap menjaga integritas.

“Kami ingin memastikan proyek ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kalau ada hal-hal yang perlu dibantu, sampaikan dari



sekarang dan nanti kita akan coba selesaikan. Tetap jaga integritas, jangan coba-coba karena tidak ada toleransi bagi saya,” tegasnya.

Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, membangun pipa transmisi Cisem untuk meningkatkan ketahanan energi. Jika pekerjaan ini dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh integritas, Tutuka meyakini proyek ini dapat tuntas sesuai rencana.

Tutuka juga mengingatkan pentingnya hilirisasi energi, termasuk gas bumi, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya oleh Presiden RI dan Menteri ESDM.

“Pak Presiden menyampaikan bahwa hilirisasi itu sangat penting. Itu jadi pegangan kita semua dan diperlukan dukungan infrastruktur agar terjadi hilirisasi dari sumber gas ke konsumen yang menggunakan. Diharapkan, pipa gas ini bermanfaat sebesar-besarnya

bagi industri dan masyarakat umumnya,” ujar Dirjen Migas.

Bagian transisi energi

Pada kesempatan berbeda, Tutuka menyampaikan, gas bumi menjadi energi transisi dari energi fosil menuju energi bersih sebab ketersediaannya cukup banyak dan lebih ramah lingkungan dibandingkan minyak bumi.

Selain itu, dari sisi ekonomi, cadangan gas yang lebih besar akan lebih menguntungkan karena dapat dilakukan perencanaan secara jangka panjang, transparan dan dapat diandalkan.

Oleh karenanya, pemerintah, kata Tutuka, terus berkomitmen mengoptimalkan gas bumi sebagai energi transisi dengan melakukan beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut antara lain program gasifikasi pembangkit listrik, mendukung pembangunan

KEK, jaringan gas kota, serta pembangunan kilang minyak baru (GRR) dan peningkatan kapasitas kilang minyak (RDMP).

“Langkah lainnya adalah pembangunan pipa transmisi gas, jaringan distribusi gas, pembangunan *smelter*, pembangunan LNG skala kecil, LNG *bunkering*, optimalisasi SPBG yang ada, serta pengembangan hidrogen,” lanjut Tutuka.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Perencanaan dan pembangunan Infrastruktur Migas Laode Sulaeman. Menurutnya, Indonesia saat ini telah menuju transformasi Net Zero Emission (NZE) sehingga pada bauran energi nasional, porsi batubara akan diturunkan.

Namun, tidak dapat langsung digantikan oleh tenaga surya atau sumber EBT lainnya melainkan dengan gas bumi. Gas bumi akan menjadi energi yang sangat berperan penting di masa transisi ini. ●



Mendorong Peningkatan Produksi Migas Nasional

Pemerintah terus bekerja mencari peluang untuk mendorong produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional. Tujuannya adalah tercapainya target 1 juta barel minyak per hari (bph) dan gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) pada tahun 2030.

Kebutuhan meningkatkan produksi migas makin krusial mengingat kondisi geopolitik global yang sangat dinamis. Salah satunya perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan ancaman krisis energi, pangan, dan ekonomi.

Strategi jangka pendek dan panjang Pemerintah telah menyiapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan produksi migas nasional.

“Pemerintah telah menyiapkan upaya-upaya strategis untuk peningkatan produksi migas, baik jangka pendek maupun jangka panjang,” ungkap Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers Capaian Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2022 di Ruang Sarulla Kementerian ESDM, Senin (30/1/2023).

Strategi jangka pendek untuk meningkatkan produksi minyak yang akan dilakukan Pemerintah adalah optimasi Lapangan Banyu Urip melalui pengeboran lima sumur infill carbonate dan dua sumur clastic. Target *first oil* tahun 2028 dengan perkiraan tambahan cadangan sebesar 125 mmbo.

Selain itu, di Wilayah Kerja (WK) Rokan dengan melakukan *drilling* secara massif serta ekspansi *water flood* dan *steam flood*.

“Sekarang Rokan sudah berhasil ditingkatkan produksinya. Sebelum

serah terima ke Pertamina, produksinya di bawah 165.000 barel per hari. Sekarang sudah di atas 165.000 barel per hari dan kita berharap dalam waktu satu-dua tahun jadi 200.000 barel per hari dan lima tahun mendatang menjadi 300.000 barel per hari,” papar Menteri ESDM.

Sedangkan strategi panjang untuk peningkatan produksi minyak, Pemerintah akan meningkatkan eksplorasi di Area Seram. Terdapat potensi oil in place yaitu minyak 7,596 mmbo dan gas 13,69 tcf.

Selain itu, eksplorasi Area Warim di mana terdapat potensi minyak 25,968 mmbo dan gas bumi 47,37 tcf. Namun terdapat tantangan dalam pengembangan area Warim, yaitu tumpang tindih dengan Taman Nasional Lorentz. Untuk itu, Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Kementerian KLHK.

“Warim sangat besar potensinya, tapi masuk dalam wilayah hutan nasional Lorentz. Padahal, tetangganya, yaitu Papua Nugini, sudah menghasilkan gas dan ada fasilitas LNG-nya. Jadi kita akan mencobanya (eksplorasi) karena kita tahu kalau tidak mengoptimalkan sumber alam, kita pasti akan kehilangan devisa untuk impor. Ini tentu saja harus kita antisipasi. Kita sudah mengupayakan untuk berbicara dengan KLHK, tapi



perlu juga penetapan dari Unesco. Kita harapkan ada solusi yang baik bagaimana kita memanfaatkannya,” jelas Menteri ESDM.

Potensi eksplorasi migas di Warim yang besar juga diakui oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tutuka Ariadji. Bahkan, diperkirakan potensi kandungan migas di Warim melebihi Blok Masela di Maluku.

“Cekungan yang besar itu di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, Ada WK (wilayah kerja) yang cukup besar, namanya Warim. Itu yang kita fokuskan ya. Warim itu ada minyak dan ada gas. Itu gede sekali,” ungkapnya di Kementerian ESDM, Kamis (5/1/2023).

Dirjen Migas memperkirakan potensi sumber daya Warim cukup besar, bahkan melebihi Blok Masela.

“Ukurannya *giant*-lah. Potensi sumber dayanya lebih gede dari Masela,” kata dia.

Strategi lain adalah pengembangan MNK di WK Rokan. Terdapat 14 area berpotensi MNK di seluruh Indonesia dengan target tahun 2030 sebesar 75.000 bopd.

Untuk pengembangan gas, strategi jangka pendek yang akan dilakukan adalah mendorong produksi Tangguh Train 3 di mana produksi gas 700 mmscfd, kondensat 3.000 bcpd dan diperkirakan onstream kuartal 1 tahun 2023.

Selanjutnya, WK Genting dengan cadangan 1,35 bscf, produksi 197 mmscfd dan estimasi onstream tahun 2023. WK Sakakemang dengan cadangan 527 bscf, rencana produksi gas 85 mmscfd, kondensat 34,8 mmstb serta estimasi onstream 2025. Terakhir, IDD di mana estimasi puncak produksi gas 844 mmscfd, minyak 27.000 bopd,



dan estimasi onstream kuartal 4 tahun 2025.

Sementara untuk jangka pangjang, Pemerintah mengharapkan produksi dari Blok Masela dengan estimasi puncak produksi LNG 9,5 mtpa (1.600 mmscfd), gas pipa 150 mmscfd, kondensat: 35.000 bcpd dengan estimasi onstream kuartal 2 tahun 2029.

“Masela kemungkinan ada keterlambatan dua tahun yang tadinya onstream tahun 2027. Kita dorong supaya tidak ada lagi pergeseran jadwal,” kata Arifin.

Kemudian WK Andaman I, II, III dan South Andaman dengan sumber daya 4.256 mmoeb dan rencana produksi 1.200 mmscfd. Telah dilakukan pemboran satu sumur di Andaman II dengan perkiraan sumber daya 8 tcf. Perkiraan onstream: 2028–2030.

“Ada indikasi potensinya cukup baik dan cukup besar. Tapi memang ada juga isu yang harus dilakukan pendalaman-pendalaman lebih

lanjut karena secara teknis, struktur batuannya membutuhkan *treatment* khusus,” jelas Menteri ESDM.

Terakhir, WK Agung I dan II di mana cadangan gas 5 tcf dan estimasi onstream 2033. Eksplorasi akan mulai dilakukan tahun 2023.

Terbuka terhadap berbagai masukan Pemerintah juga membuka pintu lebar-lebar terhadap masukan dari pelbagai pihak terkait, termasuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), demi terwujudnya peningkatan produksi migas dan pengelolaan migas yang lebih baik.

Tutuka Ariadji menyampaikan hal tersebut dalam pertemuannya dengan 13 KKKS Wilayah Sumbagsel di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (19/1/2023). Pertemuan ini merupakan rangkaian Management Walkthrough (MWT) Dirjen Migas ke Sumatera Selatan.

“Kami telah mendengarkan keluhan dan masukan perwakilan 13 KKKS di Sumbagsel, serta mengetahui apa

yang harus diperbaiki. Kami terbuka dengan masukan-masukan tersebut dan akan melakukan apa yang menjadi pekerjaan kami,” kata Dirjen Migas.

Dalam upaya memperbaiki dan menindaklanjuti masukan-masukan tersebut, Dirjen Migas meminta agar KKKS juga bekerja sama dengan menyiapkan data yang diperlukan.

“Kalau kami minta data, tolong disampaikan karena kami perlu data untuk bertemu kementerian yang lain dan menyusun kebijakan yang tepat,” tambahnya.

Dirjen Migas berharap dengan perbaikan kebijakan ini, dapat tercipta iklim investasi migas yang lebih kondusif. Dia mencontohkan, untuk meningkatkan iklim investasi migas, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM tentang Gas Suar, serta pengelolaan Migas Konvensional dan Non Konvensional.

Sejumlah masukan yang diajukan KKKS dalam pertemuan ini antara lain dukungan atas percepatan perizinan AMDAL/UKL-UPL, termasuk izin pakai wilayah hutan (industri dan/atau lindung) untuk kegiatan tambahan/baru.

Masukan lainnya adalah pemberian insentif; dukungan atas pengadaan lahan, khususnya pada lahan/areal dari perkebunan kelapa sawit; dan penjelasan terkait isu *toll fee* yang tinggi untuk beberapa ruas pipa.

Pada kesempatan berbeda, Tutuka menyatakan, Pemerintah membantu mempermudah perizinan dalam kegiatan operasi migas, terutama terkait Amdal dan pengeboran yang memerlukan koordinasi dengan instansi lainnya.

Tak hanya itu, Pemerintah pun mendorong dilakukannya Enhanced

Oil Recovery (EOR) di bidang injeksi CO₂ karena potensinya yang cukup bagus.

“Potensi injeksi CO₂ cukup besar dan bisa menjadi terobosan bagi Pertamina terutama dan Indonesia. Kalau itu bisa dilakukan, akan luar biasa hasil migasnya,” kata Tutuka saat melakukan Management Walkthrough (MWT) ke Pertamina EP Asset 3 di Cirebon, Jawa Barat, Senin (16/1/2023).

Kerja sama terus dilakukan Satu hal yang pasti, kerja sama eksplorasi terus dilakukan. Salah satunya terlihat pada Penandatanganan Kerja Sama Kegiatan Eksplorasi di Area Terbuka Indonesia antara SKK Migas dan Konsorsium yang dipimpin ExxonMobil di Wisma Mulia, Jakarta, Jumat (31/3/2023). Program eksplorasi ini senilai Rp630 miliar dan merupakan pengalihan dari Komitmen Kerja Pasti (KKP) Wilayah Kerja (WK) Gunting dan WK Surumana.

Kerja sama eksplorasi di area terbuka baru pertama kalinya dilakukan di Indonesia. Menteri ESDM mendukung dan mengharapkan kerja sama eksplorasi serupa dapat terus dilakukan di area terbuka lainnya, mengingat masih tersedianya dana KKP dan terbuka luasnya potensi migas Indonesia.

“Saya berharap langkah pertama ini bisa diikuti oleh langkah-langkah selanjutnya, mengingat masih tersedianya dana KKP dan masih terbuka luasnya wilayah potensi hulu migas di tanah air kita,” ujar Menteri ESDM.

Melalui kerja sama eksplorasi ini diharapkan dapat diperoleh penambahan data migas dan mendukung penyiapan wilayah kerja migas serta meningkatkan investasi. Dengan adanya penambahan

cadangan migas, menurut Menteri Arifin, membuka peluang eksploitasi untuk meningkatkan produksi migas dalam mendukung pemenuhan target produksi 1 juta bopd dan 12 bscfd pada tahun 2030.

“Kegiatan ini sangat positif karena kalau kita menunggu data per wilayah, eksplorasi lagi, waktunya sangat panjang. Ini ada perusahaan yang memang punya reputasi baik dalam bidangnya dan memiliki dana, kita manfaatkan. Paling tidak, cita-cita produksi minyak satu juta barel itu bukan hanya cita-cita saja, tapi ada upaya-upayanya,” katanya.

Pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung pengembangan kegiatan hulu migas di dalam negeri, dengan terus melakukan pengembangan dalam sistem pengelolaan hulu migas sehingga dapat meningkatkan keyakinan investor dalam melakukan investasi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri ESDM juga menyampaikan apresiasinya kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), SKK Migas, ExxonMobil, Petronas serta pihak-pihak terkait lainnya atas upaya dan kerja kerasnya sehingga kerja sama eksplorasi di area terbuka dapat terwujud.

Selain itu, Pemerintah juga konsisten mengundang Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang bergerak pada industri hulu migas untuk berpartisipasi pada lelang wilayah kerja migas. Pada Lelang Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2023, misalnya, memperpanjang batas waktu pemasukan Dokumen Partisipasi untuk lelang tiga WK. Ketiga WK itu adalah WK Akia, WK Beluga, dan WK Bengara I. ●



Transformasi Subsidi LPG 3 Kg Agar Lebih Tepat Sasaran

Pemerintah berencana melakukan transformasi sistem subsidi LPG 3 kilogram (kg). Selama ini, subsidi LPG 3 kg masih berbasis komoditas. Nantinya, akan menjadi berbasis orang/penerima manfaat. Transformasi ini berpotensi menjadikan subsidi LPG 3 kg lebih tepat sasaran.

Subsidi yang tepat sasaran akan sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin ataupun masyarakat yang rentan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, porsi subsidi LPG 3 kg yang besar juga bisa mengurangi beban APBN.

Pelaksanaan sistem baru subsidi LPG 3 kg akan dilakukan secara bertahap. Pertimbangannya adalah kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji mengatakan, Pemerintah akan

menguji coba pembatasan pembelian LPG 3 kg secara nasional mulai tahun ini. Ia menegaskan, pembelian LPG 3 kg hanya diperketat lewat sistem registrasi untuk memilah mana konsumen yang berhak.

Pendataan konsumen LPG 3 kg “Yang kita sampaikan bahwa kita melakukan registrasi, tidak ada kata pembatasan, registrasi,” ujar Tutuka di Komisi VII DPR RI, Selasa (14/2/2023).

Pemerintah saat ini tengah memverifikasi pembatasan pembelian gas tabung melon. Sehingga nantinya

pembeli perlu registrasi untuk bisa mendapatkan LPG 3 kg.

“Memang, registrasi itu perlu kita lakukan dalam rangka siapa yang diberikan LPG subsidi, LPG 3 kg itu yang teregistrasi. Tahun ini itu saja registrasi,” kata Tutuka.

Registrasi dan pendataan konsumen ini telah dimulai sejak tanggal 1 Maret 2023 sebagai bagian dari Program Pendistribusian LPG 3 Kg Tepat Sasaran. Program ini akan berlangsung hingga akhir tahun. Pemerintah mengharapkan

dukungan dan peran aktif semua pihak, termasuk penyalur (agen), subpenyalur (pangkalan), dan masyarakat pengguna agar program tersebut berjalan lancar.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Maompang Harahap menyampaikan, pendataan konsumen pengguna LPG 3 kg ini merupakan tindak lanjut atas Nota Keuangan Tahun 2023. Nota Keuangan Tahun 2023 tersebut menyatakan, komitmen Pemerintah melakukan langkah-langkah transformasi subsidi LPG 3 kg menjadi berbasis target penerima atau *by name by address* dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial secara bertahap.

“Registrasi atau pendataan ini merupakan langkah awal yang sangat penting karena tidak mungkin kita melakukan transformasi tanpa dukungan data. Transformasi tanpa dukungan data akan membuat program tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu, kami mengharapkan dukungan semua pihak agar kegiatan berjalan sesuai target kita bersama,” ujarnya dalam Sosialisasi Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu (LPG Tabung 3 Kg) Tepat Sasaran di Sub Penyalur (Pangkalan) yang digelar secara hybrid, Selasa (4/4/2023).

Lebih lanjut Maompang meminta agar para agen, sub penyalur atau pangkalan, sales manager dan pihak terkait lainnya yang menjadi ujung tombak pendataan ini, dapat menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak.

Hasil pendataan ini, lanjut Maompang, akan menjadi penentu kebijakan Pemerintah lebih lanjut.

“Kita akan melakukan evaluasi secara berkala sehingga nanti dapat diperoleh pola pembelian LPG di masing-masing pangkalan, kelurahan, kecamatan, provinsi hingga nasional. Kita akan memiliki data basis untuk

menentukan langkah-langkah kebijakan lebih lanjut,” katanya.

Tak Ada Pembatasan

Dalam sosialisasi tersebut, Maompang kembali menegaskan bahwa tidak ada pembatasan dalam pembelian LPG 3 kg. Para pembeli di pangkalan hanya perlu menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) sebagai dasar registrasi. Saat pembelian selanjutnya, cukup dengan membawa KTP miliknya yang telah terdata dalam sistem.

Hal ini sesuai amanat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/MG.01/ MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran dan merujuk Keputusan Dirjen Migas No. 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.

“Sesuai ketentuan dalam aturan tersebut, untuk tahun 2023 hanya akan dilakukan pendataan atau pencocokan data konsumen pengguna LPG tabung 3 kg dan kemudian mulai 1 Januari 2024 hanya yang telah terdata yang boleh membeli LPG tabung 3 kg,” ungkap Maompang dalam sosialisasi distribusi LPG 3 Kg Tepat Sasaran Tahap I kepada Penyalur (Agen) dan Sub Penyalur (Pangkalan) perwakilan 15 Kabupaten/Kota di Indonesia secara hybrid, Senin (6/3/2023).

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Subsidi Bahan Bakar Migas Christina Meiwati Sinaga menyampaikan bahwa per 1 Maret 2023, proses pendataan mulai dilaksanakan di 15 kabupaten/kota di lima provinsi.

Kelima belas wilayah itu adalah Kota Tangerang dan Kota Cilegon di Provinsi Banten; Kota Banjar, Kota

Cirebon, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Purwakarta (Jawa Barat); Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Salatiga (Jawa Tengah); Kota Mojokerto, Kota Blitar, dan Kota Pasuruan (Jawa Timur); dan Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali.

Selanjutnya, secara bertahap dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota yang telah terkonversi minyak tanah ke LPG 3 kg. Sebelum pemberlakuan pendataan ini, Pemerintah telah melakukan uji coba di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Cipondoh (Kota Tangerang), Kecamatan Ciputat (Kota Tangsel), Kecamatan Ngalian (Kota Semarang), Kecamatan Batu Ampar (Kota Batam), dan Kecamatan Mataram (Kota Mataram).

“Untuk saat ini tetap berlaku kebijakan sejak 1 Maret 2023 minimal 80% penjualan ke pengguna akhir (artinya maksimal 20% ke pengecer). Apabila saat konsumen beli LPG 3 kg ke pangkalan belum membawa KTP, maka pembelian LPG 3 kg masih boleh dilayani dan dimintakan agar membawa KTP saat pembelian berikutnya,” jelas Christina.

Pentingnya sosialisasi

Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), dan *stakeholder* lainnya, akan terus meningkatkan sosialisasi serta *monitoring* dan evaluasi (monev) Program Pendistribusian LPG 3 Kg Tepat Sasaran kepada agen, pangkalan, serta masyarakat luas agar kegiatan ini berjalan lancar.

Monev merupakan proses pemantauan program atau kegiatan mulai dari awal hingga akhir, serta melakukan evaluasi terhadap hasil dan dinamika program tersebut, baik positif maupun negatif.

“Dari hasil *monitoring* dan evaluasi (monev) di lapangan dan berdasarkan masukan dari pelbagai pihak, perlu

dilakukan peningkatan sosialisasi program ini. Masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tujuan kegiatan tersebut, ada pula pangkalan yang mengalami kendala ketika melakukan *input* data secara digital,” ungkap Christina di sela-sela kegiatan monev LPG 3 kg di Kota Cirebon, Rabu (17/5/2023).

Christina menuturkan, sesuai hasil monev ke delapan pangkalan di Kota Cirebon serta wilayah lainnya yang dilakukan Tim Ditjen Migas, secara umum kegiatan registrasi konsumen LPG 3 kg dengan menggunakan aplikasi telah berjalan. Namun demikian, sosialisasi harus terus dilakukan agar seluruh pihak dapat memahami sepenuhnya tujuan kegiatan ini.

“Kita perlu meningkatkan sosialisasi karena ada beberapa pemahaman di lapangan yang masih belum pas, seperti masih adanya keengganan masyarakat menyerahkan data KTP dan KK-nya sebagai syarat pendataan konsumen LPG 3 kg. Kita sampaikan bahwa data tersebut tidak akan tersimpan di HP pangkalan, tetapi semua tersimpan di *database* Pertamina. Selain itu, sebagian pangkalan juga masih dalam taraf belajar meng-*input* data secara *online* sehingga harus kita sosialisasikan lagi,” ujarnya.

Pentingnya peningkatan sosialisasi juga dikemukakan Sales Area Manager Retail Cirebon PT Pertamina Patra Niaga Rainier Axel Gultom, serta Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) DPC Cirebon Adhy Allamshah.

“Kita *concern* untuk melakukan sosialisasi lebih gencar lagi ke masyarakat, agen, dan pangkalan. Masukan untuk pengembangan sistem dan sebagainya, kita kumpulkan dan akan disempurnakan. Kita perlu mengubah kebiasaan *update* data di pangkalan agar

program digitalisasi ini berjalan lancar,” kata Rainier.

“Hiswana akan meningkatkan sosialisasi baik di tingkat agen maupun pangkalan. Tapi, kami juga mohon bantuan sosialisasi kepada Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar masyarakat mengetahui bahwa saat ini dilakukan pendataan konsumen LPG 3 kg agar subsidi tepat sasaran,” ungkap Adhy.

Kegiatan monev tak hanya dilakukan di daerah yang telah ditunjuk oleh teknologi telekomunikasi yang bagus, tetapi juga di daerah *remote* atau daerah tertinggal. Rencananya, monev di daerah tertinggal ini akan dilakukan mulai Juni 2023.

Porsi terbesar

“Subsidi LPG tabung 3 kg mengambil porsi terbesar jika dibandingkan dengan subsidi BBM dan listrik. Sesuai APBN tahun anggaran 2023, subsidi LPG tabung 3 kg mencapai Rp117,85 triliun. Subsidi yang tepat sasaran akan bermanfaat bagi masyarakat miskin ataupun masyarakat yang rentan memenuhi kebutuhan dasarnya,” kata Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Laode Sulaeman ketika membuka acara Sosialisasi Transformasi Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran Tahap III di Gedung Ibnu Sutowo, Senin (8/5/2023).

Laode menyampaikan, melalui peraturan perundang-undangan, Pemerintah telah menetapkan LPG Tabung 3 kg sebagai barang penting yang hanya diperuntukkan bagi rumah tangga untuk memasak, nelayan sasaran, dan petani sasaran.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM No 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran

dan Keputusan Dirjen Migas No. 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran, Pemerintah mengharapkan dukungan semua pihak dalam pelaksanaan transformasi pendistribusian isi ulang LPG tabung 3 kg yang tepat sasaran.

Dalam kesempatan yang sama, Christina memaparkan, dasar hukum penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg adalah UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, PP Nomor 30 Tahun 2009 (Revisi PP 36/2004), Perpres Nomor 104 Tahun 2007 jo Perpres 70/2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian & Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dan Perpres Nomor 38/2019 jo Perpres 71/2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, & Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.

Selain itu, Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro, Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 jo Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyediaan & Pendistribusian LPG, Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Kepmen ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran Peraturan Menteri dan Keputusan Dirjen Migas Nomor 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran.

“Berdasarkan aturan-aturan tersebut, pengguna LPG 3 kg adalah rumah

tangga, usaha mikro, petani sasaran dan nelayan sasaran,” tambahnya.

Pelaksanaan audit dan/atau kajian terhadap penyaluran LPG 3 kg dilakukan oleh BPK, BPKP dan KPK. Subsidi LPG tahun 2023 ditetapkan Rp17,85 triliun.

“Angka subsidi ini sangat besar. Angka ini dipengaruhi oleh harga jual eceran LPG 3 kg yang tidak pernah naik selama 15 tahun, volume LPG 3 kg, kurs dan harga acuan LPG yaitu CP Aramco yang fluktuatif setiap bulan,” papar Christina.

Realisasi volume LPG 3 kg (PSO) setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Misalnya tahun 2019, realisasinya mencapai 6,84 juta metrik ton, tahun 2020 sebesar 7,14 juta metrik ton. Angka ini naik menjadi 7,46 juta metrik ton tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 7,80 juta metrik ton.

Sebaliknya, realisasi LPG non PSO terus turun. Tahun 2019, volumenya mencapai 0,66 juta metrik ton, tahun 2020 sebesar 0,62 metrik ton. Angka ini turun lagi tahun 2021 menjadi sebesar 0,60 metrik ton dan 0,46 juta metrik ton tahun 2022.

“Ini artinya banyak konsumen yang semula menggunakan LPG non PSO, beralih menggunakan LPG PSO. Kami di Ditjen Migas kerap diminta menjadi saksi ahli oleh Kepolisian terkait penyalahgunaan pendistribusian LPG 3 kg, seperti pengoplosan. Ini salah satu yang menyebabkan meningkatnya realisasi LPG 3 kg. Ditjen Migas dalam pengawasan di lapangan, seperti ke restoran atau kafe, mereka kami temukan tidak menggunakan LPG 3 kg, melainkan non PSO seperti LPG 12 kg atau 50 kg. Hanya saja, sumber LPG ini memang dari agen resmi yang menyalurkan LPG non PSO atau hasil oplosan. Kalau

dilihat dari tren realisasi di mana volume LPG non PSO terus menurun, harusnya tidak seperti itu. Ini yang akan kita benahi di tahun-tahun mendatang,” paparnya.

Dengan kata lain, masih ditemui sejumlah penyalahgunaan LPG 3 kg. Beberapa penyalahgunaan LPG 3 kg antara lain pemindahan isi tabung LPG 3 kg ke LPG non subsidi, penimbunan LPG 3 kg, penjualan LPG 3 kg selain kepada konsumen pengguna, penjualan LPG 3 kg melebihi HET yang ditetapkan Pemda yang dilakukan oleh penyalur/sub penyalur, penjualan/pengangkutan LPG 3 kg ke yang bukan wilayah distribusi penyaluran (lintas kabupaten/kota atau wilayah belum terkonversi) dan pengangkutan LPG 3 kg menggunakan kendaraan yang tidak terdaftar di penyalur. ●



All Out Wujudkan Keselamatan Migas

Salah satu ciri khas industri minyak dan gas bumi (migas) adalah risiko tinggi. Maka, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi aspek krusial dalam industri migas. Menjadikan keselamatan migas sebagai budaya adalah penting. Tak kalah penting, mewujudkannya dalam kegiatan sehari-hari secara berkesinambungan.

Memang, tak mudah menjadikan keselamatan migas sebagai budaya yang tercermin dalam kegiatan sehari-hari. Strategi matang perlu disusun. Koordinasi berupa diskusi, evaluasi dan semacamnya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) perlu dilakukan secara berkala. Terobosan inovatif, misalnya melalui pemanfaatan teknologi terkini, juga mampu mendorong terealisasinya budaya keselamatan.

Keselamatan migas mengharuskan upaya yang *all out* agar terwujud dan menjadi budaya. Upaya setengah-setengah akan menghabiskan waktu, tenaga, dan sangat mungkin biaya yang tak sedikit.

Strategi agar lebih optimal

Keselamatan Migas terdiri dari keselamatan lingkungan, keselamatan instalasi, keselamatan pekerja dan keselamatan umum. Indikator terjaganya budaya Keselamatan Migas

antara lain tidak adanya pencemaran lingkungan, tidak terjadinya kerusakan instalasi, tidak adanya kecelakaan kerja, dan tidak terjadinya kerugian masyarakat.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji ketika membuka rangkaian Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2023 di halaman Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, Kamis (12/1/2023) mengatakan, keselamatan di industri migas merupakan budaya yang melekat dan lebih berakar dibandingkan industri lainnya. Hal ini mengingatkan industri migas telah lebih dari 120 tahun beraksi di dunia internasional, di mana perusahaan-perusahaan multinasional menerapkan budaya keselamatan sangat tinggi.

Lebih lanjut Tutuka menyampaikan, K3 merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja. Sangat penting menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang tentunya bisa berdampak pada demotivasi dalam bekerja ataupun penurunan produktivitas.

Dirjen Migas juga mengingatkan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja yang komprehensif

untuk seluruh pegawai Ditjen Migas.

“Keselamatan tidak terlepas dari kesehatan. Orang yang sehat akan memperhatikan keselamatan dengan lebih baik. Keselamatan di tempat kerja, didukung oleh keselamatan di rumah. Karena itu, sangat penting untuk menjaga keselamatan baik di rumah maupun tempat kerja secara komprehensif. Keseimbangan antara bekerja, di rumah, serta waktu untuk beristirahat, harus dapat diciptakan secara perlahan-lahan dengan program yang tepat,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Mirza Mahendra menyampaikan poin-poin strategis dalam mengoptimalkan pembinaan keselamatan migas ke depan.

Pertama, untuk kegiatan inspeksi dan audit keselamatan migas tahun ini pihaknya akan mengajukan tambahan anggaran dengan IP PNPB Minerba. Penambahan anggaran dioptimalkan untuk mendukung kegiatan pembinaan keselamatan migas, khususnya untuk kegiatan Management Walk Through (MWT) yang sukses direalisasikan sejak akhir 2022 lalu.

“*Alhamdulillah*, kegiatan Management Walk Through (MWT) yang sudah terlaksana pada 2022 diapresiasi dengan baik oleh para BU/BUT dan juga KKKS. Karena MWT ini adalah *solving problem*. Di lapangan banyak permasalahan yang langsung bisa diselesaikan di situ,” paparnya dalam pertemuan internal Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, Direktorat Jenderal Migas (Ditjen Migas) bersama dengan Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas (TIPKM) 2023, Kamis (26/1/2023).





la menambahkan, kegiatan MWT berbeda dengan kegiatan audit karena dalam MWT merupakan kegiatan 'belanja masalah'. Hal positif yang diperoleh dengan MWT adalah banyak permasalahan di lapangan yang langsung diselesaikan. Bahkan, saat ini Ditjen Migas banyak menerima surat permohonan MWT dari General Manager (GM), baik dari Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) dan juga KKKS.

Kedua, kegiatan pembinaan keselamatan perlu dilakukan bersama-sama dengan KKKS dan BU/BUT.

"Berbarengan dengan persero dan persero subholding, dengan Ditjen migas datang ke lapangan secara bersama-sama. Dengan audit bebarengan akan terjadi *mixing culture*, mana yang baik akan kita lakukan bersama," lanjut Mirza.

Menurut Mirza, jika kegiatan inspeksi atau audit dilakukan bersama antara Ditjen Migas dengan subholding, tentu kegiatannya dapat dilakukan dengan lebih mendalam. Dengan demikian hasil inspeksi dan audit dapat lebih maksimal sehingga bermanfaat bagi *sustainability* perusahaan itu sendiri.

Strategi ketiga, ke depan Ditjen Migas akan mengikuti tuntutan global dengan menerapkan audit keselamatan dengan memperhatikan aspek *Environment, Social and Governance* (ESG) yang merupakan turunan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Selain ketiga strategi tadi, Mirza juga akan memastikan jajarannya

tetap aktif dalam menjalankan *safety campaign* baik dari sisi slogan, CEO *Safety Talk*, dan MWT tetap berjalan di tahun 2023.

Road Map Budaya Keselamatan Migas

Selain peraturan perundangan, regulasi keselamatan migas berupa sejumlah pedoman atau edaran yang dikeluarkan Kepala Inspeksi Migas telah terbit. Salah satunya SK KIM No. 0196.K/18/DMT/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas.

Selain itu, ada pula SK KIM No. 0107.K/18/DMT/2019 tentang Pedoman Investigasi Kecelakaan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; SK KIM No. 86.K/HK.02/DMTO/2022 tentang Tata Cara Pengajuan Penerbitan Persetujuan Layak Operasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; dan SK KIM No. 21.K/MG.06/DMT/2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaporan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan budaya keselamatan migas pada kegiatan usaha migas, Kementerian ESDM, melalui Direktorat Minyak dan Gas Bumi, juga menyusun *Road Map Budaya Keselamatan Migas*.

"Pemerintah berkomitmen mewujudkan keselamatan migas antara lain dengan terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, serta bekerja sama dengan badan usaha dalam membudayakan keselamatan migas. Selain itu, menyusun peraturan, SNI/SKKNi, Audit SMKMI, inspeksi

atau pemeriksaan keselamatan. Juga, menyusun *Road Map Budaya Keselamatan Migas* di mana kegiatan ini merupakan implementasi program kerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM dan TIPKM," ujar Mirza Mahendra dalam Penyusunan Road Map Budaya Keselamatan Migas di Grand Tjokro Hotel, Bandung, Kamis (11/5/2023).

Menurut Mirza, Keselamatan Migas mutlak menjadi budaya setiap perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia. Beberapa kecelakaan dalam kegiatan migas yang menyebabkan *fatality* beberapa waktu terakhir ini, menunjukkan bahwa budaya keselamatan belum terbangun dengan baik.

"Sebagai pembina dan pengawas keselamatan migas, kami terus berupaya membudayakan keselamatan migas. Melalui penyusunan *Road Map Budaya Keselamatan Migas* ini, diharapkan dapat menjadi peta jalan atau acuan bagi perusahaan migas dalam menjaga Keselamatan Migas," papar Mirza yang mengharapkan *road map* dapat rampung tahun 2023.

Ketua TIPKM Waluyo dalam kesempatan itu menyampaikan dukungan atas upaya Pemerintah meningkatkan keselamatan migas.

"Menjadikan keselamatan migas sebagai budaya merupakan salah satu tantangan dalam kegiatan usaha migas. TIPKM mendukung dan bersinergi dengan Pemerintah untuk mewujudkan budaya keselamatan migas," kata Waluyo.

Dalam rangkaian penyusunan *road map* tersebut, Tim telah menyusun kerangka, seperti definisi budaya keselamatan migas. Disepakati, definisi budaya keselamatan migas adalah penggabungan dari nilai-nilai standar, moral, persepsi, kompetensi dan norma-norma perilaku yang

dapat diterima oleh seluruh individu dalam organisasi, yang menentukan komitmen dan gaya, serta kemampuan dalam mewujudkan keselamatan migas.

Lalu, klasifikasi tingkat keberhasilan/*maturity* budaya keselamatan migas dibagi dalam lima level, yaitu level 1 (*emerging*), level 2 (*managing*), level 3 (*involving*), level 4 (*co-operating*), dan level 5 (*continually improving*).

Road map ini diharapkan rampung tahun 2023 dan mulai dilaksanakan tahun 2024. Ditargetkan pada tahun 2026 dapat dicapai target 100% *minimal maturity* level 3, tahun 2028 ditargetkan 75% *minimal maturity* level 4, dan 75% *minimal maturity* level 5 pada tahun 2030.

Diskusi dan evaluasi bersama

Duduk Bersama dengan *stakeholder* juga penting dalam mewujudkan keselamatan migas. Hal ini, contohnya, terlihat saat Ditjen Migas menyelenggarakan Evaluasi Keselamatan Migas pada Kegiatan Pengeboran dan Kerja Ulang Sumur Migas di Atria Hotel, Tangerang, Selasa (21/2/2023).

Dalam beberapa waktu terakhir ini, kata Mirza dalam acara tersebut, terjadi beberapa kejadian kecelakaan yang menyebabkan *fatality*. Agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan (*improvement*), baik dari sisi operasional, manajerial, maupun kompetensi dari pekerja.

Menurut Mirza, untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan kerja migas, perlu dilakukan peninjauan dari berbagai sisi. Pertama, dari sisi pekerja, perlu dipastikan pekerja telah memenuhi kompetensi, memahami SOP dan memiliki penguasaan terhadap risiko dari lingkungan kerja.

“Salah satu penyebab kecelakaan kerja adalah kompetensi pekerja, termasuk pekerja di bidang pengeboran. Ini

menjadi perhatian karena satu *fatality* sudah sangat besar bagi kami,” tegasnya.

Selanjutnya dari sisi peralatan. Sisi lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) di lapangan, serta pelaksanaan inspeksi.

“Saya ingatkan kembali agar Perusahaan Inspeksi harus memastikan peralatan dan instalasi sesuai aturan karena pengabaian terhadap hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Perusahaan Inspeksi harus bekerja secara benar dan independen,” tegas Mirza.

Terjadinya kecelakaan kerja juga dapat menjadi catatan buruk bagi KKKKS. Pemerintah mengharapkan agar semua pihak dapat bekerja sama meningkatkan keselamatan migas.

“Melalui pertemuan dengan *stakeholder* ini, Pemerintah mengharapkan dapat dilakukan evaluasi terkait keselamatan pada kegiatan pengeboran dan kerja ulang sumur. Secara bersama kita membahas ruang-ruang perbaikan (*improvement*) dalam kegiatan operasi migas. Kami wajib memastikan semua yang bekerja baik dari unit utama maupun pendukung telah sesuai kaidah keselamatan,” tambahnya.

Dalam sesi tanya jawab, secara umum perusahaan pengeboran menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan mitigasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Namun diakui adanya kesulitan mencari SDM pengeboran yang siap pakai pascapandemi Covid-19. Meski telah dilakukan beberapa kali pelatihan SDM, namun belum dapat memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan.

Hal senada juga disampaikan Ketua Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas dan Panas Bumi Indonesia (APMI) Suprijonggo Santoso. Menurut dia, APMI

menyadari adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan tenaga kerja. Oleh karena itu APMI telah mendirikan lembaga sertifikasi profesi (LSP).

Namun demikian, ada perusahaan yang enggan mengirimkan pekerjanya untuk meningkatkan kompetensi melalui training karena sebagian kontrak kerja industri penunjang hanya berjangka pendek.

APMI mengusulkan agar Pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan bagi SDM pengeboran dan penghargaan bagi perusahaan pengeboran yang memenuhi kompetensi.

Dalam *Focus Group Discussion* (FGD) terkait kecelakaan yang terjadi pada kegiatan usaha hilir, Rabu (17/5/2023), Mirza mengungkapkan, insiden kecelakaan bisa menjadi bahan pembelajaran (*lesson learned*), seperti kecelakaan dan *fatality* yang terjadi di kilang minyak Refinery Unit (RU) II Dumai serta Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang pada kuartal pertama tahun 2023 lalu.

Dikatakan Mirza terkait dua kasus tersebut, terutama kecelakaan yang terjadi di TBBM Plumpang, saat ini masih tahap penyidikan aparat penegak hukum sehingga ada beberapa hal yang tidak bisa dibuka secara gamblang.

“Mohon berkenan bapak-ibu peran aktifnya, dan tetap budayakan keselamatan migas. Kita mulai dari kita sendiri, rekan kerja kita, dan keluarga kita, maka akan terwujud budaya keselamatan migas sehingga kita dapat menjalankan kegiatan operasi migas yang aman andal, dan akrab lingkungan untuk meningkatkan *value* dari perusahaan,” jelasnya.

Diskusi antara Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi dan TIPKM juga perlu dilakukan, seperti saat Penyusunan Program kerja TIPKM 2023. Diskusi ini diharapkan dapat selaras dengan target dan rencana kerja Ditjen Migas, khususnya unit Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, di tahun 2023.

“Tetap kita *all out* untuk pembinaan keselamatan dengan keterbatasan yang kita punya. Dengan adanya dukungan dari ‘guru-guru’ kita di TIPKM dan tim (Ditjen Migas), kita bisa jalani dengan beberapa strategi yang kita laksanakan,” kata Mirza pada pertemuan bersama TIPKM, Rabu (25/1/2023).

Pada kesempatan yang sama, Ketua TIPKM 2023 Dr. Waluyo menyampaikan bahwa timnya telah menyusun rencana kerja TIPKM 2023 setelah berdiskusi bersama Pokja Keselamatan Hulu Migas, Pokja Keselamatan Hilir Migas, Pokja Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Migas, Pokja Standardisasi Migas, dan Pokja Usaha Penunjang Migas.

Setidaknya terdapat 12 program kerja TIPKM yang dicanangkan untuk dilaksanakan di tahun 2023. TIPKM sendiri beranggotakan para profesional, akademisi, dan juga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Mirza beserta jajaran juga melakukan CEO Safety Talk ke Kantor Pusat PT Perusahaan Gas Negara (PGN) di Jakarta, Senin (30/1/2023). Berdasarkan diskusi dengan manajemen PT PGN yang merupakan subholding Gas PT Pertamina (Persero), Mirza meminta agar PGN dapat meningkatkan upaya-upaya dalam membudayakan keselamatan migas. Manajemen juga hendaknya dapat memberikan teladan kepada seluruh pekerja secara berjenjang.

Satu hal yang pasti untuk menghindari terjadinya kecelakaan, perusahaan dan pekerja harus mengenali secara jelas risiko sebelum memulai pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Keselamatan Hulu Migas Bambang Eka Satria dalam acara Evaluasi Keselamatan Migas pada Kegiatan Pengeboran dan Kerja Ulang Sumur Migas di Atria Hotel, Gading Serpong Boulevard, Tangerang, Selasa (21/2/2023).



Dalam kesempatan itu, ia memaparkan, untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja, salah satu hal yang perlu dilakukan perusahaan migas adalah melakukan sosialisasi ke pekerja bahwa di sekeliling lokasi kerjanya banyak memiliki potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan. Rapat keselamatan kerja dengan semua pekerja perlu diadakan sedikitnya seminggu sekali.

“Rapat dilakukan sekali sepekan dan catatan-catatan daftar hadir, serta topik-topik yang didiskusikan harus disimpan,” kata Bambang Eka.

Perlu juga dilakukan rapat tambahan yang hendaknya diselenggarakan sebelum setiap operasi non rutin (*pre-job safety meeting*).

Rapat Evaluasi Keselamatan Migas Pada Kegiatan Pengeboran dan Kerja Ulang Sumur Migas ini dihadiri oleh para Koordinator di lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, perwakilan KKKS, Perusahaan Jasa Pengeboran dan Kerja Ulang Sumur, Perusahaan Inspeksi, serta Asosiasi terkait.

Terobosan melalui teknologi

Upaya lain untuk mewujudkan keselamatan migas adalah melalui penerapan teknologi. Hal ini pula yang dilakoni oleh Kementerian ESDM c.q Ditjen Migas. Pada Rabu (8/3/2023), telah diluncurkan Aplikasi Beban Kerja Perusahaan Inspeksi versi terbaru.

Peluncuran Aplikasi Beban Kerja Perusahaan Inspeksi versi terbaru ini merupakan tindak lanjut penyelesaian Perhitungan Beban Kerja Perusahaan Inspeksi pada akhir tahun 2022 lalu.

“Melalui Aplikasi Beban Kerja Perusahaan Inspeksi versi terbaru

ini, Perusahaan Inspeksi dapat memperbarui data pelaksanaan kegiatannya dengan tetap mengedepankan keselamatan migas,” kata Koordinator Kelompok Kerja Usaha Penunjang Migas Wijayanto yang mewakili Direktur Teknik dan Lingkungan Migas.

Pembaruan data kegiatan Perusahaan Inspeksi tersebut sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri ESDM No 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Melalui aplikasi ini, pembaruan dilakukan oleh Perusahaan Inspeksi langsung hingga akhir tahun.

“Implementasi pelaporan melalui aplikasi ini, data kegiatan langsung di-*input* per bulan untuk jangka waktu satu tahun, yaitu hingga bulan Desember. Diharapkan, data tersebut dapat menjadi bahan informasi bagi kepada BU/BUT terkait beban kerja Perusahaan Inspeksi,” tutur Wijayanto.

Informasi beban kerja Perusahaan Inspeksi akan ditampilkan dalam website Ditjen Migas sehingga dapat dengan mudah diakses oleh BU/BUT atau pihak lain yang membutuhkannya.

Wijayanto kembali menegaskan, upaya ini bukan membatasi Perusahaan Inspeksi mendapatkan pekerjaan yang pada akhirnya memberi manfaat secara ekonomi, melainkan demi menjaga kualitas pekerjaan Perusahaan Inspeksi yang sangat menentukan jalannya kegiatan operasi migas. Perusahaan Inspeksi juga diminta untuk menyampaikan datanya secara jujur sehingga dapat mencerminkan beban kerja Perusahaan Inspeksi. ●



Peran LEMIGAS dalam Pengembangan Kegiatan Usaha Migas di Tanah Air

Pengembangan kegiatan usaha minyak dan gas bumi (migas) di tanah air memerlukan peran serta berbagai pihak. Salah satunya berkaitan dengan inovasi. Di sinilah peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) "LEMIGAS".

LEMIGAS merupakan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah pada Kementerian ESDM. LEMIGAS Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) merupakan solusi bagi tantangan di industri migas dengan memberikan pelayanan pengujian dan analisa yang akurat dan terpercaya di sektor hulu dan hilir migas.

Mengedepankan kualitas

"Sejak didirikan tahun 1965 hingga sekarang, LEMIGAS selalu mengedepankan kualitas pelayanan dan hasil analisa yang akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal itulah yang membuat LEMIGAS tetap menjadi solusi tepat bagi

tantangan di industri migas" tutur Kepala LEMIGAS Ariana Soemanto di perkantoran LEMIGAS, Kamis (5/1/2023).

Koordinator Pengujian Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Junita Trivianty menambahkan, "Di sektor hulu migas, pelayanan pengujian LEMIGAS diperkuat dengan Laboratorium Sedimentologi yang memberikan pelayanan analisis petrologi dan sedimentologi yang memanfaatkan data hasil pemboran dan data singkapan batuan. Integrasi hasil analisis laboratorium menghasilkan keluaran analisa karakteristik litologi, fasies sedimen, interpretasi lingkungan pengendapan, proses

diagenetik, kualitas dan sensitivitas *reservoir*, dan lain-lain".

Data hasil analisis dimanfaatkan untuk mengetahui tipe dan karakteristik litologi; analisis suksesi fasies sedimen; interpretasi lingkungan pengendapan; analisis provenan sumber sedimen; interpretasi tipe *reservoir* & heterogenitas; analisis sejarah diagenesis dan pengontrol perkembangan porositas batuan *reservoir*; gambaran sistem pori (ukuran, bentuk dan tipe) batuan *reservoir*; identifikasi perkembangan pengisian mineral *autijenik* pada rongga pori; kehadiran & proporsi unsur dan mineral yang mempengaruhi sensitivitas *reservoir*;

mendukung kegiatan interpretasi log sumuran; informasi ukuran butir untuk desain *sand/gravel pack* dan lainnya

Adapun pelayanan yang terdapat pada Laboratorium Sedimentologi antara lain Core Storage, Analisa petrography, SEM-EDX-BSE, XRD, XRF, LPSA dan SIEVE.

LEMIGAS sebagai Penyelenggara Uji Profisiensi yang telah terakreditasi ISO 17043:2010 (PUP-006-IDN), setiap tahunnya mengadakan Program Uji Profisiensi Laboratorium BBM, *Crude Oil*, Pelumas, Gas Bumi dan Kalibrasi. Tujuan kegiatan ini adalah sebagai salah satu program jaminan mutu laboratorium dalam memastikan hasil uji/kalibrasi yang baik dan sebagai penilaian kinerja yang objektif terhadap mutu suatu laboratorium.

Saat ini, Penyelenggaraan Uji Profisiensi LEMIGAS (PUP LEMIGAS) telah dimulai di mana pendaftaran peserta Uji Profisiensi mulai tanggal 26 Februari hingga 24 Maret 2023. Program Uji Profisiensi 2023 mempunyai sasaran untuk memperoleh gambaran umum mengenai kinerja laboratorium pengujian/kalibrasi dalam hal keabsahan terutama yang berhubungan dengan mata uji yang diikuti dalam uji profisiensi sesuai ISO 17025:2017.

Pada Uji Profisiensi kali ini terdapat beberapa komoditas, diantaranya bahan bakar minyak (bensin dan solar), *crude oil*, pelumas (minyak lumas otomotif, industri dan gemuk lumas industri), gas bumi (komposisi gas bumi dan sifat fisika gas bumi) dan kalibrasi termometer digital (0 s.d. 200°C).

Program uji profisiensi memiliki beberapa tahapan yaitu dimulai dari pendaftaran, uji homogenitas dan stabilitas, distribusi sampel, proses pengujian/kalibrasi, pengolahan data, evaluasi data, dan puncak kegiatan yaitu pada acara temu karya (paparan

hasil uji profisiensi) yang direncanakan pada 12–13 Oktober 2023.

LEMIGAS juga senantiasa meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya mengingat industri migas termasuk industri dinamis. Kelompok Pengujian Aplikasi Produk LEMIGAS, misalnya, pada 3–5 April 2023 lalu, telah mengadakan pelatihan Sistem Manajemen Lembaga Sertifikasi Produk secara *online* yang mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012 dan SNI ISO/IEC 17067:2013.

Pelatihan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas human capital LSPRO LEMIGAS sehingga mutu pelayanan LSPRO LEMIGAS tidak usah diragukan lagi, dalam memberikan pelayanan jasa yang prima.

Telah terbukti

Sumbangsih LEMIGAS dalam pengembangan usaha migas di Indonesia telah beberapa kali terbukti di lapangan. Baru-baru ini, misalnya, LEMIGAS mengatasi water blocking akibat penipisan alami, penerobosan air, dan kepasiran di dalam formasi di sumur gas.

“Dengan laboratorium yang berteknologi tinggi dan personel yang andal, LEMIGAS selalu menjadi yang terdepan dalam memberikan solusi terhadap tantangan di industri migas Indonesia”, tutur Ariana di perkantoran LEMIGAS, Rabu (11/1/2023).

Laboratorium Eksploitasi LEMIGAS mengolah umbi porang dan asam lemak nabati turunan CPO, menjadi produk organic foaming agent yang mampu mentransformasi air menjadi foam untuk menurunkan densitas air. Alhasil, gas mampu mengalir dan terproduksi kembali.

Pelaksana Harian Koordinator Pengujian Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Yohannes B. Doi Wange menambahkan, “Laboratorium

Eksploitasi menghasilkan senyawa foaming agent yang tahan temperatur dan salinitas tinggi, serta kompatibel dengan air formasi. Inovasi ini ialah solusi terbaik untuk masalah *water blocking* pada sumur gas”.

Hingga saat ini, inovasi *Organic Foaming Agent* telah dikembangkan lebih lanjut melalui pengujian terhadap beberapa sampel air formasi, baik dari sumur gas maupun minyak. Diharapkan inovasi teknologi ini mampu menjadi salah satu alternatif untuk membantu kelancaran operasional produksi sumur gas. LEMIGAS.

LEMIGAS memiliki sebuah laboratorium Korosi yang dilengkapi dengan peralatan uji yang modern. Pengujian yang dilakukan di Laboratorium Korosi ini adalah pengujian performa *inhibitor* korosi baik pada kondisi atmosferik atau pada kondisi ekstrim (P dan T yang tinggi), atau kondisi pengujian yang sesuai dengan kondisi operasi di lapangan.

Selain itu juga dapat melayani pengujian sifat fisika dan kimia dari inhibitor korosi dan *scale inhibitor* seperti *thermal stability and material compatibility*. Uji ketahanan *coating* setelah di ekspose dalam lingkungan yang ekstrim (*corrosive*) juga dapat di dilakukan di Laboratorium Korosi LEMIGAS.

Di laboratorium Korosi LEMIGAS juga dilakukan pengujian serta simulasi untuk mengevaluasi jika terjadi kegagalan material yang berasal dari lapangan-lapangan minyak dan gas bumi, sehingga dapat dicari akar permasalahannya serta memberikan rekomendasi material yang sesuai dengan lingkungannya (*root cause failure analysis*).

Laboratorium Korosi LEMIGAS didukung personel yang berkompeten dan berpengalaman, serta dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang

berteknologi tinggi seperti *Rotating Cage Autoclave*, *HPHT Autoclave*, *Jet Impingement Test*, *Kettle/Bubble Test*, *Thermal Stability Test*, *Salt Spray Test*, *Humidity Test* serta peralatan pengujian *Oxygen Scavenger*.

Laboratorium Korosi LEMIGAS telah menjadi mitra untuk masalah korosi pada industri migas di Indonesia dan luar negeri. Salah satu mitra Laboratorium Korosi LEMIGAS diantaranya ConocoPhillips, Pertamina, Medco E&P, Baker Hughes Malaysia, Petrochina, Vico Indonesia dan masih banyak lagi.

LEMIGAS juga telah mendapat pengakuan dari sejumlah *stakeholder*, seperti SKK Migas.

"Pada Kajian Verifikasi/Evaluasi Diskrepansi West Area, SKK Migas merekomendasikan BBPMGB LEMIGAS melakukan studi untuk menghitung nilai diskrepansi volume produksi minyak bumi di wilayah West Area, Riau," ungkap Ariana di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

LEMIGAS Ditjen Migas telah melakukan tahapan studi awal, yaitu pengumpulan data, baik secara langsung melalui survei dan *interview* maupun secara tidak langsung melalui surat elektronik, dan lain lain.

Selanjutnya dilakukan observasi dan sampling minyak bumi dan air formasi secara serentak di 9 (sembilan) *Gathering Station (GS)* yaitu GS Kotabatak, GS Petapahan, GS Texcal, GS Suram, GS Lindai, GS Kasikan, GS Terantam, GS Osam dan GS Langgak.

Sampel minyak bumi dan air formasi tersebut kemudian dianalisis di laboratorium, baik di mini laboratorium yang dirancang tim studi on site maupun di laboratorium LEMIGAS Jakarta. Selain itu, dilakukan pula *dynamic and static measurement* untuk mengevaluasi kinerja sistem alat ukur. Selanjutnya dikaji aplikasi

energy component untuk megevaluasi formula perhitungan minyak. Seluruh data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis dan dilakukan pula simulasi data. Tahap akhir yang dilakukan yaitu evaluasi dan pelaporan.

Keluaran hasil studi ini yaitu analisis penyebab perubahan volume diskrepansi produksi West Area secara teknis dan kuantifikasi volume diskrepansi produksi. Selain itu, diperoleh basis volume diskrepansi produksi West Area berdasarkan kondisi operasional saat ini.

Terkini, LEMIGAS telah mengadakan *Kick Off* Uji Jalan Bahan Bakar *Gasoline* Menggunakan *Octane Booster* pada 24 Februari 2023 di Gedung Aplikasi Produk LEMIGAS. Kegiatan Uji Jalan Bahan Bakar *Gasoline* menggunakan aditif *Octane Booster* dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi impor *Gasoline* dengan menggunakan aditif *Octane Booster* produksi dalam negeri.

Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan aditif *Octane Booster* pada *Gasoline* RON 92 terhadap kinerja mesin bensin kendaraan bermotor, komponen mesin, pelumasnya dan emisi yang dihasilkan melalui uji jalan sampai dengan 50.000 km sekaligus mendapatkan rekomendasi terkait penggunaan *Octane Booster* dan memastikan komponen pembentuknya sesuai dengan aturan SK Dirjen Migas.

Kegiatan ini merupakan kerja sama antara PT Pertamina (Persero) khususnya Fungsi *Process & Facility* PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dengan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS.

Ariana dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada LEMIGAS untuk bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan pengujian

yang dilakukan sebelumnya dan saat ini dan mudah-mudahan terus berlanjut di waktu mendatang.

Kontribusi dalam eksploitasi migas

Sebagai Unit pengujian migas dibawah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, LEMIGAS melakukan pelayanan jasa pengujian laboratorium dan studi dalam sektor hulu dan hilir migas. Salah satu pelayanan jasa pengujian laboratorium dan studi yang dapat diandalkan yaitu Divisi Eksploitasi.

Laboratorium Pengujian Teknologi Eksploitasi telah berpengalaman dalam pengujian terhadap data eksploitasi minyak dan gas bumi dari berbagai perusahaan dan seluruh cekungan sedimen di Indonesia sejak era 1970-an.

Laboratorium yang berada di Divisi Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional LP-085-IDN sesuai dengan persyaratan untuk Kopetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2015.

Divisi Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi memberikan pelayanan prima yang mencakup pelayanan laboratorium, studi, penyewaan alat dan tenaga ahli. Laboratorium yang terdapat di LEMIGAS meliputi laboratorium Evaluasi Formasi, PVT, Pemboran dan Produksi, Migas non Konvensional dan EOR. Sedangkan studi yang dilakukan pada divisi ini antara lain Studi Pengembangan Lapangan (POD), Studi Sertifikasi Cadangan Migas, Studi *Tertiary Oil Recovery (EOR)*, Studi GGR, Studi *Waterflood*, Studi Optimasi Produksi dan Studi Stimulasi Sumuran.

Di samping itu, Divisi Eksploitasi juga melayani jasa penyewaan alat seperti *Hydraulic Rig*, *Digital Well Analyzer*, *Electronic Medical Record (EMR)* untuk temperatur dan tekanan *subsurface*,

slickline unit, wireline unit, pressure control Equipment unit, dll.

Pelayanan Divisi Eksploitasi juga diperkaya dengan penyediaan tenaga ahli di bidang simulasi *reservoir*, EOR, petrofisik, stimulasi sumur, PVT dan pemboran.

Peran di masa transisi energi

Sektor energi berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 314 juta ton CO₂ menjadi 398 juta ton CO₂ pada tahun 2030 melalui pengembangan energi terbarukan, penerapan konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji pada Puncak Bulan K3 Nasional 2023 di Kantor LEMIGAS, Selasa (14/2/2023), menuturkan bahwa Kementerian ESDM memilih gas untuk lebih dominan sebagai modal untuk tinggal landas menuju *renewable energy*.

“Peran gas sebagai energi transisi sangatlah penting dan LEMIGAS sebagai salah satu Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi telah banyak melakukan kajian/studi dan pengujian-pengujian di lapangan migas maupun laboratorium terkait dengan teknologi pemanfaatan gas,” kata Ariana Soemanto dalam acara yang sama.

Kegiatan pengujian dan studi yang dilakukan di LEMIGAS diupayakan untuk meningkatkan produksi gas dari lapangan migas dengan merancang infrastruktur fasilitas produksi gas dan pemanfaatan gas untuk berbagai sektor, baik sektor rumah tangga, industri, transportasi maupun komersial, serta membantu memberikan solusi kepada pemerintah dan sektor industri migas terkait dengan evaluasi mutu dari gas di hulu dan hilir migas, melakukan reduksi emisi dengan pemanfaatan gas suar, penyelidikan kegagalan



fasilitas produksi migas karena korosi serta pencegahannya dengan pengujian material dan *inhibitor*.

Lisna Rosmayati, Koordinator Kelompok Pengujian Gas Bumi menyampaikan beberapa keterlibatan LEMIGAS dalam kegiatan pemanfaatan gas bumi sebagai berikut:

1. Peranan LEMIGAS dalam melakukan studi pendahuluan pembangunan jaringan pipa gas bumi untuk rumah tangga dengan skema KPBU di 23 kota dan kabupaten.
2. Melakukan studi kelayakan rencana pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang.
3. Melakukan studi pemanfaatan LNG di provinsi Jawa Tengah untuk sektor industri, komersial dan rumah tangga.
4. Melakukan *sampling*, pengujian lapangan dan laboratorium terkait dengan *monitoring* spesifikasi gas bumi, LPG dan CNG.

5. Memberikan konsultasi teknis terhadap permasalahan yang terjadi di hulu dan hilir minyak dan gas bumi.
6. Menjadi penyelenggara uji banding antar laboratorium untuk energi minyak, gas dan pelumas.
7. Memberikan bimbingan teknis kemigas kepada mitra kerja dan industri migas.

LEMIGAS sebagai Badan Layanan Umum dari hulu hingga hilir minyak dan gas bumi telah siap memasuki masa transisi energi saat ini karena LEMIGAS memiliki fasilitas pengujian dan sumber daya manusia (SDM) yang profesional di bidang minyak dan gas bumi. Pengujian dan studi yang dilakukan LEMIGAS juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan berkaitan dengan produksi dan harga gas domestik. ●



Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 Atur Mekanisme Pengguna Gas Bumi Tertentu dan HGBT di Bidang Industri

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Peraturan ini guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Aturan ini terdiri dari 20 pasal dan ditetapkan tanggal 20 Desember 2022, serta diundangkan

tanggal 23 Desember 2023.

Dinyatakan dalam Pasal 2, dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan gas bumi, Menteri ESDM menetapkan harga gas bumi dengan mempertimbangkan:

- Keekonomian lapangan
- Harga gas bumi di dalam negeri dan internasional
- Kemampuan daya beli konsumen gas bumi di dalam negeri



- Nilai tambah dari pemanfaatan gas bumi di dalam negeri

Selanjutnya dalam Pasal 3, Menteri menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu di titik serah pengguna gas bumi (plant gate) dengan harga paling tinggi US\$6 per mmbtu. Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) berlaku untuk pengguna gas bumi yang membeli gas bumi di titik serah pengguna gas bumi (plant gate) dengan harga lebih tinggi dari US\$6 per mmbtu.

Diatur dalam Pasal 4, penetapan HGBT diperuntukkan bagi pengguna gas bumi yang bergerak di sejumlah bidang industri.

Ditetapkan dalam Pasal 5, pengguna gas bumi mengajukan permohonan Rekomendasi sebagai Pengguna Gas Bumi Tertentu kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian (Menperin). Selanjutnya Menperin menyampaikan rekomendasi kepada Menteri ESDM setelah melakukan evaluasi secara administrasi, teknis dan keekonomian terhadap permohonan tersebut.

Pasal 7 menyatakan, Menteri ESDM menetapkan harga gas bumi tertentu, pengguna gas bumi tertentu, volume gas bumi tertentu dan penyesuaian harga gas bumi setelah meminta pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan (Menkeu).

Selanjutnya dalam Pasal 11, penetapan HGBT tidak mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian kontraktor.

“Badan usaha yang menyalurkan gas bumi kepada pengguna gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan insentif secara proporsional oleh Menteri,” bunyi Pasal 12.

Dinyatakan dalam Pasal 13. Menteri ESDM dapat menugaskan badan usaha milik negara dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang kegiatan usaha gas bumi, untuk melaksanakan penyaluran gas bumi kepada pengguna gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1.

Pengawasan terhadap implementasi HGBT sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala SKK Migas, Kepala BPMA dan Kepala Badan Pengatur sesuai dengan kewenangannya. Ini diatur dalam Pasal 14.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 333), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya, Menteri ESDM menetapkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Aturan ini ditetapkan tanggal 19 Mei 2023 dan mencabut Kepmen ESDM Nomor 134.K/HK.02/MEM.M/2021. ●

Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 2022–2031 Tertuang dalam Kepmen Ini

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menetapkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 10.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 2022-2031. Aturan ini ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2023.



Dalam pertimbangannya, dinyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (l) Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Menteri ESDM menetapkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

Pertimbangan lainnya, Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2012–2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2700.K/11/MEM/2012 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan gas bumi nasional sehingga perlu diganti.

Diktum kesatu aturan ini menetapkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional



Tahun 2022–2031 yang dibagi dalam enam region, yaitu

- Region I: Aceh dan Sumatera Utara.
- Region II: Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dan Jawa Barat.

- Region III: Jawa Tengah.
- Region IV: Jawa Timur
- Region V: Kalimantan dan Bali
- Region VI: Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua.

Selanjutnya dalam diktum kedua, Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2022–2031 terdiri atas:

- Peta Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi, serta Fasilitas dan Sarana Infrastruktur yang diperlukan untuk pemanfaatan gas bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- Peta Rencana Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- Matriks Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi, serta Fasilitas dan Sarana Infrastruktur yang diperlukan untuk pemanfaatan gas bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Diatur dalam diktum ketiga, fasilitas dan sarana infrastruktur yang diperlukan untuk pemanfaatan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, merupakan fasilitas yang sudah ada [eksisting] dan fasilitas yang dalam proses pembangunan (*ongoing*) yang terdiri atas:

- Pipa transmisi
- Pipa distribusi
- Pipa untuk kepentingan sendiri
- Fasilitas Liquefied Natural Gas (LNG)
- Fasilitas Compressed Natural Gas (CNG)

- Jaringan pengelolaan gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil

“Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua merupakan wilayah administratif kabupaten/kota yang terdiri atas wilayah yang telah terdapat infrastruktur pipa gas bumi dan wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai Wilayah Jaringan Distribusi,” demikian bunyi diktum keempat.

Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2022–2031 digunakan sebagai acuan bagi:

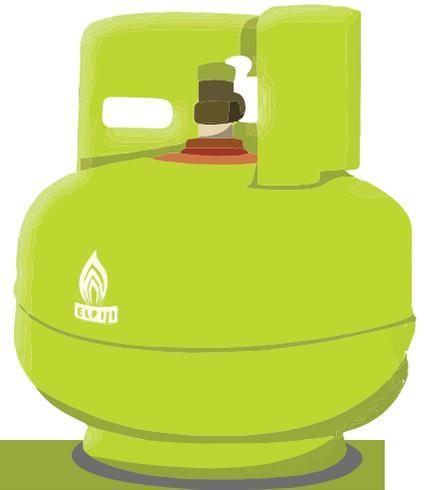
- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan evaluasi dan penetapan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang Hak Khususnya.
- Pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur gas bumi, keputusan investasi, dan pengembangan pasar gas bumi domestik.

“Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2022–2031,” bunyi diktum ketujuh.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri ESDM Nomor 2700 K/11 / MEM/ 2012 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2012 -2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

●

Kepmen Menteri ESDM Ini Atur Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Agar Tepat Sasaran



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menetapkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran. Regulasi ini ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2023.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji memaparkan, sesuai pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu, maka Pemerintah masih menyediakan dana subsidi untuk bahan bakar.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021, menyatakan bahwa LPG Tabung 3 Kg merupakan LPG Tertentu yang disubsidi oleh Pemerintah.

“Sistem penyediaan dan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu masih bersifat terbuka sehingga mempengaruhi volume dan besaran subsidi. Selain itu, sistem pendistribusian isi ulang LPG Tertentu yang bersifat terbuka menyebabkan

subsidi menjadi tidak tepat sasaran,” lanjut Dirjen Migas di Jakarta, Sabtu (4/3/2023)

Terkait hal tersebut, Menteri ESDM kemudian menetapkan Keputusan Menteri ESDM No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.

“Tujuan penetapan aturan ini adalah untuk mewujudkan pasokan LPG yang memadai dan dapat diakses masyarakat secara berkelanjutan dengan harga yang terjangkau, meningkatkan kesejahteraan dan menjaga daya beli masyarakat, serta menjamin pendistribusian LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran dan tepat harga yang diperuntukkan bagi konsumen pengguna tertentu, yaitu kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran,” papar Tutuka.

Kepmen ini mengatur hal-hal:

1. Tujuan pelaksanaan

1. Pendistribusian isi ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran
2. Definisi dan ketentuan umum
3. Pelaksanaan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran:
 - Pelaksana Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu termasuk persyaratan dan kewajiban.
 - Penahapan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu tepat sasaran (diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi) dan mekanisme teknis pendistribusian setiap tahap (Tahap I dan Tahap II).
 - Kuota volume isi ulang LPG Tertentu.
4. Mekanisme penganggaran subsidi dan dukungan operasional
5. Mekanisme pelaporan dan pengawasan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu
6. Mekanisme verifikasi
7. Pengenaan sanksi

Lebih lanjut mengenai penahapan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu tepat sasaran, diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran. ●



Regulasi Ini Atur Sistem Keanggotaan dan Nonanggota Pemanfaatan Data Hulu Migas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menetapkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 293.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Keanggotaan dan Nonanggota Dalam Pelayanan Pemanfaatan Data Hulu Migas.

Dinyatakan dalam diktum kesatu, pedoman pelaksanaan sistem keanggotaan dan nonanggota dalam pelayanan pemanfaatan data hulu minyak dan gas bumi mencakup:

- Ketentuan keanggotaan dan nonanggota termasuk hak akses dan pemanfaatan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kepmen ini.
- Ketentuan lain terkait akses paket data sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kepmen ini.
- Selanjutnya dalam rangka pelayanan pemanfaatan data hulu minyak dan gas bumi, Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dapat

melakukan program alih media data dan/atau transkripsi data setiap tahun sesuai dengan alokasi anggaran.

“Dalam hal terdapat usulan untuk alih media dan/atau transkripsi data di luar program sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan data belum tersedia, Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dapat membebankan biaya tambahan,” demikian bunyi diktum ketiga.

Penetapan ESDM Nomor 293.K/HK.02/MEM.S/2022 mempertimbangkan peningkatan pelayanan pemanfaatan data hulu minyak dan gas bumi yang dilaksanakan melalui sistem keanggotaan dan nonanggota merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Dengan adanya Kepmen ESDM Nomor 293.K/HK.02/MEM.S/2022, maka Kepmen ESDM Nomor 33.K/03/MEM/2020 tentang Sistem Keanggotaan Dalam Pelayanan Pemanfaatan Data Hulu Minyak

dan Gas Bumi, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan dinamika kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, Menteri ESDM menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Keanggotaan dan Nonanggota Dalam Pelayanan Pemanfaatan Data Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pada saat Kepmen ini mulai berlaku, Kepmen ESDM Nomor 33.K/03/MEM/2020 tentang Sistem Keanggotaan Dalam Pelayanan Pemanfaatan Data Hulu Minyak dan Gas Bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Kontrak Bagi Hasil 4 WK Diteken, Total Komitmen Pasti US\$79,1 Juta

Kontrak Bagi Hasil untuk empat wilayah kerja (WK) telah ditandatangani. Total komitmen pasti keempat WK itu adalah US\$79.109.982. Keempat WK yang dimaksud adalah WK Offshore North West Aceh (Meulaboh), WK Offshore South West Aceh (Singkil), WK West Kampar, dan WK Jabung Tengah.

Perinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Wilayah Kerja	Kontraktor	Komitmen Pasti 3 Tahun Pertama Bonus		Bonus Tanda Tangan (US\$)
			Kegiatan	Total Nilai (US\$)	
1.	Offshore North West Aceh (Meulaboh)	ONWA Pte. Ltd.	- G&G - Seismik 3D 500 km ² - 1 sumur eksplorasi	15.000.000	50.000
2.	Offshore South West Aceh (Singkil)	OSWA Pte. Ltd.	- G&G - Seismik 3D 500 km ² - 1 sumur eksplorasi	15.000.000	50.000
3.	West Kampar	Konsorsium PT APG Westkampar Indonesia dan PT SPRL West Kampar	- GGRE - 4 sumur pengembangan - 5 workover sumur - Reaktiasi fasilitas Produksi - Studi G&G - Seismik 2D 250 km - Seismik 3D 50 km ² - 2 sumur eksplorasi - 1 sumur deliniasi - 1 studi POD	32.559.982	250.000
4.	Jabung Tengah	Konsorsium PT Cipta Niaga Gemilang dan PT Raharja Energi Sentosa	- G&G - Akuisisi data seismik 2D 500 km - 2 sumur eksplorasi	16.550.000	150.000
TOTAL				79.109.982	500.000

Keempat WK tersebut ditandatangani pada dua kesempatan berbeda. Penandatanganan kontrak bagi hasil WK Offshore North West Aceh (Meulaboh) dan WK Offshore South West Aceh (Singkil) dilakukan oleh Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada Kamis (5/1/2023).

WK Offshore North West Aceh (Meulaboh) dan WK Offshore South West Aceh (Singkil) merupakan Hasil Lelang Penawaran Langsung Tahap I Tahun 2022. Kedua WK itu adalah Wilayah Kerja Eksplorasi yang ditawarkan Pemerintah melalui Lelang Penawaran Langsung Tahap I Tahun 2022 periode Juli–September 2022 dan

telah diumumkan pemenangnya pada tanggal 3 November 2022.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji menyampaikan, kedua Kontrak Bagi Hasil WK Eksplorasi tersebut berjangka waktu 30 tahun.

Kedua kontrak bagi hasil yang ditandatangani ini menggunakan skema cost recovery, dengan split minyak 60% (Pemerintah) dan 40% (KKKS), serta gas 55% (Pemerintah) dan 45% (KKKS).

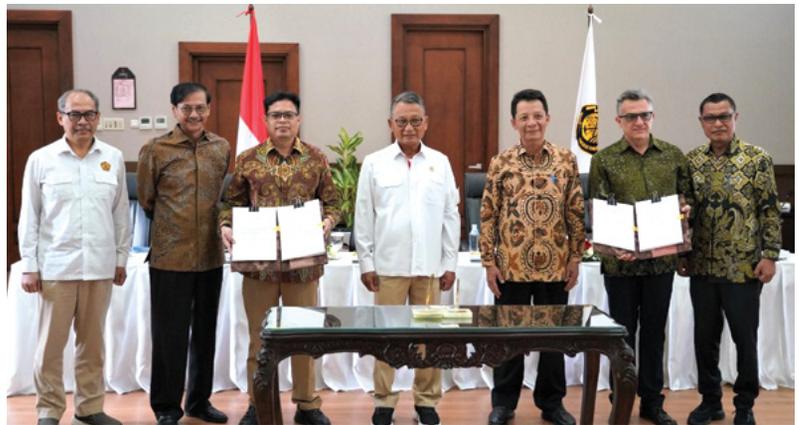
Potensi sumber daya ONWA (Meulaboh) adalah minyak sebesar 800 mmba dan gas 4,8 tcf,

sedangkan OSWA (Singkil) untuk minyak sebesar 1,4 bbo dan gas 8,6 tcf.

Sementara itu, kontrak bagi hasil WK West Kamar dan WK Jabung Tengah ditandatangani oleh SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama di Jakarta pada Rabu (25/11/2023). Kedua WK ini adalah Hasil Lelang Penawaran Langsung Tahun 2022.

“Dengan ditandatanganinya kontrak ini menjadi bukti bahwa hulu migas Indonesia memiliki peluang besar untuk dikembangkan serta memiliki daya tarik yang tinggi bagi investor,” kata Tutuka.

WK West Kamar ditawarkan Pemerintah melalui Lelang Penawaran Langsung Tahun 2022



periode September–Oktober 2022 dan telah diumumkan pemenangnya pada tanggal 23 November 2022.

WK Jabung Tengah ditawarkan Pemerintah melalui Lelang Penawaran Langsung Tahun 2022 periode November–Desember 2022 dan telah diumumkan pemenangnya tanggal 28 Desember 2022.

Kedua kontrak mengguna skema bagi hasil cost recovery. Kontrak bagi hasil WK Produksi, yaitu WK West Kamar, berjangka 20 tahun. Kontrak WK Eksplorasi, yaitu WK Jabung Tengah, berjangka waktu 30 tahun.

WK West Kamar berlokasi di wilayah administrasi Provinsi Riau dan Sumatera Utara. WK ini memiliki potensi sumber daya sebesar 130 mmo. WK Jabung Tengah berlokasi di wilayah administrasi Provinsi Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. WK ini memiliki potensi perkiraan sumber daya sebesar 200 mmo. ●

Bulan K3 Nasional 2023, Ditjen Migas Gencarkan Keselamatan Migas



Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM menggelar berbagai kegiatan dalam rangka peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2023 yang berlangsung pada 12 Januari–12 Februari 2023. Ditjen Migas menjadikan Bulan K3 Nasional sebagai momentum untuk menggenapkan keselamatan migas.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji menegaskan bahwa Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas terus menggaungkan

pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan migas.

“Industri migas merupakan industri yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita sebagai keluarga besar Ditjen Migas yang merupakan pembina dan pengawas pada kegiatan usaha migas untuk memiliki pemahaman serta penerapan budaya K3 yang baik,” kata Tutuka ketika membuka rangkaian kegiatan ini di halaman Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Untuk menyemarakkan bulan K3 Nasional tahun 2023 ini, Ditjen Migas

mengadakan sejumlah kegiatan, seperti Ditjen Migas Walk Through, Breakfast Meeting bersama para Kepala Teknik Migas, dan lomba video K3.

Untuk kegiatan K3 internal pegawai antara lain Emergency Drill, lomba Bersama Turunkan Berat Badan, senam kesegaran jasmani, cek kesehatan, bazaar, dan penampilan Migascoustic.

Puncak acara Peringatan Bulan K3 Tahun 2023 digelar Ditjen Migas di Kantor BBPMGB LEMIGAS, Ciledug,

Selasa (14/2/2023). Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Mirza Mahendra dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2023 berpedoman pada petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 135 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2023.

Tema Bulan K3 Nasional 2023 adalah “Terwujudnya Pekerjaan Layak yang Berbudaya K3 Guna Mendukung Keberlangsungan Usaha di Setiap Tempat Kerja”. Sebagai wujud komitmen terhadap Bulan K3 Nasional 2023, Ditjen Migas mengangkat subtema “Peran Keselamatan Migas Dalam Era Transisi Energi Demi Terwujudnya Pekerjaan Layak yang Berbudaya K3 Guna Mendukung Keberlangsungan Usaha di Setiap Tempat Kerja”.

Mirza memaparkan, terdapat beberapa capaian keselamatan migas selama tahun 2022, yaitu terdapat 18 perusahaan hulu migas dan 23 perusahaan hilir migas yang menerima penghargaan keselamatan migas. Selanjutnya, sebanyak 119 perusahaan migas yang mendapat proper, terdiri dari 17 proper emas, 84 proper hijau, dan 108 proper biru.

Capaian lainnya, telah berhasil disusun rancangan dokumen terkait standardisasi migas, berupa enam rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (RSKKN) dan 10 rancangan standar nasional Indonesia (RSNI).

“Kemudian terdapat 52 Perusahaan Hulu dan enam Perusahaan Hilir Migas yang memanfaatkan gas suar bakar,” tambah Mirza.

Selain itu, terdapat tujuh perusahaan hulu dan 20 perusahaan hilir migas yang telah mencapai lebih dari 10 juta jam kerja aman. Juga delapan



perusahaan hulu dan 16 perusahaan hilir migas yang telah mendapat kategori BAIK (memiliki nilai diatas 76,55) pada Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas.

“Terakhir, telah dilaksanakan pengawasan Objek Vital Nasional (Obvitnas) pada 218 perusahaan hulu dan 98 perusahaan hilir migas,” katanya.

Untuk tahun 2023, Ditjen Migas berkomitmen untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan keselamatan di sektor migas.

Salah satu kegiatan lain yang menjadi bagian Peringatan Bulan K3 Nasional

adalah “Sharing Knowledge Penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dalam Kehidupan Sehari-hari” di Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Lalu, ada pula Kopi Senja Episode 7 yang berlangsung Kamis (2/2/2023) bertema “Kelas Gizi Ditjen Migas : Makan Sehat Untuk Hidup Hebat” dengan menghadirkan narasumber Tri Mutiara Ramdani, S.Gz, M.Sc, selaku Co-founder @dietela.id. Selain itu, kegiatan donor darah juga diadakan yang menjadi bagian peringatan Bulan K3 Nasional. ●



Ditjen Migas Adakan MWT ke Berbagai Lokasi

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) mengadakan Management Walk Trough (MWT) ke berbagai lokasi. Kegiatan ini guna memastikan kegiatan operasional sehari-hari di lingkungan migas berjalan optimal.

Salah satu MWT yang diadakan oleh Ditjen Migas adalah ke Lapangan Akasia Bagus (ABG) yang merupakan bagian dari Asset 3 Pertamina EP (Zona 7) di Cirebon, Jawa Barat, Senin (16/1/2023).

Dalam kesempatan ini, Dirjen Migas Tutuka Ariadji mengimbau agar masing-masing pekerja tetap fokus dan memahami hal-hal apa saja yang menjadi area tanggung jawabnya.

“Mulai dari laju air, temperatur dan sebagainya. Jangan sampai ketika ditanya, malahan bingung. Itu menunjukkan kita kurang fokus dalam bekerja,” ungkapnya.

Terkadang, tambahnya, pekerja terjebak dalam kegiatan rutin sehari-hari sehingga menganggapnya bukan hal yang penting. Padahal sebaliknya, kelengahan atas perubahan dalam kegiatan rutin dapat berakibat fatal antara lain turunnya produksi migas. Maka, perlu ditumbuhkan motivasi bekerja yang mendorong para pekerja melakukan tugasnya semaksimal mungkin.

Keesokan harinya atau Selasa (17/1/2023), rangkaian MWT berlanjut ke Idi Rayeuk, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). MWT kali ini dilakukan di Pemboran Sumur A - 55A - Wilayah Kerja B Kontraktor PT PEMA Global Energi.

Berdasarkan diskusi dengan manajemen Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Tutuka menuturkan, terdapat dua fokus kegiatan hulu migas di NAD. Pertama, mendorong agar BPMA dan Kontraktor agar terus melaksanakan kegiatan eksplorasi intensif untuk penemuan cadangan migas baru.

“Kedua, agar produksi dari lapangan eksisting dapat dioptimalkan (optimasi sumur, fasilitas produksi) sehingga hasil produksi dimaksud dapat digunakan sebagai modal untuk melakukan eksplorasi lanjut di area potensi lainnya,” papar Tutuka.

Pada hari yang sama, MWT juga ditujukan untuk wilayah Sumatera bagian utara. Khusus di wilayah ini, Pemerintah meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mengoptimalkan potensi migas, terutama dalam kegiatan eksplorasi. Tujuannya, agar konsep G&G dari target potensi migas baru dapat dimatangkan kembali sehingga dapat menyusul keberhasilan dari *discovery* pada beberapa sumur eksplorasi sebelumnya.

Selanjutnya, Tutuka menghadiri MWT ke lokasi pengeboran sumur Benuang D-2 (BNG-D2), Wilayah Kerja Pertamina EP Asset 2 Field Adera (Pertamina Hulu Rokan Regional-1 Zona-4), di Prabumulih, Sumatera Selatan, Kamis (19/1/2023).

Dalam kesempatan ini, Tutuka menuturkan, berdasarkan pengalaman dari sejumlah kecelakaan migas, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami dan diambil pelajaran. Salah satunya bila perlu dilakukan tindakan yang tidak biasa dalam suatu operasi migas, maka kegiatan tersebut perlu dikomunikasikan ke seluruh pihak yang terlibat.

Berikutnya, MWT berlangsung di ENI Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (3/3/2023). Pada kesempatan ini, Tutuka menyatakan, performa produksi ENI Indonesia secara terintegrasi itu sudah cukup baik.

“Pemerintah akan membantu upaya-upaya untuk peningkatan produksi, yang membutuhkan kebijakan Pemerintah dalam hal ini Persetujuan Layak Operasi (PLO) dan amandemen Amdal yang membutuhkan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta membantu memonetisasi gas yang selama ini belum termanfaatkan,” kata Tutuka. ●

Inspektur Migas Terus Dalami Kebakaran Rig Bohai-85 WK Jabung

Kebakaran terjadi di Rig Bohai-85, sumur WBD-7, Wilayah Kerja (WK) Jabung, Jambi, Senin (9/1/2023). Kementerian ESDM pun segera menerjunkan Inspektur Migas ke lokasi untuk investigasi lebih dalam.

Hingga saat ini, kegiatan produksi migas di WK yang dioperasikan PetroChina International Jabung Ltd ini masih berlangsung normal, sembari dilakukan investigasi. Dalam peristiwa tersebut, terdapat dua

orang korban luka bakar dan satu orang korban dengan luka ringan.

“Hasil investigasi awal bahwa kejadian kebakaran diawali saat asisten elektrik menyalakan *power shale shaker*. Kemudian, terjadi percikan api yang mengenai lapisan minyak di atas tangki lumpur sehingga terjadi kebakaran. Kemudian, telah diambil tindakan pemadaman api menggunakan *fire pump* dan sumur di-*shut-in* sementara. Kebakaran berhasil dipadamkan oleh tim *firefighting* dalam waktu 15 menit,” papar Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Mirza Mahendra, Rabu (11/1/2023).

Mirza melanjutkan, investigasi oleh Tim Inspektur Migas yang ke lokasi sejak Selasa (10/1/2023), masih berlanjut dan akan dilaporkan secara lengkap setelah pemeriksaan selesai seluruhnya. ●



SPPBJ Palsu Beredar, Masyarakat Diimbau Waspada

Dokumen palsu terkait Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) beredar di masyarakat. Masyarakat diimbau mewaspadai SPPBJ palsu tersebut yang mencatut pejabat dan instansi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian ESDM.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan

Gas Bumi Setyorini Tri Hutami. Imbauan muncul setelah Setyorini menerima aduan dari masyarakat terkait beredarnya dokumen palsu tentang surat Penunjukan Penyedia Pelaksanaan Paket Pengadaan Bahan Pangan Tenaga Honorer Direktorat Jenderal Migas TA 2022 Nomor 0853/SPPBJ.2114/PPK-VII Tanggal 15 Januari 2023. Dalam surat tersebut, pihak yang bertanda tangan atas nama

Lauty Dwita Santy, S.T., M.Sc. dan ditujukan kepada PT UKA Mandiri.

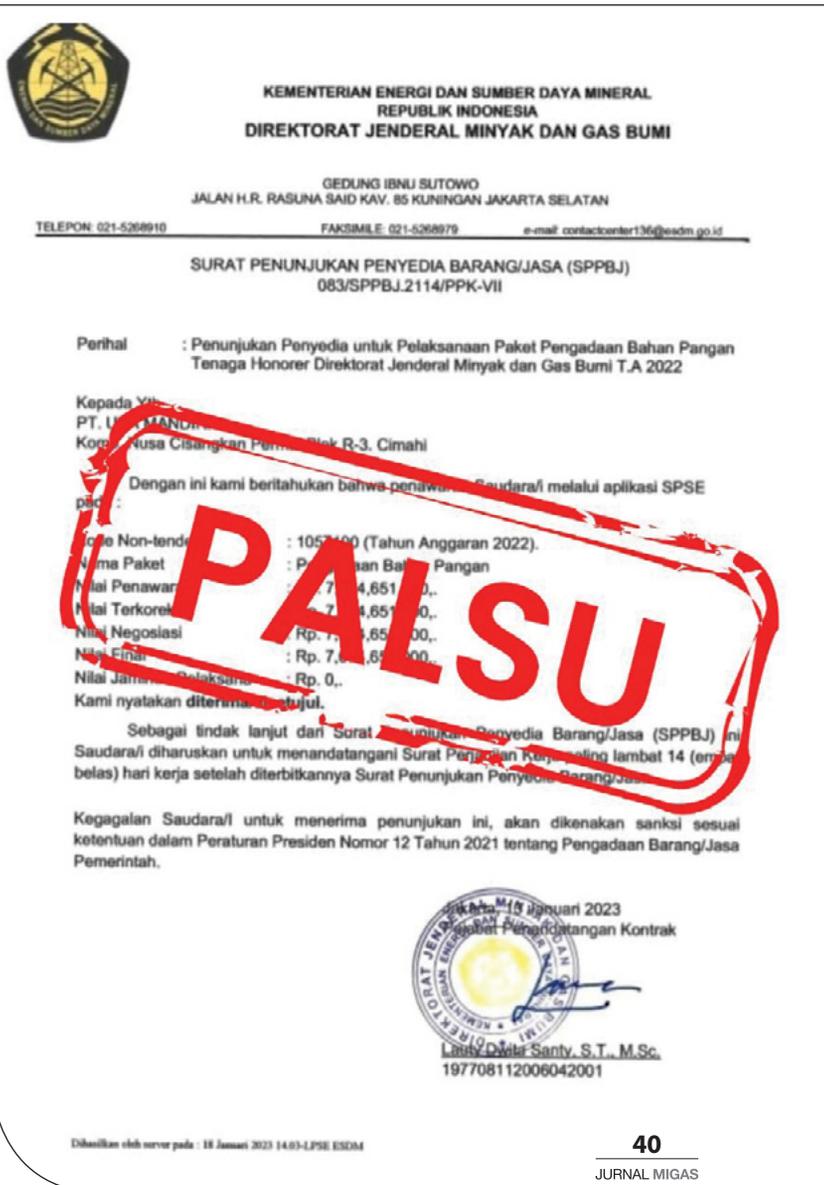
Selain itu, pengaduan serupa juga diterima dari masyarakat terkait surat palsu yang mencatut nama Direktur Pembinaan Program Migas Mustafid Gunawan tentang Penunjukkan Penyedia Pelaksanaan Paket Pengadaan Mesin dan Konverter Kit BBG Petani Sasaran Nomor 037/SPPBJ.0173/PPK-VII tanggal 20 Desember 2022.

Menanggapi hal-hal tersebut, Ditjen Migas telah melakukan penelusuran bersama pihak terkait dan ditemukan fakta bahwa kedua dokumen tersebut terbukti palsu.

“Dengan ini kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kedua dokumen tersebut terkonfirmasi sebagai surat palsu. Dokumen tersebut dibuat oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dan untuk kepentingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Setyorini di Gedung Ibnu Sutowo Jakarta, Jumat (20/1/2023).

“Apabila masyarakat menerima SPPBJ yang terkait dengan nama Ditjen Migas, agar lebih yakin dapat dilakukan pengecekan keaslian dokumen dengan menghubungi kanal pengaduan resmi Contact Center 136 KESDM atau aplikasi SP4N Lapor,” tambahnya.

Setyorini juga menghimbau jajarannya agar merespon dengan cepat dan tanggap terkait pengaduan yang diterima. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kerugian bagi masyarakat umum maupun institusi Ditjen Migas. ●



Kopi Senja Episode 8

Kupas Lebih Dalam ESG

Kopi Senja Episode 8 digelar secara hybrid di Ruang Strategis, Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, Senin (20/3/2023). Episode kali ini membahas lebih dalam tentang istilah ESG atau *Environmental, Social and Governance*.

Bertindak sebagai narasumber dalam Kopi Senja Episode 8 adalah Kepala Balai Besar Pengujian Migas LEMIGAS Ariana Soemanto; Alstair Bharata selaku *Director, Risk Advisory* PT Deloitte Konsultan Indonesia; dan Associate Director, Climate & Sustainability Advisory PT Deloitte Konsultan Indonesia Efraim Sitinjak.

Dalam kesempatan ini, Alstair Bharata menyampaikan, *ESG strategy* saling melengkapi dengan *corporate strategy*.

“*Corporate strategy* lebih menekankan ke profit, seperti peluncuran produk baru. Sedangkan *ESG strategy* melengkapi *corporate strategy* karena melakukan *scanning* untuk *stakeholders* utama dari sisi lingkungan, *social*, dan tata kelola. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengintegrasikan antara *corporate strategy* dan ESG,” paparnya.

“Beberapa keuntungan perusahaan melakukan ESG ini, antara lain meningkatkan reputasi perusahaan, meminimalisir risiko baik dari sosial seperti penolakan masyarakat dan kecelakaan kerja. Oleh karena itu perusahaan mendorong kepatuhan terhadap ESG,” kata Efraim Sitinjak.

Keuntungan lain dari penerapan ESG adalah meningkatkan *competitive advantage* karena investor semakin melihat ESG sebagai komponen investasinya.

Manfaat positif ESG juga disampaikan Ariana Soemanto. Menurut dia, ESG untuk perusahaan dapat mendukung tujuan global. Khusus bagi perusahaan, ESG memberikan *benefit* internal atau eksternal. Saat ini, ESG tidak wajib, namun akan positif jika diterapkan oleh badan usaha, termasuk perusahaan migas karena akan membuat perubahan besar untuk mewujudkan Indonesia yang berkelanjutan.

“Keuntungan bagi badan usaha atau perusahaan yang menerapkan ESG adalah lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan, syarat IPO, membuat reputasi yang baik di dunia internasional, *engage* dengan *stakeholders* lebih bagus, nilai saham bisa meningkat dan *comply* dengan kebijakan Pemerintah,” paparnya.



CAPAIAN SEKTOR ESDM TAHUN 2022 & PROGRAM KERJA TAHUN 2023

Jakarta, 30 Januari 2023



Capaian Ditjen Migas Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) menorehkan kinerja positif sepanjang tahun 2022. Salah satunya adalah penawaran wilayah kerja (WK) migas sebanyak 13 WK atau 130% di atas target 10 WK.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji di Jakarta, Senin (30/1/2023), memaparkan, pengumuman Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2022 dilakukan dalam dua tahap. Penawaran tahap I yang melelang tujuh WK ditetapkan empat WK Pemenang. Penawaran tahap II memiliki dua pemenang lelang, yaitu WK Jabung Tengah dan WK Paus. Empat WK lainnya masih dalam proses lelang.

Pada tahun 2022 dilakukan penandatanganan lima Kontrak Kerja Sama (KKS) yang terdiri dari empat kontrak hasil lelang tahun 2021 dan satu kontrak hasil lelang tahun 2022.



Pada tahun lalu, Ditjen Migas mencatat, pemanfaatan gas untuk dalam negeri mencapai 68%, PNPB SDA Migas sebesar Rp148,70 triliun atau 106,90% di atas target, pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) sebanyak

40.877 sambungan rumah (SR) dan pendistribusian konverter kit untuk nelayan dan petani masing-masing 30.000 paket.

Kemudian, *lifting* migas mencapai 612 mbopd untuk minyak (87% dari target



703 mbopd) dan 955 mboepd (92,18% dari target 1003 mboepd) untuk gas bumi, dengan ICP rata-rata sebesar US\$97,03 per barel (97% dari target US\$100 per barel).

Penerimaan negara terutama PNBP SDA Migas tahun 2022 mencapai Rp148,70 triliun atau 106,90% di atas target. Dengan bergabungnya Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS pada tahun 2022, maka penerimaan negara dari sektor PNBP BLU telah mencapai Rp188 miliar atau 121,29% dari target Rp155 miliar.

Lalu, investasi migas tahun 2022 mencapai US\$13,90 miliar dari target US\$17,01 miliar. Realisasi anggaran Ditjen Migas hingga akhir Desember tahun 2022 telah mencapai 96,32%.

Pada tahun 2022, Ditjen Migas terus membangun infrastruktur, seperti jargas sejumlah 40.877 SR yang tersebar di 12 kabupaten/ kota dari target 40.777 SR. Selain itu, pendistribusian konverter kit untuk nelayan sebanyak 30.000 paket yang tersebar di 17 provinsi dan konverter kit

untuk petani sebanyak 30.000 paket yang tersebar di 16 provinsi.

“Tak hanya itu, telah dibangun juga pipa gas Semarang-Batang Tahap I yang hingga Desember 2022 telah mencapai 67,33%,” tambah Tutuka.

Ditjen Migas telah merumuskan enam RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dan 10 RSNi (Rancangan Standar Nasional Indonesia). Juga telah dilaksanakan pengawasan Obvtnas sebanyak 218 objek pada kegiatan usaha hulu dan 98 obyek pada kegiatan usaha hilir migas.

Rencana kerja 2023 Rencana kerja Ditjen Migas tahun 2023 antara lain:

- Penawaran WK Migas ditargetkan sebanyak 10 WK.
- Penerapan kebijakan melalui pemberian insentif dan PI 10% akan terus dilaksanakan.
- Pemanfaatan gas domestik ditingkatkan menjadi 67%.
- Target *lifting* migas untuk minyak sebesar 660 mbopd dan gas bumi

sebesar 1.100 mboepd, dengan ICP rata-rata sebesar US\$90 per barel.

- PNBP SDA Migas tahun 2023 ditargetkan Rp131,2 triliun.
- Target PNBP BLU Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS Rp150 miliar.
- Investasi migas ditargetkan US\$17,4 miliar.
- Pendistribusian konverter kit untuk nelayan sebanyak 20.000 paket di 13 provinsi dan untuk petani sebanyak 30.000 paket di 13 provinsi.
- Pembangunan Pipa Transmisi Ruas Semarang-Batang tahap I masih akan terus dilanjutkan dan seiring dengan akan dibangunnya ruas Cirebon-Semarang tahap II.
- Penyaluran minyak tanah dipatok sebesar 0,5 juta kl, Solar sebanyak 17 juta kl, dan LPG sebesar 8 juta MTon.
- Ditjen Migas tetap berkomitmen memberikan pelayanan prima melalui optimalisasi penyelesaian perizinan dengan target SLA delapan hari untuk setiap perizinan hulu dan perizinan hilir migas. ●



Kementerian ESDM Resmikan 3.405 SR Jargas Tanjung Jabung Barat

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) meresmikan aktivasi jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) sebanyak 3.405 sambungan rumah (SR) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Selasa (7/2/2023).

Infrastruktur jargas Tanjung Jabung Barat dibangun dengan dana APBN tahun 2022. Pasokan gas berasal dari Wilayah Kerja (WK) Petrochina International Jabung dengan volume alokasi gas sebesar 0,2 mmscfd.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Laode Sulaeman dalam peresmian yang dilaksanakan di Kantor Lurah Kelurahan Sriwijaya mengatakan, Pemerintah melalui pembiayaan APBN telah melaksanakan pembangunan jargas sejak tahun 2009. Hingga tahun 2022, telah dilaksanakan pembangunan sebanyak 703.308 SR yang terdistribusi di 17 provinsi dan 64 kabupaten/kota.

“Manfaat dari gas bumi seperti mengurangi emisi gas buang yang akan membuat penurunan tingkat pencemaran lingkungan secara signifikan. Pembangunan jargas untuk rumah tangga menjadi bentuk perlindungan lingkungan untuk generasi anak-cucu kita yang akan datang. Pembangunan jargas merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa,” Laode menekankan.

Laode juga mengapresiasi pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat Tanjung Jabung Barat atas dukungan dan bantuannya

mengamankan dan memelihara infrastruktur jargas tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM atas telaksananya pembangunan jargas. Ia mengharapkan agar pembangunan dilanjutkan kembali karena masih banyak warganya yang belum mendapatkan fasilitas tersebut. Masyarakat Tanjung Jabung Barat sangat antusias menggunakan jargas karena menghemat biaya bahan bakar dibandingkan menggunakan LPG 3 kg. ●



Warga Semarang Antusias Nikmati Jargas

Warga Semarang antusias setelah menikmati jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas). Masyarakat diharapkan dapat menjaga fasilitas jargas yang telah terpasang di wilayahnya agar manfaatnya bisa berkelanjutan.

Hal ini terungkap saat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji mengunjungi lokasi pembangunan jargas di Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Kamis (6/4/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Migas mengunjungi Regulating Station (RS) dan beberapa rumah yang gasnya sudah mengalir. Dirjen Migas berharap fasilitas ini bermanfaat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat.

“Semoga bermanfaat dan tolong dijaga dengan baik. Jargas ini harganya lebih murah dibandingkan LPG, ramah lingkungan, dan tidak perlu repot lagi kalau kehabisan LPG karena mengalir 24 jam,” kata Tutuka.

Ia mengingatkan agar masyarakat segera melapor ke nomor telepon yang telah ditentukan apabila terjadi sesuatu dengan jargas di rumahnya.

“Makasih ya pak. Senang sekali kami dapat jargas, terutama bagi saya yang di hari biasa berjualan di kantin pelabuhan. Ini lebih enak karena tidak khawatir kehabisan. Kalau pakai LPG, sewaktu-waktu bisa habis, misalnya malam kan susah,” ungkap Ibu Sunowo, warga setempat.

Hal senada juga disampaikan Faizah yang sebelumnya sudah mengenal jargas di rumah orangtuanya.

“Ibu saya sudah empat tahun pakai jargas, lebih murah, dan *nggak* pernah ada masalah. Apalagi Ibu saya sudah berusia 80 tahun. Jadi, dengan adanya jargas *nggak* perlu repot atau takut kehabisan gas. Dengan pengalaman itu, begitu ada pendaftaran jargas di sini, saya langsung daftar,” ujar Faizah.

rumah (SR) di Kota Semarang. Jargas yang dibangun tahun 2022 di Kota Semarang ini mendapat pasokan gas dari CPP Gundih, PT Pertamina EP 4 Cepu, dengan alokasi sebesar 0,25 mmscf. Pengelolaan jargas dilakukan oleh PT PGN Tbk. ●

Untuk tahun 2022, Pemerintah membangun 3.367 sambungan



Diresmikan, Dua Proyek Gas Dukung Pasokan Gas Jawa Tengah dan Jawa Timur

Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Jambaran Tiung Biru (JTB), diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin di Ballroom Sheraton Hotel and Towers, Surabaya, Rabu (8/2/2023).

Peresmian JTB berbarengan dengan Lapangan Gas MDA-MBH. Pengoperasian lapangan migas ini diharapkan dapat meningkatkan pasokan gas dan menjamin ketersediaan migas bagi industri di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Semoga kedua proyek ini mampu meningkatkan pasokan gas secara signifikan, dan menjamin ketersediaan migas bagi industri di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah sehingga turut memberikan nilai tambah dan meningkatkan penerimaan negara," ungkap Wapres.

Lebih lanjut Wapres mengharapkan agar pengoperasian proyek-proyek migas tersebut dilakukan secara baik dengan memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengapresiasi kesediaan Wakil Presiden untuk meresmikan dua proyek strategis ini. Hal ini menurut Arifin menunjukkan dukungan serius dari Pemerintah terhadap sektor hulu migas yang memiliki peran penting dalam menyediakan energi, menghasilkan penerimaan negara, sekaligus secara simultan menciptakan *multiplier effect* bagi industri dalam negeri lainnya.

Penghargaan dan apresiasi yang sama juga disampaikan Arifin kepada SKK Migas, Pertamina EP Cepu, dan HCML yang telah bekerja keras mewujudkan dua proyek ini.

"Lapangan Gas Jambaran Tiung Biru (JTB) merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang dioperasikan oleh Pertamina EP Cepu (PEPC) dan telah *on stream* pada 20 September 2022. Lapangan gas JTB berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur," ujar Arifin.

"Kapasitas produksi Lapangan Gas JTB adalah 192 mmscfd yang dialokasikan untuk PLN, industri di Jawa Tengah dan Jawa Timur, PGN ke Jargas Lamongan dan PT Petrokimia Gresik (PKG)," sambungnya.

Mengenai Lapangan Gas MDA dan MBH berlokasi di Madura, Provinsi Jawa Timur. Lapangan ini akan menghasilkan gas sejumlah 120 mmscfd sehingga total produksi lapangan gas JTB dan MDA & MBH adalah 312 mmscfd. ●





Indonesia Ajak Investor Kembangkan Migas Berteknologi Bersih Dalam India Energy Week

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji menghadiri The 9th Asian Ministerial Energy Roundtable (AMER). Pada kesempatan ini, Indonesia mengundang investor untuk mengembangkan migas melalui pemanfaatan teknologi maju yang lebih bersih untuk meningkatkan ketahanan energi.

AMER merupakan bagian dalam perhelatan India Energy Week (IEW) di Bengaluru, India, 6–8 Februari 2023. The 9th AMER yang digelar tanggal 7 Februari 2023 mengambil tema “Mapping Stable & Secure Energy Pathways: Energy Security, Justice, Growth and Innovation”.

Tutuka Ariadji tampil sebagai panelis dalam Panel 1 Addressing Energy Security and Justice Challenges in Turbulent Times. Tutuka menyampaikan, pentingnya peranan gas bumi dalam transisi energi Indonesia seiring dengan pengembangan sumber energi terbarukan, seperti hidro, geotermal, solar, *biofuel*, dan *hydrogen*.

Dalam kesempatan ini, Tutuka mengajak investor bersama-sama mengembangkan energi transisi di Indonesia.

“Sumber daya gas Indonesia masih mencukupi untuk beberapa dekade ke depan dan memainkan peran kunci sebagai energi transisi menuju era energi bersih. Hingga November 2022, total penyaluran gas bumi mencapai sekitar 5,500 bbtud di mana sebanyak 68% digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Terutama untuk industri dengan konsumsi sekitar 1.600 bbtud (29%). Sedangkan total ekspor gas bumi, yaitu gas pipa dan LNG sekitar 1.800 bbtud,” paparnya.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas nasional, lanjut Tutuka, perlu dilakukan peningkatan kapasitas industri dan peningkatan nilai tambah, seperti petrokimia dengan percepatan program hilirisasi dengan kebijakan substitusi impor untuk memacu kontribusi industri dalam negeri.

Sementara untuk pengembangan industri hilir, Indonesia menetapkan dua konsep. Pertama, pengembangan *demand* di dekat sumber gas dan infrastruktur dengan prinsip distribusi lokal untuk energi dan *feedstock* sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan nilai tambah serta *multiplier effect* perekonomian nasional.

Kedua, pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung penyaluran gas bumi domestik sesuai kebutuhan antara lain program konversi solar ke gas dan pembangunan dua ruas pipa yang menghubungkan Sumatera Utara sampai dengan Jawa Timur yang panjangnya lebih dari 2.000 km.

Selanjutnya, sejalan dengan isu penurunan emisi dan target produksi, implementasi CCS/CCUS akan menjadi kritikal di sektor migas. Saat ini, terdapat 16 proyek CCS/CCUS di Indonesia. Proyek terbesar berlokasi di Papua yang akan *on stream* pada tahun 2026/2027. ●

Dirjen Migas Lantik 30 Pejabat Fungsional



Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Aridji melantik dan mengambil sumpah 30 pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dan Badan Geologi, Rabu (15/2/2023).

Dirjen Migas meminta agar para pejabat tersebut mampu mengemban dan menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

“Jabatan merupakan amanah. Untuk itu saudara-saudara harus mampu mengemban dan menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya,” kata Dirjen Migas.

Tutuka juga meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian ESDM harus senantiasa dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu Ber-AKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.



Para pejabat fungsional yang dilantik ini terdiri dari 29 orang dari Ditjen Migas dan 1 orang dari Badan Geologi. Pelantikan ini juga disaksikan oleh para pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Migas.

Sebelumnya, pada Selasa (7/2/2023), Sekretaris Jenderal Kementerian

ESDM Rida Mulyana melantik 189 PNS di lingkungan Kementerian ESDM. Rida berpesan, agar seluruh PNS baru terus meningkatkan kompetensi yang dimiliki, termasuk menambah wawasan melalui pengalaman yang akan diterima ketika bekerja sebagai PNS di Kementerian ESDM. ●



Ditjen Migas Gelar Penghitungan Bersama Realisasi Lifting Migas Triwulan IV Tahun 2022

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) menggelar Penghitungan Bersama Realisasi Lifting Migas Triwulan IV Tahun 2022 di Novotel Hotel, Tangerang, Kamis (23/2/2023) dan Jumat (24/2/2023). Kegiatan ini bertujuan mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi dalam kegiatan usaha hulu migas,

Penghitungan Bersama Realisasi Lifting Migas Triwulan IV Tahun 2022 dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan, SKK Migas, BPMA, KKKS, juga sejumlah pemerintah daerah (pemda) penghasil migas.

“Transparansi sudah menjadi komitmen kita bersama. Kebutuhan informasi sudah menjadi kebutuhan publik, terutama bagi daerah yang terdapat kegiatan usaha hulu migas. Untuk itu, kesamaan pemahaman

dalam hal ini terkait *lifting* migas, mutlak diperlukan dan melihat secara arif ketentuan peraturan yang berlaku yang pada akhirnya dapat menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” kata Direktur Pembinaan Program Migas yang diwakili Koordinator Penerimaan Negara dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak dan Gas Bumi Heru Windiarto dalam pertemuan tersebut.

Kegiatan penghitungan bersama realisasi *lifting* migas yang secara berkala dilaksanakan Ditjen Migas bersama instansi terkait dan daerah penghasil migas ini menjadi ajang penyamaan persepsi mengenai *lifting* migas di daerah masing-masing. Selain itu, acara ini juga merupakan sarana bagi KKKS berdiskusi dan meminta dukungan pemda terhadap kegiatan operasi migas yang dilakukannya.

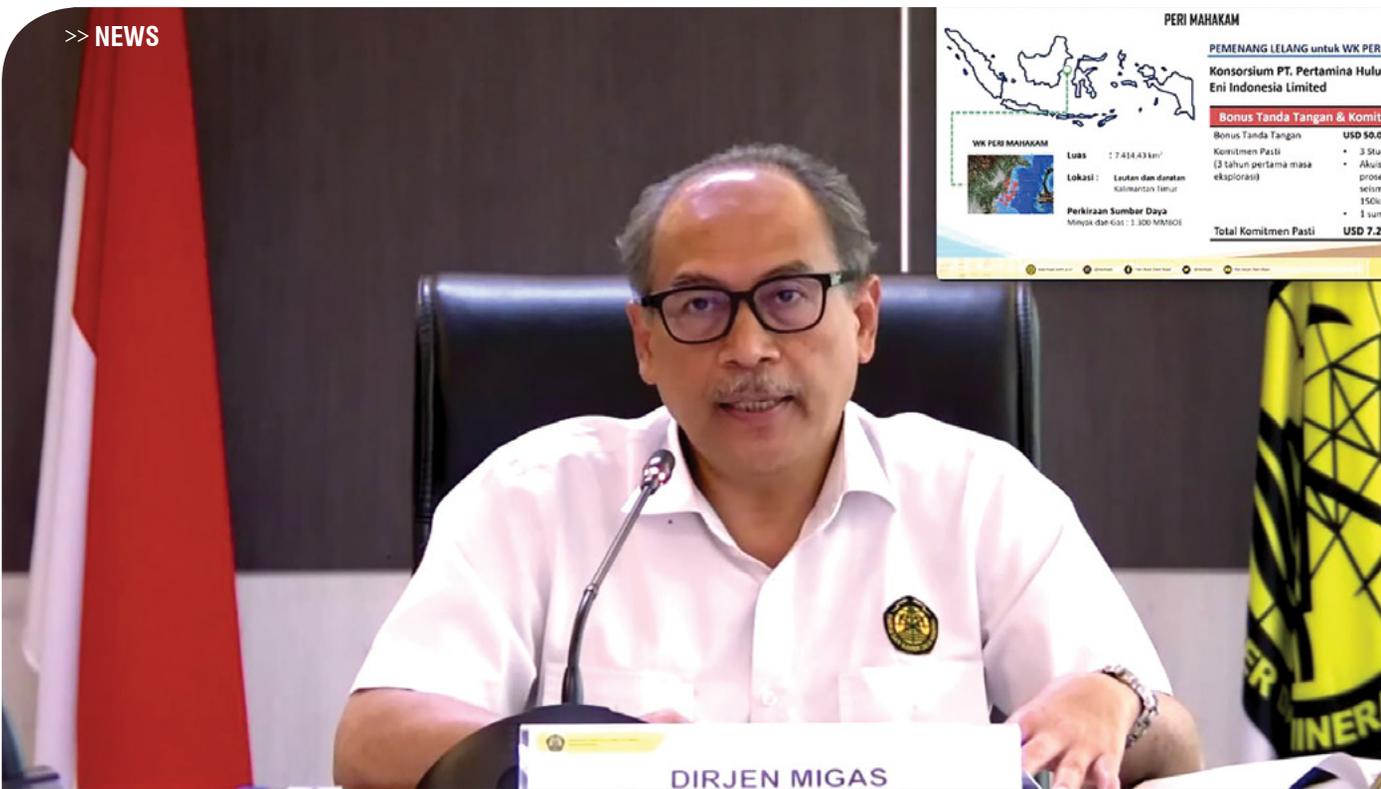
“Melalui pertemuan semacam ini, kita juga berupaya memfasilitasi KKKS berkomunikasi langsung dengan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan yang timbul di lapangan. *Alhamdulillah* dengan koordinasi langsung ini, sejumlah kendala dapat diselesaikan,” papar Heru.

Berdasarkan data perhitungan *lifting* migas triwulan IV ini, terdapat sejumlah daerah yang *lifting* migasnya di atas target. Sebaliknya, penurunan *lifting* terjadi di beberapa daerah antara lain lantaran lapangan migas yang sudah tua dan proses *maintenance* peralatan.

Hasil penghitungan realisasi *lifting* migas ini selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk dipergunakan sebagai dasar penghitungan PNBP SDA Migas dalam rangka penghitungan dan penyaluran dana bagi hasil SDA migas tahun 2022.

Data realisasi *lifting* migas disusun berdasarkan laporan KKKS dan SKKMIGAS kepada Ditjen Migas, serta daerah penghasil. Dalam menghitung *gross revenue*, didasarkan atas harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada periode bulan yang bersangkutan. ●





Ini Pemenang Lelang WK Sangkar, Bunga dan Peri Mahakam

Pemenang lelang Wilayah Kerja (WK) Sangkar, Bunga, dan Peri Mahakam telah ditetapkan oleh Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, Rabu (22/2/2023). Sebelumnya, para pemenang mengikuti Penawaran Langsung WK Migas Tahap II Tahun 2022 untuk Wilayah Kerja Sangkar, Bunga dan Peri Mahakam.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji menyampaikan, para pemenang

ditetapkan berdasarkan hasil penilaian atas Dokumen Partisipasi.

Tutuka menjelaskan, Wilayah Kerja Bunga berlokasi di lautan Provinsi Jawa Timur dengan luas area 8.500 km2 dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi sebesar 1.300 mmboc.

Wilayah Kerja Peri Mahakam berlokasi di lautan dan daratan Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas area 7.414,43 km2 dan potensi sumber daya

minyak dan gas bumi sebesar 1.300 mmboc.

Sementara itu, Wilayah Kerja Sangkar berlokasi di lautan dan daratan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, dengan luas area 8.122,58 km2 dan potensi sumber daya minyak bumi sebesar 130 mmboc dan gas bumi sebesar 300 bcf.

Para pemenang lelang ini adalah sebagai berikut:

No.	Wilayah Kerja	Kontraktor	Komitmen Pasti 3 Tahun Pertama Bonus		Bonus Tanda Tangan (US\$)
			Kegiatan	Total Nilai (US\$)	
1.	Bunga	Konsorsium PT Pertamina. Hulu Energi & Posco International Corporation	- Studi G&G - Akuisisi dan reprocessing data seismik 3D 350 km2	4.000.000	100.000
2.	Peri Mahakam	Konsorsium PT Pertamina Hulu Energi & Eni Indonesia Limited	- 3 studi G&G - Akuisisi dan prosesing data seismik 3D 150 km2	7.200.000	50.000
3.	Sangkar	PT Saka Eksplorasi Timur	- 1 sumur eksplorasi - 2 studi G&G - Akuisisi dan prosesing data seismik 3D 150 km2	3.000.000	50.000
TOTAL				14.200.000	200.000

Divestasi Blok Masela Diharapkan Kelar Tahun 2023



Pemerintah mengharapkan hak partisipasi atau participating interest (PI) Shell di Proyek LNG Blok Masela rampung di tahun ini. Saat ini, divestasi Blok Masela yang terletak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, masih terus berlangsung.

“Perkembangan (divestasi) Blok Masela sampai saat ini cukup bagus dan kami antusias untuk melihat perkembangannya dan (diharapkan) bisa diselesaikan tahun ini,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji dalam acara Energy Corner di CNBC TV, Senin (27/2/2023).

Blok Masela merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)

yang hak partisipasinya dipegang oleh Inpex dan Shell. Namun, Shell kemudian menyatakan keinginan untuk melepas hak partisipasinya di Lapangan Abadi sehingga harus dicari penggantinya. Sebelum menarik diri dari Blok Masela, Shell menguasai 35% saham participating interest (PI). Sisanya dikuasai Inpex sebesar 65%.

Sejumlah perusahaan migas menyatakan berminat menggantikan Shell di blok tersebut antara lain PT Pertamina (Persero). Menurut Dirjen Migas, perusahaan pelat merah tersebut serius berkeinginan menjadi mitra Inpex.

“Pertamina serius dalam menawarkan diri mereka jadi partner Inpex.

Memang sekarang masih proses *b to b*, sekarang masuk tahap *binding offer*,” papar Tutuka.

Hingga saat ini, jadwal produksi Blok Masela belum mengalami perubahan, yaitu tahun 2027. Namun demikian, Inpex sebagai operator mengajukan perubahan rencana pengembangan lapangan (PoD). Dengan begitu, bisa terjadi perubahan target.

Lapangan Abadi Blok Masela sendiri memiliki cadangan terbukti mencapai 18,5 triliun kaki kubik (tcf) dan 225 juta barel kondensat. ●

Pemerintah Siapkan Strategi Amankan Pasokan BBM Antisipasi Perang Rusia-Ukraina Berkepanjangan



Pemerintah Indonesia tetap bersikap hati-hati dan menyiapkan strategi untuk mengamankan pasokan bahan bakar minyak (BBM) sebagai imbas perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan.

Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji, fluktuasi harga minyak mentah tahun 2023 diperkirakan berkisar antara US\$80–90 per barel. Sementara terkait pasokan minyak mentah, Indonesia sebagian besar mengimpor dari Saudi Arabia dan Nigeria yang tidak berhubungan langsung dengan negara konflik. Sedangkan untuk BBM, Indonesia mengimpor dari Singapura dan Malaysia.

“Kedua negara tersebut juga tidak berhubungan langsung dengan

negara konflik,” kata Tutuka di Jakarta, Senin (27/2/2023).

Meski tidak terdampak langsung dengan negara yang berperang, Indonesia tetap bersikap hati-hati.

“Kita sampai saat ini bergerak cukup hati-hati, meski tidak berdampak langsung dari (negara) konflik,” lanjut Tutuka.

Tutuka menuturkan, akhir-akhir ini produksi minyak Indonesia menunjukkan peningkatan. Dari sebelumnya 600.000 barel per hari, meningkat jadi sekitar 610.000 hingga 630.000 barel per hari. Hal ini lantaran optimasi produksi yang dilakukan KKKS berjalan dengan baik, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk keamanan pasokan BBM dan gas jangka menengah dan panjang, Pemerintah telah mengidentifikasi potensi migas di wilayah utara Sumatera, Bali, Lombok, Selat Makassar, Maluku, dan Papua.

“Dengan banyaknya potensi tersebut, kami berupaya keras memanfaatkan sumber daya gas bumi ini sebagai strategi jangka menengah untuk menyelesaikan persoalan impor BBM. Dengan banyaknya Konversi BBM ke Gas akan mengurangi impor BBM,” pungkasnya. ●

Ditjen Migas Investigasi Menyeluruh Kebakaran TBBM Plumpang

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) sudah menurunkan tim dan melakukan inspeksi area Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang milik PT Pertamina Patra Niaga Jakarta Utara, yang terbakar pada Jumat malam (3/3/2023).

Tak hanya itu, Ditjen Migas juga akan melakukan investigasi menyeluruh. Tujuannya mencari *root causes* kejadian kebakaran guna perbaikan ke depannya. Pertamina juga diminta untuk melakukan analisa risiko terhadap seluruh fasilitas yang dimiliki.

“Kami meminta Pertamina melakukan analisa risiko terhadap seluruh fasilitas yang dimiliki,” ungkap Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi, Sabtu (4/3/2023).

Terkait penanganan korban, Kementerian ESDM terus

mendorong Pertamina dalam penanganan korban kebakaran dengan memberikan jaminan penggantian seluruh biaya perawatan di rumah sakit.

“Kami sepenuhnya mendukung Pertamina dalam memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia,” lanjutnya.

Kepada keluarga korban, Agung mengatakan bahwa Kementerian ESDM menyampaikan duka cita yang mendalam.

“Keluarga besar Kementerian ESDM berduka cita yang mendalam atas kejadian ini, dan kepada keluarga masyarakat yang menjadi korban, semoga diberikan ketabahan dalam menjalaninya,” tutup Agung.

TBBM Plumpang merupakan salah satu fasilitas hilir minyak dan gas bumi yang penting. Pasalnya,

sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia disuplai dari TBBM Plumpang.

Adapun stok BBM pasca insiden kebakaran di TBBM Plumpang dinilai masih aman. Operasi penyaluran BBM untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya akan tetap dilayani melalui Depot Plumpang.

Sebagai antisipasi, penyaluran juga sudah di-back up dari TBBM terminal terdekat, yaitu TBBM Tanjung Gerem, TBBM Cikampek, dan TBBM Ujung Berung. Pasokan BBM ke TBBM Plumpang juga diamankan melalui dukungan dari Kilang Cilacap dan Balongan yang disalurkan lewat laut ke TBBM Plumpang. ●



Pemerintah Bangun 4.600 SR Jargas di Wajo

Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, membangun sebanyak 4.600 sambungan rumah (SR) di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Infrastruktur ini dibangun dengan dana APBN tahun 2022.

Jargas yang dibangun ini tersebar di Kecamatan Gilireng (2.171 SR), Kecamatan Tanasitolo (878 SR), Kecamatan Tempe (438 SR), dan Kecamatan Maniangpajo (1.113 SR). Pasokan gas berasal dari Energy

Equity Epic Sengkang Pty. Ltd sebesar 0,6 mmscf.

Jargas di Kecamatan Gilireng menjadi lokasi pertama yang diresmikan penggunaannya, Senin (6/3/2023). Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Laode Sulaeman, Anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris, dan Bupati Wajo Amran Mahmud menghadiri peresmian tersebut.

“Program pembangunan jargas adalah salah satu program yang mendukung diversifikasi energi. Program ini dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi gas bumi melalui pipa untuk sektor rumah tangga dengan menggunakan dana APBN,” ujar Laode.

Pemerintah mengharapkan agar pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Wajo ikut mengamankan serta memelihara infrastruktur jargas yang dibangun dengan uang rakyat ini.

Andi Yuliani Paris menyampaikan, Kecamatan Gilireng berhasil mendapatkan jatah terbesar, yaitu 2.171 SR. Dibandingkan dengan jumlah penduduk, hal ini menunjukkan hampir 100% rumah di daerah tersebut telah dipasang jargas.

Hingga tahun 2022, telah dilaksanakan pembangunan sebanyak 703.308 SR dengan biaya APBN yang terdistribusi di 17 provinsi, 63 kabupaten/kota. ●



Indonesia-Korea Selatan Sepakat Amandemen Kerja Sama Anjungan di Kaltim

Kementerian Koordinator Maritim Investasi, Kementerian ESDM dan Kementerian KKP mewakili Pemerintah Indonesia dalam penandatanganan *Amandement Implementing Agreement on Pilot Project for Decommissioning and Rig-to-Reef Re-Utilization of Offshore Plants in Indonesia* di Hotel Raffles Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Amandemen ini terkait kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan di subsektor migas. Penandatanganan amandemen ini merupakan bagian dari rangkaian acara *Joint Committee Meeting on the Offshore Plant Service Industry* antara kedua negara.

Penandatanganan amandemen tersebut juga merupakan upaya untuk melaksanakan proyek percontohan dalam rangka pembongkaran dan pemanfaatan kembali tiga anjungan yang berada di Kalimantan Timur (Kaltim). Mengingat satu dan lain hal, saat ini terjadi perubahan jumlah anjungan yang dapat dibongkar, yakni hanya satu anjungan (ATTAKA-EB).

Adapun upaya beberapa Program *Decommissioning Platform* ke depan, antara lain:

- Melakukan updating *database platform* yang akan dilakukan *decommissioning*.
- Mengembangkan *guideline* untuk pelaksanaan *decommissioning* yang aman, efektif dan efisien.
- Menyiapkan *Decommissioning Roadmap*.
- Membangun National *Decommissioning Master Plan*.
- Melaksanakan *decommissioning project* di Wilayah Kerja West Seno dan Bangka.



- Mengembangkan metode dan teknologi *decommissioning platform* yang efisien.
- Kolaborasi antar Industri dalam pembongkaran/pemanfaatan *platform* yang sudah tidak beroperasi.

Beberapa alternatif *reutilization* bagi *platform* yang tidak beroperasi, antara lain:

- *Rig to reef (pilot project platform Attaka-B* dengan Pemerintah Korea).

- *Rig to Fish Farm* yang saat ini sedang dibahas oleh Pertamina dengan KKP/BRIN).
- *Rig to CCS (Carbon Capture Storage)*.
- *Rig to LNG Terminal* di mana sedang dilakukan kajian oleh ITS.
- *Rig to Solar Power* yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan EBTKE.
- *Recycle* oleh Industri lain (*In Situ Write Off*). ●

Indonesia Pegang Keketuaan di ASEAN untuk Sektor Energi

Indonesia memegang Keketuaan ASEAN tahun 2023 untuk sektor energi. Tema tahun ini adalah “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”.

Menteri ESDM Arifin Tasrif membuka *Kick-off* Keketuaan Indonesia di ASEAN untuk Sektor Energi, Jumat (31/3/2023). Indonesia akan memprioritaskan ketahanan energi berkelanjutan melalui pengembangan interkoneksi pada ASEAN *Power Grid* dan Trans ASEAN *Gas Pipeline* untuk mempercepat transisi energi di Asia Tenggara.

Keketuaan Indonesia ini diharapkan dapat menguatkan sinkronisasi untuk menghasilkan *concrete deliverables* yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi yang berkelanjutan.

“Sektor energi menjadi salah satu bagian dari pilar *Sustainability* yang menyokong Keketuaan Indonesia di ASEAN bersama dua pilar lainnya, yakni *Recovery and Rebuilding* dan *Digital Economy*,” ujar Menteri ESDM dalam kesempatan tersebut.

Kawasan ASEAN memiliki sumber energi baru dan terbarukan yang sangat besar, yaitu lebih dari 17.000 gw untuk dijadikan sebagai modal dalam mencapai target. Dalam jangka pendek, targetnya adalah porsi EBT pada bauran energi mencapai 23% dan porsi EBT pada kapasitas pembangkit sebesar 35% di tahun 2025 sesuai ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC).

Sementara untuk jangka menengah, Nationally Determined Contributions (NDCs) tahun 2030 sesuai target

penurunan emisi Gas Rumah Kaca masing-masing negara ASEAN. Untuk jangka panjang, targetnya mencapai *Net Zero Emission* (NZE) sekitar tahun 2050.

“Kami mendorong seluruh anggota ASEAN untuk mendeklarasikan target NZE pada ASEAN *Ministers on Energy Meeting* (AMEM) ke-41 di bulan Agustus 2023,” imbuh Menteri ESDM.

Komitmen bersama ini akan menjadi dasar Roadmap NZE ASEAN yang dapat digunakan sebagai rencana aksi transisi energi yang adil, terjangkau, andal, dan berkelanjutan dengan prinsip “*no one left behind*” sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial serta prioritas masing-masing negara ASEAN. ●



Capai 68%, Pemanfaatan Gas Domestik Dorong Gasifikasi Kelistrikan



Sebanyak 68% produksi gas saat ini dimanfaatkan untuk domestik. Persentase ekspor gas Indonesia pun telah mengalami penurunan secara bertahap sejak 2012. Hal ini turut mendorong program gasifikasi kelistrikan.

Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen meningkatkan pemanfaatan gas guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Sumber gas Indonesia cukup besar dan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri yang semakin meningkat. Persentase ekspor gas Indonesia telah mengalami penurunan secara bertahap sejak 2012 dan hingga saat ini pemanfaatan gas domestik mencapai 68% di mana sektor industri menjadi konsumen terbesar, diikuti kelistrikan,” ujar Direktur Pembinaan Program Migas Mustafid Gunawan saat menjadi pembicara pada *Workshop “On Improving Energy Security in Islands*

and Remote Grids in ASEAN through Utilisation of Emerging Clean Energy Innovation” di Hotel Shangrila, Rabu (5/4/2023).

Workshop ini merupakan rangkaian *side event* Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 di Sektor Energi. Kegiatan ini juga merupakan kerja sama Ditjen Migas, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Asean Centre for Energy dan Dewan Energi Nasional (DEN).

Mustafid menuturkan, peran gas menjadi semakin krusial saat ini untuk mendukung ketahanan energi dan perubahan iklim mengingat emisi gas lebih kecil dibandingkan batu bara maupun minyak bumi. Sumber gas Indonesia yang cukup banyak ini, membuat Pemerintah terus melakukan upaya untuk peningkatan produksi gas dari lapangan-lapangan yang ada, pengembangan migas konvensional dan nonkonvensional, *workover*, dan EOR. ●



Pasokan Energi Selama Libur Idul Fitri 1444H Aman dan Lancar

Pasokan energi selama periode libur Idul Fitri 1444H aman dan lancar. Hal ini berdasarkan pantauan Posko Nasional Idul Fitri 1444H sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang resmi ditutup Selasa (2/5/2023).

Posko Nasional Idul Fitri 1444H sektor ESDM beroperasi selama 23 hari sejak tanggal 10 April 2023. Selama pelaksanaan posko, pasokan energi berlangsung aman dan lancar.

Selama Posko Nasional Idul Fitri 1444H sektor ESDM berlangsung, hasil evaluasi tim sebagai berikut:

A. BBM

- Kondisi ketersediaan (stok) BBM dan penyaluran BBM dalam kondisi aman, dengan *coverage day* berkisar antar 4–77 hari.
- Kondisi ketersediaan dan pendistribusian BBM secara umum berjalan dengan

baik dan lancar, tidak terjadi kelangkaan dan juga tidak ada antrean dalam pengisian BBM di seluruh SPBU.

- Penyaluran BBM tertinggi secara nasional terjadi pada arus mudik pada tanggal 20 April 2023 dengan kenaikan sebesar 40,78% dari penyaluran normal secara nasional. Sedangkan pada arus balik, terjadi kenaikan signifikan pertama pada tanggal 25 April 2023 dengan kenaikan sebesar 17,71% dari penyaluran normal dan kedua pada tanggal 29 April 2023 dengan kenaikan sebesar 12,95% dari penyaluran normal.
- Kabupaten/kota dengan penyaluran BBM tertinggi rata-rata berada di Provinsi Jawa Tengah, seperti Kabupaten Brebes pada tanggal 20 April penyalurannya mencapai 222,9% dari normal. Kemudian

beberapa kabupaten/kota berkisar 170%–200%, yaitu Pekalongan, Batang, Pemalang, Tegal, Semarang, Cirebon, Mojokerto, dan Wonogiri.

- Penyaluran Solar selama periode posko turun sebesar 22%.
- PT Pertamina menyiagakan 114 Terminal BBM, 7.491 SPBU, dan 68 DPPU.

B. LPG

- Ketersediaan LPG dalam kondisi aman, dengan *coverage day* secara nasional 15–17 hari.
- Dalam periode tersebut juga, Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas dan Pertamina menyiagakan 23 Terminal LPG, 667 SPBBE, dan 5.471 Agen LPG. Agen LPG disiagakan 24 jam khusus pada wilayah dengan *demand* tinggi.



- c. Penyaluran LPG tertinggi terjadi pada tanggal 19 April 2023 dengan volume 31.034 metrik ton per hari atau naik 12,4% jika dibandingkan dengan penyaluran normal.

C. Gas bumi

- a. Kegiatan niaga, pengangkutan, penyimpanan dan penyaluran gas bumi melalui pipa maupun melalui SPBG, serta penyaluran *crude oil* yang dioperasikan oleh Subholding Gas Pertamina beroperasi secara aman, normal, dan berfungsi baik.
- b. Subholding Gas Pertamina telah berhasil menyalurkan gas dan LNG kepada 2.504 pelanggan komersial dan industri, 1.926 pelanggan kecil, 840.000 rumah tangga, dan 9 pembangkit listrik IPP, termasuk PLN Group melalui 25.850 km jaringan pipa gas.
- c. Penyaluran gas tertinggi pada tanggal 22 April 2023 sebesar 998 bbtud dan penyaluran Niaga sebesar 665 bbtud.

D. Kelistrikan

- a. Selama pelaksanaan posko untuk sistem kelistrikan di wilayah perusahaan PLN umumnya berada dalam kondisi pasokan listrik yang aman.
- b. Pada tanggal 25 April terjadi gempa bumi 7,3 SR pukul 03.00 WIB di wilayah Kepulauan Mentawai yang mengakibatkan gangguan pasokan tenaga listrik dengan jumlah pelanggan padam pada 14% di wilayah kerja PLN Sumatera Utara. Namun pada pukul 08.58 WIB, seluruh gangguan tersebut telah kembali normal.

E. Kebencanaan geologi

- a. Tim memantau aktivitas gunung api aktif di seluruh wilayah Indonesia, yaitu di level siaga ada empat gunung api, waspada 17 gunung api, dan normal 47 gunung api.
- b. Terjadi 31 kejadian gerakan tanah atau longsor pada jalur, jalan, dan lereng yang curam dengan skala kecil antara lain

- di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga Banten. Seluruh kejadian gerakan tanah ini secara lokal telah ditangani oleh pemerintah daerah setempat.
- c. Terjadi 11 kejadian gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5 skala MMI dan tidak berdampak kerusakan juga terhadap kondisi energi baik untuk BBM, gas maupun kelistrikan.

Sebagai bagian Posko Nasional Idul Fitri 1444H sector ESDM, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) terjun langsung untuk memastikan ketersediaan energi di sejumlah wilayah, seperti jalur pantura, Tol Trans Jawa, jalur selatan Jawa hingga Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU).

Dalam beberapa pantauan langsung, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji kerap menekankan aspek keselamatan (*safety*) kepada para petugas di lapangan. ●



Pengumuman Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2023

Kementerian ESDM, yang diwakili Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji,

mengumumkan Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2023, Senin (10/4/2023).

Sebanyak tiga wilayah kerja (WK) ditawarkan pada tahap ini:

No	Wilayah Kerja	Lokasi	Luas (Km ²)	Minimum Komitmen Pasti	Mekanisme
1.	Akia	Lepas Pantai Kalimantan Utara	8.394,05	- G&G dan Akuisisi dan processing Seismik 3D 750 km2	Penawaran Langsung
2.	Beluga	Lepas Pantai Natuna Barat	8.472,44	- G&G - 1 sumur eksplorasi	Penawaran Langsung
3.	Bengara I	Dataran Kalimantan Utara	922,17	- G&G - 1 sumur eksplorasi	Penawaran Langsung tanpa Studi Bersama

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen) Tutuka Ariadji mengatakan, seluruh WK menggunakan skema bagi hasil *cost recovery*. Dirjen Migas juga kembali menegaskan komitmen Pemerintah mendukung pengembangan hulu migas.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung pengembangan kegiatan hulu migas di dalam negeri, dengan terus melakukan *improvement* dalam sistem pengelolaan minyak dan gas bumi sehingga dapat meningkatkan keyakinan investor dalam melakukan investasi,” katanya.

Ia menguraikan lebih lanjut potensi masing-masing WK yang ditawarkan.

- WK Akia berlokasi di Lepas Pantai Kalimantan Utara merupakan WK Eksplorasi dengan perkiraan sumber daya sebesar 2 billion barrel oil (bbo) minyak dan 9 triliun cubic feet (tcf) gas.
- WK Beluga yang berlokasi di Lepas Pantai Natuna Barat merupakan WK Eksplorasi dengan perkiraan sumber daya sebesar 360 juta barrel oil (mmb) minyak dan 50 billion

cubic feet (bcf) gas.

- WK Bengara I berlokasi di Dataran Kalimantan Utara merupakan WK Eksplorasi dengan perkiraan

sumber daya sebesar 90 juta barrel oil equivalent (mmb) minyak dan gas. ●





Kebijakan HGBT

Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US\$6 per mmbtu kepada tujuh industri memberikan sejumlah dampak positif. Daya saing industri nasional meningkat, baik dari sisi perpajakan maupun penyerapan tenaga kerja. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi pun turut meningkat.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji di Jakarta saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI, Selasa (11/4/2023).

Kebijakan HGBT diberlakukan Pemerintah sejak tahun 2020. Pada periode 2020–2021, terdapat peningkatan pendapatan perpajakan sebesar 20% dari industri penerima kebijakan HGBT dengan pendapatan pajak sebesar Rp15,3 triliun pada tahun 2021. Padahal ketika itu, dunia masih mengalami pandemi Covid-19

di mana kegiatan industri juga mengalami pelemahan.

Pada tahun 2021, seluruh sektor industri penerima kebijakan HGBT mencatatkan pertumbuhan perpajakan yang bernilai positif. Peningkatan terbesar berasal dari sektor sarung tangan karet, yang mengalami peningkatan hingga 3,5 kali.

Dari sisi tenaga kerja, baik tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja pada tahun 2019 hingga 2021 pada industri penerima kebijakan HGBT.

Pada tahun 2020, terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 4.532 orang atau 1% apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja meningkat sebesar 7% atau sebesar 8.561 orang apabila dibandingkan dengan tahun 2020.

Industri keramik merupakan industri penerima kebijakan HGBT yang mencatatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar apabila dibandingkan dengan industri penerima kebijakan HGBT lainnya.

“Data tersebut semakin mengukuhkan peran migas dalam kebijakan HGBT ini sebagai menjadi modal pembangunan nasional, tidak hanya sebagai salah satu sumber penerimaan negara saja,” ujar Tutuka.

Data mengenai peningkatan pendapatan perpajakan dan penyerapan tenaga kerja dari industri penerima kebijakan HGBT tersebut bersumber dari Kementerian Perindustrian. Data itu kemudian diolah oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). ●

Kementerian ESDM Berangkatkan 1.155 Pemudik Gratis

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana, mewakili Menteri ESDM, melepas keberangkatan rombongan mudik gratis Hari Raya Idul Fitri 1444 H dari Kantor Kementerian ESDM, Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (17/4/2023). Jumlah peserta mudik gratis ini adalah 1.155 orang.

“Sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian ketahui bahwa pandemi yang selama ini kita alami, tidak terasa sudah 3 tahun membuat kita tidak membuat acara seperti ini. Jadi terhitung 2020, 2021, 2022 kita tidak lagi mengadakan mudik bareng dan *alhamdulillah* dengan membaiknya kondisi pandemi, tahun ini kita mulai lagi mengadakan acara seperti ini. *Insy Allah* ini bisa berlanjut ke tahun-tahun berikutnya,” ungkap Rida.

Rida mengingatkan kepada seluruh peserta mudik dan juga pengemudi agar tetap berhati-hati dan saling menjaga serta mengingatkan supaya selamat sampai di tujuan.

“Kami hanya berpesan kepada peserta mudik dan juga pengemudi, tolong bisa saling menjaga, tidak perlu ngebut. Kalau supirnya ngebut, tolong penumpangnya mengingatkan agar jangan ngebut. Jadi intinya tolong hati-hati, agar bisa selamat sampai tujuan,” katanya.

Sebanyak 1.155 peserta mudik ini diberangkatkan dengan 31 bus.

Pemberangkatan dilaksanakan serentak di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Bandung.

Penyelenggaraan Mudik Gratis Keluarga Besar Kementerian ESDM tahun 2023 terselenggara atas kerja sama PT Pertamina (Persero), PT Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT PLN (Persero), PT PGN (Tbk), dan Bank BRI. ●



Perkuat Silaturahmi dan Sinergitas, Ditjen Migas Adakan Halal Bihalal Idul Fitri 1444 H

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) menggelar Halal Bihalal di Auditorium Ibnu Sutowo, Jakarta, Selasa (2/5/2023). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dan sinergitas di lingkungan Ditjen Migas.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji memimpin Halal Bihalal ini. Acara ini turut dihadiri oleh para Pejabat Eselon II, Ketua Kelompok Kerja, dan pegawai di lingkungan Ditjen Migas.

“Segegap pimpinan Ditjen Migas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 H. Mohon maaf lahir dan batin atas kekhilafan selama kami memimpin Ditjen Migas,” ujar Dirjen Migas Tutuka Ariadji.

Dia menegaskan, kebijakan atau keputusan yang diambil pimpinan selama ini, semata-mata demi kepentingan bersama, bangsa, dan negara.

Kerja sama yang selama ini terjalin diharapkan dapat ditingkatkan.

Tanpa dukungan seluruh pegawai Ditjen Migas, tidak dapat dihasilkan kebijakan yang signifikan dan berkelanjutan.

“Kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pegawai Ditjen Migas atas dedikasinya untuk institusi ini, bangsa dan negara,” imbuhnya.

Tutuka juga menyampaikan apresiasinya atas kinerja Ditjen Migas selama tahun 2023 yang terus melejit sesuai dengan harapan Menteri ESDM.

Pemerintah Jepang Beri Bintang Jasa kepada Menteri ESDM

Pemerintah Jepang menyematkan Anugerah Bintang Jasa The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif. Pemerintah Jepang menilai Menteri ESDM telah berkontribusi bagi peningkatan hubungan dan persahabatan antara Jepang dan Indonesia.

Upacara Penganugerahan dan penyematan bintang jasa dilakukan oleh Perdana Menteri Jepang, H.E. Fumio Kishida. Selanjutnya, dilakukan audiensi dengan Kaisar Jepang, YM. Naruhito di Istana Kekaisaran Jepang (Imperial Palace).

“Saya berterima kasih kepada Pemerintah Jepang atas anugerah ini. Terima kasih kepada semua



pihak yang telah berperan dalam upaya meningkatkan kerja sama dan persahabatan antara Indonesia dan Jepang selama ini,” ujar Menteri ESDM usai menerima anugerah tersebut, Selasa (9/5/2023) waktu Jepang.

Anugerah ini tidak lepas dari peran Menteri Arifin Tasrif yang sebelum menjabat Menteri ESDM dipercaya oleh Pemerintah Indonesia untuk menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang.

“Semoga hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang semakin meningkat ke depannya,” tambah Arifin.

Salah satu kontribusi nyata Arifin pada hubungan kerja sama antara Indonesia dan Jepang adalah turut menginisiasi Asia Zero Emission Community (AZEC). Selain itu,

bersama International Partners Group (IPG) yang dipimpin oleh Jepang dan Amerika Serikat, Menteri ESDM berkontribusi terhadap peluncuran skema pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) pada perhelatan Presidensi G20 di Indonesia tahun 2022 lalu.

Tambah pula, Indonesia juga masih terus berperan aktif dalam dalam Japan-Indonesia Energy Forum (JIEF), yakni forum kerja sama tahunan di sektor energi.

Penghargaan Order of the Rising Sun diberikan kepada individu yang telah mencapai prestasi luar biasa dalam hubungan internasional, promosi budaya Jepang, dan pelestarian lingkungan. Penghargaan ini diberikan pertama kali oleh Kaisar Meiji pada tahun 1875. ●

“Biasanya pada awal tahun, kegiatan dan penyerapan anggaran berbentuk kurva yang melandai, Namun sekarang berubah langsung tajam dan kami sangat menghargai hal itu. Jangan lengah dengan kondisi yang dihasilkan,” tambahnya.

Tahun ini, lanjutnya, akan dilakukan penataan kembali program berbasis IT. Menurut Tutuka, tugas Ditjen Migas akan semakin besar, yaitu menangani emisi CO₂ dalam kegiatan usaha migas. Untuk itu diperlukan berbagai persiapan, terutama terkait kompetensi dan infrastruktur.

“Nantinya, pipa-pipa infrastruktur tidak hanya mengirimkan gas, tetapi juga CO₂ yang sekarang ini dianggap sampah. Kita punya segalanya untuk menjalankan hal ini,” pungkasnya. ●



Ditjen Migas Adakan FGD Kecelakaan Hilir Migas

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) Kecelakaan Hilir Migas, Rabu (17/5/2023). Kegiatan ini bertujuan menganalisa kejadian kecelakaan hilir migas.

FGD ini diikuti oleh sejumlah Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS). Acara ini juga menghadirkan perwakilan Kepala Teknik/Wakil Kepala Teknik Hulu dan Hilir Migas dan Tim Independen Keselamatan Migas (TIPKM).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak kejadian kecelakaan dan *fatality* yang telah terjadi pada kuartal I tahun 2023, yakni kebakaran Kilang Refinery Unit (RU) II Dumai dan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang.

Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Mirza Mahendra mengungkapkan, pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh pembelajaran (*lesson learned*) agar kecelakaan hilir migas serupa tidak terjadi kembali.

“Untuk mendapat pembelajaran agar hal tersebut tidak terjadi kembali dan menjadi *lesson learned* bagi para Kepala Teknik, hari ini kita coba menyampaikan beberapa yang menjadi penyebab utama kecelakaan-kecelakaan tersebut,” kata Mirza dalam acara yang berlangsung secara *hybrid* tersebut.

Selanjutnya, Mirza juga menegaskan bahwa upaya mitigasi atau upaya investigasi kecelakaan migas yang telah dilakukan para inspektur migas maupun TIPKM memiliki prinsip-prinsip.

Prinsip-prinsip itu antara lain tidak mencari siapa yg salah (*no blame*),

tidak untuk memberikan sanksi atau hukuman (*non yudisial*), dan tidak mencari siapa yang bertanggungjawab menanggung kerugian atau (*no liability*), serta investigasi yang dilakukan bersifat transparan.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi Joko Hadi Wibowo melaporkan, sebanyak 441 peserta yang terdiri atas Kepala Teknik/Wakil Kepala Teknik BU/BUT Migas hadir secara daring, sedangkan para narasumber hadir secara luring. ●





Proyek Cisem Tahap I Capai 90 Persen, Siap Lanjut Tahap II

Pembangunan Pipa Transmisi Gas Ruas Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap I (ruas Semarang-Batang) telah mencapai 90%. Meski Tahap I belum rampung sepenuhnya, Pemerintah telah berencana memulai pembangunan Pipa Transmisi Gas Ruas Cisem Tahap II (ruas Batang-Kandang Haur Timur) tahun depan.

Hal ini terungkap dalam Kunjungan Kerja (kunker) Komisi VII DPR ke lokasi Proyek Pembangunan Pipa Cisem Tahap I di Kota Semarang, Kamis (25/5/2023). Dalam kunker ini, Komisi VII DPR dipimpin oleh Wakil Ketua Bambang Haryadi. Sementara dari Kementerian ESDM diwakili oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji dan Kepala BPH Migas Erika Retnowati.

Penyelesaian Pembangunan Pipa Transmisi Gas Ruas Cisem Tahap I diperkirakan lebih cepat satu bulan dari rencana bulan Agustus 2023 menjadi Juli 2023.

“Kami mengapresiasi Kementerian ESDM yang mampu membangun Cisem setelah mangkrak sejak tahun 2006,” kata Anggota Komisi VII DPR Ratna Juwita Sari.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi VII DPR juga meminta agar pembangunan infrastruktur ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan industri, tetapi

juga masyarakat luas, seperti jargas rumah tangga.

Tutuka Ariadji menyampaikan, konstruksi pipa Cisem tahap I telah dimulai sejak Mei 2022. Proyek ini telah melalui 1.526.035 jam kerja aman. Proyek ini turut menggerakkan ekonomi dengan menyerap hingga 753 tenaga kerja. Selain itu, proyek tersebut juga membantu industri dalam negeri dengan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) per triwulan I 2023 telah mencapai 63,52%.

“Pipa yang dibangun sepanjang 60 km dengan biaya Rp1,13 triliun. Capaian saat ini sekitar 90%. Setelah pembangunan pipa selesai, akan dilakukan *pre-commissioning* berupa *hydrotest* dan selanjutnya *commissioning* rencananya dilakukan awal Juli 2023. Pembangunan pipa Cisem lebih cepat satu bulan dari rencana 15 bulan,” papar Tutuka.

Tutuka meneruskan, pembangunan Cisem Tahap II dari Batang hingga ke Kandang Haur Timur direncanakan berlangsung tahun 2024 hingga 2025.

“Pembangunan Cisem Tahap II dari Batang ke Cirebon hingga Kandang Haur Timur karena sambungan pipa dari lokasi itu sampai ke Lampung dan seterusnya sudah ada,” jelas Tutuka.

Pembangunan pipa Cisem Tahap

II ini panjangnya empat kali lipat dibandingkan Cisem Tahap I dan direncanakan pada akhir tahun 2023 sudah dapat dilakukan proses lelang.

Potensi *demand* pipa Cisem Tahap II ini antara lain industri di Cirebon, Tegal, Pekalongan, Brebes, dan Pemalang dengan volume sekitar 5,8–12 mmscfd. Selain itu, konsumen komersial, seperti hotel dan restoran. Juga, jaringan gas rumah tangga, kilang minyak Balongan dengan volume 24 mmscfd dan berpotensi meningkat hingga 42 mmscfd. *Demand* lainnya adalah pembangkit tenaga listrik dengan volume 189–199 mmscfd. ●



Gandeng Kemnaker, Ditjen Migas Tekankan Pentingnya Keselamatan Migas



Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), melalui Direktorat Teknik Lingkungan Migas, bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam sosialisasi keselamatan migas. Hal ini penting mengingat tenaga kerja di subsektor migas memiliki risiko tinggi dalam menjalankan pekerjaannya.

Hal ini terungkap dalam *Management Walk Through (MWT)* ke PT Pertamina EP Zona 1, Pangkalan Susu, Sumatera Utara, Kamis (8/6/2023). Acara ini turut dihadiri antara lain oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra dan Koordinator Bidang Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pidana Tenaga Kerja Ditjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Agus Subekti.

Dalam sambutannya, Mirza menyampaikan, MWT kali ini sedikit

berbeda dengan beberapa kegiatan serupa sebelumnya.

“Kali ini, kami berkolaborasi dengan Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker. Kita sama-sama saling melihat, saling berkoordinasi. Kita sama-sama melihat langsung ke lapangan. Kita di sini untuk mengingatkan kembali terkait dengan budaya-budaya keselamatan yang ada. Kita *solving problem* juga. Ada perkembangan-perkembangan apa lagi yang ada di lapangan. Beberapa hal, yang bisa kita action untuk *improve*, maka langsung kita *improve*,” jelasnya.

Ia berharap, kolaborasi ini menghilangkan gap-gap atau dualisme pengaturan. Menurutnya, pihak yang paling terdampak dari dualisme pengaturan ini adalah pelaku usaha.

Terlebih, pelaku usaha hulu migas



memang bertujuan memproduksi migas sebesar-besarnya. Namun, dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek keselamatan.

“Kita benar-benar bahu-membahu dengan Badan Usaha. Saya kurang setuju kalau kita disebut sebagai pengawas. Memang iya secara tertulis sebagai pengawas. Tapi, *actually* kita sebagai partner untuk menjaga industri ini tetap aman, andal, layak, dan manusiawi,” tegasnya.

Mewakili Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Agus mengapresiasi MWT ini.

Terlebih, Kemnaker turut dilibatkan untuk berperan serta aktif dalam peningkatan keselamatan migas.

Agus mencatat, ada sejumlah hal yang perlu dikoordinasikan atau dikerjasamakan dalam pembinaan dan pengawasan serta pengujian dan sertifikasi K3. Hal-hal tersebut terdiri dari hal umum dan khusus.

Hal umum mencakup evaluasi menyeluruh secara nasional pelaksanaan K3 di subsektor migas; review dan penyesuaian/ harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program K3 antara Kemnaker dan Kementerian ESDM.

Hal umum lainnya adalah menyusun/memperbarui MoU; membentuk tim pembinaan dan pengawasan bersama antara pengawas ketenagakerjaan dengan Inspektur Migas dan SKK Migas; dan menyusun pedoman pengawasan bersama di subsektor migas.

Untuk hal-hal khusus, tambahnya, adalah melakukan pembinaan dan pengawasan K3 bersama secara rutin, termasuk program JKK BPJS Ketenagakerjaan; pendataan dan evaluasi objek K3; setiap kasus kecelakaan kerja yang terjadi dilakukan investigasi bersama sebaik mungkin agar menjadi pembelajaran yang berharga untuk mencegah kejadian kecelakaan kerja selanjutnya.

Hal-hal khusus juga mencakup penyusunan dokumen pengendalian Potensi Bahaya Besar/Menengah Kimia di tempat kerja pada industri Migas sesuai Kepmenaker No. 187 Tahun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja; kerja sama pengujian Teknis K3, Pengujian Lingkungan Kerja, pemeriksaan kesehatan kerja serta penerapan SMK3 berdasarkan PP No. 12 Tahun 2012 tentang Penerapan

SMK3 selaras dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Lalu, melakukan peningkatan kompetensi dan Sertifikasi SDM K3 sesuai regulasi; kerja sama secara intensif dalam penyusunan profil K3 nasional dan pengembangan serta pelaksanaan program K3 nasional; dan pengelolaan bersama data objek pengawasan K3 dan data kecelakaan

kerja dan penyakit akibat kerja untuk memperkaya data profil K3 nasional selanjutnya,” lanjutnya.

MWT yang melibatkan Kemnaker juga terlihat saat Tim Direktorat Teknik Lingkungan Migas mengunjungi Terminal BBM Medan Group, Sumatera Utara, Jumat (9/6/2023). Terminal BBM Medan Group dikelola oleh PT Pertamina Patra Niaga. ●



Ditjen Migas Gelar Rakor Realisasi *Lifting* Migas Triwulan I Tahun 2023

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Realisasi *Lifting* Migas Triwulan I Tahun 2023 pada Kamis (25/5/2023) hingga Jumat (26/5/2023).

Dalam kesempatan ini, Direktur Pembinaan Program Migas yang diwakili Koordinator Penerimaan Negara dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Migas Heru Windiarto menyampaikan, kesamaan pemahaman mutlak diperlukan dan melihat secara arif ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini perlu guna menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Besaran penerimaan negara sektor migas sangat rentan akan perubahan dan dipengaruhi oleh beberapa parameter utama yang berfluktuasi, seperti harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, volume *lifting*, faktor alam dan pengelolaannya yang didasarkan pada beberapa regulasi.

Dalam APBN Tahun 2023 yang telah disetujui oleh Pemerintah dan DPR RI

telah ditargetkan penerimaan migas sebesar Rp131,2 triliun.

“Besaran ini dihitung dengan menggunakan asumsi makro dimana *lifting* minyak bumi sebesar 660 mbopd, *lifting* gas bumi sebesar 1.100 mboepd, ICP sebesar US\$90,00 per barel, dan nilai tukar rupiah sebesar Rp14.800 per US\$,” ungkap Heru.

Lebih lanjut, Heru menyampaikan bahwa kinerja kegiatan usaha hulu migas triwulan I tahun 2023 (periode Januari hingga Maret 2023), secara nasional realisasi *lifting* minyak bumi rata-rata sebesar 590,41 mbopd atau mencapai 89%, realisasi *lifting* gas bumi sebesar 936,15 mboepd atau mencapai 85%. Sedangkan realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US\$77,54 per barel atau mencapai 86% dibanding target sebesar US\$90 per barel.

“Sampai dengan Triwulan I tahun 2023 pencapaian target *lifting* migas masih menghadapi banyak kendala di lapangan, baik kendala operasi, kegiatan pengembangan maupun kendala nonteknis lainnya sehingga koordinasi yang telah berjalan

selama ini antara seluruh pemangku kepentingan termasuk daerah penghasil migas seluruh Indonesia diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan *lifting* migas pada periode berikutnya,” imbuh Heru pada acara yang digelar secara *hybrid* tersebut.

Namun, pihaknya tetap optimis karena Ditjen Migas Kementerian ESDM bersama dengan SKK Migas, BPMA, dan seluruh KKKS senantiasa berusaha untuk mempertahankan dan atau meningkatkan produksi migas pada tahun-tahun berikutnya.

“Dengan program eksplorasi dan program lainnya yang diupayakan untuk mencapai 1 juta barel di tahun 2030, dengan kondisi variabel-variabel lainnya bagus sesuai target, maka dimungkinkan mencapai target di tahun 2023,” tandas Heru optimis. ●





Pemerintah Terus Berupaya Tingkatkan Investasi Migas

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji berkesempatan menjadi keynote speaker dalam IndoGAS dan Power 2023 yang digelar tanggal 13–14 Juni 2023 dengan tema “Indonesia Gas - Bridge to a Sustainable Future”. Pada kesempatan ini, Tutuka menegaskan Pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di bidang migas.

Upaya-upaya yang dimaksud meliputi perbaikan *terms and conditions* dalam penawaran wilayah kerja migas, fleksibilitas bentuk kontrak kerja sama, dan fasilitas perpajakan serta insentif.

“Pemerintah terus berupaya meningkatkan iklim investasi migas. Kami mendengarkan masukan investor, termasuk KKKS dan berupaya meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik,” ujarnya pada sesi Business Forum dalam IndoGAS dan Power 2023 di Hotel Westin, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Tutuka memaparkan, Pemerintah melakukan perbaikan *terms and*

conditions pada lelang wilayah kerja (WK) migas berupa perbaikan sharing split First Tranche Petroleum (FTP) sebesar 10% *shareable*, *signature bonus* bersifat *open bid*, fleksibilitas bentuk kontrak bagi hasil, DMO *price* sebesar 100% ICP, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan sebagian wilayah kerja selama tiga tahun pertama, tidak ada *cost ceiling* untuk *Cost Recovery* dan kemudahan untuk akses paket data melalui mekanisme keanggotaan (*membership*).

“Pemerintah memberikan bagi hasil yang menarik di mana untuk wilayah kerja migas yang berisiko tinggi. Untuk gas, bagi hasilnya dapat mencapai 50% bagi Pemerintah dan 50% bagi KKKS,” jelasnya.

Perbaikan bagi hasil sebesar 50:50 ini, lanjut dia, telah diimplementasikan di sejumlah kontrak kerja sama migas antara lain Blok Agung I dan Blok Agung II yang dikelola BP.

Pemerintah juga berupaya melakukan perbaikan *terms and conditions* untuk blok eksisting demi meningkatkan

produksi, penyempurnaan data hulu migas, serta penyederhanaan perizinan.

“Kami menyadari daya saing Indonesia tidak setinggi negara tetangga. Namun demikian, kami berupaya meningkatkan IRR (*Internal Rate of Return*) yang saling menguntungkan bagi Pemerintah dan KKKS,” ungkap Tutuka.

Terkait perpajakan dan insentif, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan memiliki pemahaman yang sama untuk memberikan fasilitas ini demi menunjang usaha migas. Fasilitas perpajakan dan insentif ini juga diharapkan dapat diberikan bagi kegiatan CCS/CCUS.

Selain hal-hal tersebut, Pemerintah mendukung revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang merupakan inisiatif DPR.

Sementara mengenai bentuk kontrak kerja sama, kata dia, Pemerintah tengah merevisi aturan mengenai kontrak kerja sama *Gross Split* menjadi lebih sederhana.

“Kami berupaya menyederhanakan bentuk kontrak *Gross Split*. *Draft* usulan telah disampaikan kepada *stakeholder*, serta menerima sejumlah masukan perbaikan. Diharapkan dalam waktu satu atau dua bulan ke depan dapat diselesaikan,” paparnya.

Kali Pertama, Forum Komunikasi (Forkom) Keselamatan Sektor ESDM Digelar

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar Forum Komunikasi (Forkom) Keselamatan Sektor ESDM di Tangerang, Banten, Jumat (16/6/2023). Forkom Keselamatan Sektor ESDM ini untuk kali pertama diadakan.

Pada penyelenggaraan Forkom sebelumnya, lebih bersifat subsektor saja, seperti Forkom Keselamatan Migas atau pada subsektor pertambangan saja.

Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam sambutan virtualnya mengatakan bahwa Forkom Keselamatan Sektor ESDM ini perlu dilaksanakan mengingat telah terjadi beberapa kecelakaan pada instalasi/ infrastruktur milik Badan Usaha yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian ESDM.

“Kecelakaan ini antara lain disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan manajemen terhadap jalannya operasi perusahaan, perilaku tidak aman dan praktek-praktek di bawah standar. Sehingga menyebabkan korban jiwa, kerugian material, serta mengganggu proses kegiatan secara menyeluruh dan merusak lingkungan yang akhirnya berdampak kepada masyarakat luas,” jelasnya.

Oleh karena itu, sambung Arifin, Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) sangat penting untuk dilaksanakan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, bebas dari kecelakaan kerja, dan bebas pencemaran lingkungan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Untuk mengantisipasi terhadap berulangnya peristiwa kecelakaan kerja dan gangguan operasi sektor ESDM, Arifin meminta agar segera

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Aspek keamanan dan keselamatan kerja harus menjadi perhatian dan komitmen Pimpinan serta terus diinternalisasikan ke seluruh lapisan pegawai hingga terwujudnya budaya yang menempatkan keselamatan adalah prioritas utama (*safety first*).
- Melaksanakan monitoring dan pengawasan rutin tiap tahun, serta melaksanakan *safety audit*.
- Melakukan *capacity building* terkait aspek keamanan dan keselamatan kerja (*Safety*) dan keteknikan dengan peningkatan kompetensi dan kualifikasi melalui *training* secara rutin, baik di dalam maupun luar negeri bagi staf khususnya para Inspektur.

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Migas (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji mengungkapkan bahwa Forkom Keselamatan ESDM ini merupakan acara diskusi terkait pembinaan dan pengawasan aspek keselamatan, meningkatkan koordinasi sesama inspektur, *sharing* pengalaman sehingga dapat dijadikan pelajaran bersama agar kecelakaan kerja tidak terulang lagi.

“Forkom ini diselenggarakan selama satu hari yang diikuti oleh 150 hingga 200 peserta, yang berasal dari inspektur migas, inspektur tambang, inspektur listrik dan inspektur panas bumi, serta pejabat KESDM terkait,” pungkasnya.

Dalam Forkom Keselamatan Sektor ESDM dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu Pemaparan Program Kerja oleh masing-masing Direktur, *Sharing Session* masing-masing subsektor yang dilakukan dalam dua sesi.

Dari hasil kegiatan Forum Komunikasi Keselamatan Sektor ESDM 2023 ini diharapkan tersusunnya nota kesepahaman program keselamatan sektor ESDM dan deklarasi Komitmen Keselamatan antarsubsektor ESDM. ●



New Simplified Gross Split Dorong Pengembangan Migas

Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan bisnis hulu migas. Bisnis hulu migas yang lebih sederhana, cepat, kompetitif, efektif, dan akuntabel diyakini dapat meningkatkan iklim investasi migas. Maka, munculah istilah *New Simplified Gross Split*.

“Pemerintah melakukan upaya revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Dalam perkembangannya, kontrak ini mengalami beberapa kali perubahan dengan harapan agar tujuan kontrak *Gross Split* dapat dicapai, yaitu menciptakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan bisnis penunjangnya menjadi global dan kompetitif, serta mendorong usaha eksplorasi dan eksploitasi yang lebih efektif dan cepat,” ujar Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Noor Arifin Muhammad pada acara Konsultasi Publik Rancangan Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* di Alila Hotel Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/5/2023), yang dihadiri oleh SKK Migas, KKKS, dan IPA.

Tujuan lain yang ingin dicapai adalah agar KKKS untuk lebih efisien sehingga mampu mengatasi gejolak harga minyak dari waktu ke waktu, mendorong bisnis proses KKKS dan SKK Migas menjadi lebih sederhana dan akuntabel, serta mendorong KKKS untuk mengelola biaya operasi dan investasi dengan berpijak pada sistem keuangan korporasi, bukan sistem keuangan negara.

Noor Arifin memaparkan, selain kontrak *Gross Split*, Indonesia juga memiliki bentuk kontrak lainnya yaitu Kontrak Bagi Hasil *Cost Recovery* yang telah diberlakukan sejak puluhan tahun silam. Dengan adanya dua bentuk kontrak tersebut, KKKS memiliki pilihan bentuk kontrak.

Lebih lanjut Noor Arifin menjelaskan, terdapat empat urgensi dalam penyempurnaan kontrak *Gross Split*. Pertama, memberikan kepastian nilai bagi hasil yang lebih kompetitif bagi KKKS.

“Penyusunan ulang sistem bagi hasil yang lebih kompetitif dengan negara lain dengan target total bagi hasil sebelum pajak KKKS pada rentang 80%–90% yang ditentukan berdasarkan profil risiko lapangan untuk meningkatkan kegiatan dan iklim investasi hulu minyak dan gas,” ujar Arifin.

Kedua, meminimalisir ketergantungan keekonomian KKKS terhadap tambahan split diskresi Menteri. Ketiga, simplifikasi dan penyempurnaan komponen dan parameter bagi hasil. Keempat, perancangan kebijakan fiskal yang cocok untuk Migas Non Konvensional (MNK).

Sementara itu, KKKS memberikan tanggapan positif terhadap rancangan perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* yang saat ini digodok Pemerintah. Hal ini terlihat dalam Konsultasi Publik Rancangan Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

“Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemerintah untuk perbaikan kontrak *Gross Split* untuk meningkatkan *competitiveness* migas Indonesia. Ini tindak lanjut *workshop* di Bandung bulan Desember 2022. Dalam waktu enam bulan sudah ada *draft*. Ini luar biasa,” kata Ali Nazir mewakili Indonesia Petroleum Association (IPA) dalam pertemuan tersebut.

Hal senada juga disampaikan Imelda dari Pertamina Hulu Energi dan Gunawan dari Pertamina Hulu Rokan.

“Rancangan baru ini menjadi angin segar bagi KKKS seperti PT Pertamina,” kata Imelda.

Pada kesempatan tersebut, KKKS juga menyampaikan masukan dan pertanyaan terkait rancangan tersebut. Antara lain, usulan agar mempertimbangkan biaya yang tinggi (*maintenance*) wilayah kerja (WK) alih kelola dan tambahan *split* untuk WK migas *mature*.

Selain rancangan perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, Pemerintah juga menyusun rancangan Kepmen tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* yang digunakan acuan dalam penetapan dan penyesuaian bagi hasil pada kontrak *Gross Split*. ●



Ditandatangani, Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja East Natuna, Sangkar, dan Peri Mahakam Bernilai US\$22,7 Juta

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji menyaksikan Penandatanganan Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja (WK) East Natuna, Sangkar, dan Peri Mahakam di Gedung Heritage Kementerian ESDM, Selasa (30/5/2023). Total investasi tiga WK ini sebesar US\$22,7 juta dan bonus tanda tangan US\$600 ribu.

Penandatanganan kontrak bagi hasil WK East Natuna dan dua WK hasil lelang Penawaran Langsung Tahap II Tahun 2022 dilakukan antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

WK East Natuna merupakan WK yang diusulkan pengelolaannya secara langsung oleh PT Pertamina Hulu Energi yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero). WK Sangkar dan Peri Mahakam (WK Eksplorasi) merupakan wilayah yang dilelang oleh Pemerintah melalui Lelang Penawaran Langsung Tahap II Tahun 2022 periode November 2022–

Januari 2023 dan telah diumumkan pemenangnya tanggal 22 Februari 2023.

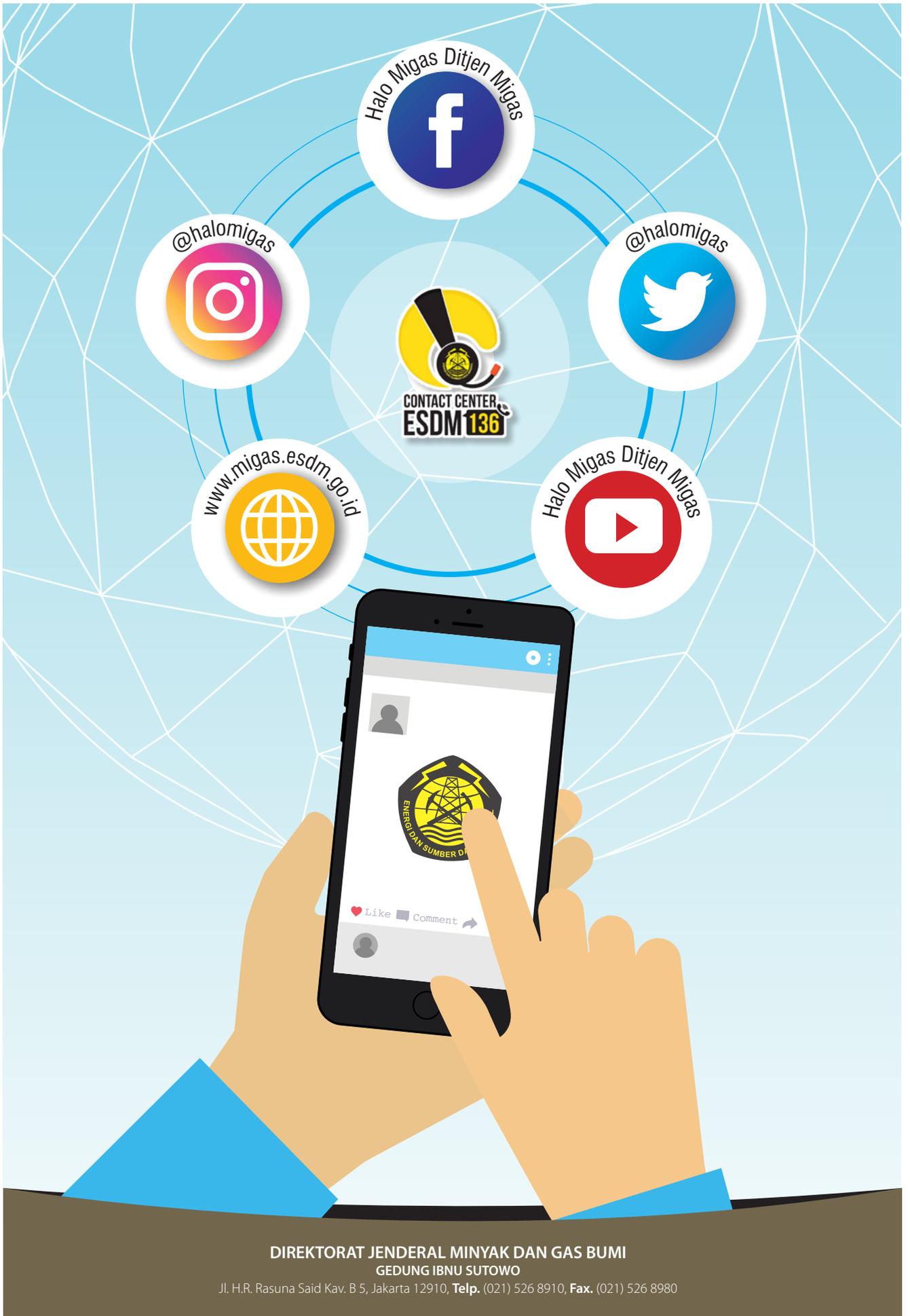
Kontrak Bagi Hasil WK Eksplorasi untuk ketiga WK tersebut berjangka waktu 30 tahun.

“Seluruh KKKS telah menyelesaikan kewajiban finansialnya yaitu pembayaran bonus tanda tangan dan menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sebelum penandatanganan kontrak kerja sama,” kata Tutuka. ●



Rincian kontrak kerja sama

No.	Wilayah Kerja	Kontraktor	Komitmen Pasti dan Bonus Tanda Tangan
1	East Natuna	PT Pertamina East Natuna	1 Studi G&G; Akuisisi Data Seismik 3D 430 km ² ; dan 1 sumur eksplorasi dengan total investasi senilai US\$12,500,000 Bonus tanda tangan : US\$500,000
2	Sangkar	PT Saka Eksplorasi Timur	2 Studi G&G dan Akuisisi Data Seismik 3D 150 km ² ; dengan total investasi senilai US\$3,000,000 Bonus tanda tangan : US\$50,000
3	Peri Mahakam	ENI Peri Mahakam Limited (49%) PT Pertamina Hulu Borneo (51%)	3 Studi G&G; Akuisisi Data Seismik 3D 150 km ² ; dan 1 sumur eksplorasi dengan total investasi senilai US\$7,200,000 Bonus tanda tangan : US\$50,000



Halo Migas Ditjen Migas

@halomigas

@halomigas

www.migas.esdm.go.id

Halo Migas Ditjen Migas

CONTACT CENTER
ESDM 136

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
GEDUNG IBNU SUTOWO

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 5, Jakarta 12910, Telp. (021) 526 8910, Fax. (021) 526 8980



Manfaatkan Energi dengan Bijak

Guna Mewujudkan Ketahanan Energi Untuk Negeri

Terutama energi fosil yang tidak dapat diperbaharui...
Agar masih dapat dirasakan anak cucu kita nanti...



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

GEDUNG IBNU SUTOWO
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 5, Jakarta 12910
Telp. (021) 526 8910, Fax. (021) 526 8980
www.migas.esdm.go.id



www.migas.esdm.go.id



@halomigas



Halo Migas Ditjen Migas



@halomigas



Halo Migas Ditjen Migas

